

Nelayan & Kemiskinan

NELAYAN BUGIS SUMPANG MINANGAE

Syamsul Bahri
Fatmawati P.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI DAN BUDAYA SULAWESI SELATAN

NELAYAN DAN KEMISKINAN

Nelayan Bugis Sumpang Minangae

Penerbit

Syamsul Bahri

Fatmawati P.

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ihsanul Amri

Editor

Aldi Nur Sunni

Penerbit

UPT Unhas Press

Syamsul Bahri

Fatmawati P.

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press (Kantor Penerbit dan Kantor Hukam)

Telp: 0411-897706 P. 0411-897706 F. 0411-897706

Kampus Unhas Tamalate, Jln. Pahlawan Kemerdekaan km. 10

Email: unhaspress@gmail.com

Hak Cipta © Syamsul Bahri & Fatmawati P. All rights reserved. Hak

cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan I 2019

ISBN 978-979-530-337-7

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi)

Selatan) dan Anggota APPI (Ikatan Penerbit Perguruan Tinggi

Indonesia)

Penerbit:



UPT Unhas Press

NELAYAN DAN KEMISKINAN

Nelayan Bugis Sumpang Minangae

Penulis

Syamsul Bahri

Fatmawati P.

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ihlusal Amal

Editor

Alem Febri Sonni

Penerbit

UPT Unhas Press

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press (depan Fakultas Hukum)

Telepon: 0411 – 8997706 HP/WA 085353555569

Kampus Unhas Tamalanrea, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10

Email: unhaspress@gmail.com

Hak Cipta © Syamsul Bahri & Fatmawati P. All rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan I 2019

ISBN 978-979-530-237-7

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan) dan Anggota APPTI (Ikatan Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

NELAYAN DAN KEMISKINAN

Nelayan Bugis Sumpang Minangae

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, segala puji bagi-Nya, pemilik samudra pengetahuan, penguasa alam raya, zat yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada seluruh semesta.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian di wilayah Sumpang Minangae di Kota Parepare. Salah satu wilayah dengan mata pencaharian nelayan terbesar di kota tersebut. Melalui buku ini, pembaca akan diantarkan mengarungi kehidupan para nelayan yang digambarkan secara sistematis.

Pembahasan buku ini akan dimulai pada landasan buku ini disusun sebagai fondasi dalam penyusunan buku ini. Kemudian, pembaca akan melihat bagaimana realitas yang terjadi pada masyarakat Sumpang Minangae dari berbagai aspek, seperti sistem nilai dan kebudayaan yang berkembang, relasi antara nelayan dan kemiskinan di wilayah tersebut, keterlibatan pemerintah dan relasinya kepada masyarakat, hingga bagaimana sistem nilai budaya yang berkembang menjadi solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di Sumpang Minangae.

Kami berharap buku ini dapat menjadi pemantik yang mampu membangun kesadaran berpengetahuan para pembacanya. Sehingga pada akhirnya kitapun bisa menjadi sadar akan realitas-realitas yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita bersama merefleksikan realitas yang hadir, yang mungkin dan akan menjadi salah satu pengalaman dan pengetahuan yang penting digunakan dalam proses-proses berpengetahuan.

Makassar, Desember 2019
Penerbit

PENGANTAR EDITOR

Manusia pada dasar merupakan makhluk sosial yang tentu saja hidup bersesama dengan yang lain. Bahu-membahu dan gotong royong menjadi salah satu faktor yang mengeratkan manusia dengan sesamanya. Lebih jauh, manusia kemudian melahirkan suatu sistem sosial sebagai sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Dalam pengimplemetasiannya, sistem sosial tersebut tentu saja menghadapi banyak permasalahan serta dinamika sosial kemasyarakatan. Permasalahan serta dinamika tersebut tentu saja berasal dari berbagai aspek yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, permasalahan ini terkadang tidak banyak menjadi perhatian, baik masyarakat dalam sistem tersebut maupun yang berada di luar sistem.

Buku ini kemudian berusaha untuk menjelaskan realitas yang saat ini terjadi di salah satu sistem tatanan sosial pada suatu wilayah. Mungkin masalah tersebut ada yang pernah kita alami, sadari, atau mungkin menyelesaikannya, atau juga sebaliknya. Masalah-masalah yang kemudian dijelaskan di dalam buku ini me-

upakan masalah yang sudah cukup lama dialami oleh masyarakat. Penulis kemudian akan memberikan beberapa solusi terkait masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Harapannya, buku ini hanya sebagai pemantik dalam lahirnya solusi-solusi yang baru. Bisa jadi solusi tersebut adalah solusi yang kemudian selama ini telah dicari namun mungkin luput dari pemikiran. Mari kiranya kita bersama-sama mencari dan menemukan solusi atas masalah yang akan pembaca hadapi nantinya dalam membaca buku ini.

Makassar, Desember 2019

Alem Febri Sonni

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT —v

PENGANTAR EDITOR —vii

DAFTAR ISI —ix

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN —1

BAGIAN KEDUA: SUMPANG MINANGAE DAN

MASYARAKATNYA —15

Penggambaran Wilayah Sumpang Minangae —16

Letak Sumpang Minangae —16

Luas, Persebaran dan Tata Guna Lahan —20

Kondisi Lingkungan Alam, Fasilitas Lingkungan dan

Musim —21

Potensi Sumber Daya Alam —29

Pola pemukiman —30

Penggambaran Penduduk Sumpang Minangae —31

Besaran Jumlah Penduduk —32

Pengklasifikasian Penduduk —33

Latar Belakang Sosial Budaya —36

Stratifikasi/Strata Sosial —38

Sistem Kekerabatan	—45
Sistem Perkawinan	—48
Sistem Kepercayaan	—51
Keadaan Perikanan	—52
Gambaran Perikanan di Kelurahan Sumpang	
Minangae	—54
BAGIAN KETIGA: SISTEM NILAI BUDAYA SEBAGAI DASAR	
PENANGGULANGAN KEMISKINAN NELAYAN	—57
Model Penerapan Strategi Masyarakat Nelayan	—58
Alat Tangkap Jala	—59
Pukat atau Jaring Biasa	—70
Pancing/Kail	—76
Bunre	—82
Model Keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat	—97
Sistem Nilai Budaya Dalam Keterkaitannya	
Penanggulangan Kemiskinan	—108
Gotong Royong	—108
Teknologi	—110
Bantuan	—112
BAGIAN KEEMPAT: SIMPULAN DAN SARAN	—115
Simpulan	—115
Saran-Saran	—120
DAFTAR PUSTAKA	—123
RIWAYAT HIDUP PENULIS I	—127
RIWAYAT HIDUP PENULIS II	—129

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang tumbuh, terbagun dan berkembang dengan memiliki predikat kesuburan wilayah, baik wilayah daratan (tanah) yang kaya akan beragam tanaman yang dapat dijadikan kebutuhan langsung manusia maupun bukan merupakan kebutuhan langsung, terlebih Imber hayati laut bagi manusia. Wilayah lautnya pun justru menjadi pembatas antar satu pulau dengan pulau lainnya yang diketahui posisinya terbentang dari Sabang hingga Marauke. Kepemilikan wilayah laut yang dikatakan memiliki nilai plus dari wilayah daratan oleh karena kandungan biota lautnya yang dapat tampil menjadi tulang punggung atau penopang perekonomian negara secara menyeluruh, termasuk sebagai sasaran setiap orang atau kelompok masyarakat dalam rangka menyalisati tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Artinya, dengan kekayaan kandungan sumber daya laut, justru dikatakan cukup representatif sebagai lahan atau ruang olahan setiap penduduknya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup setiap warga masyarakatnya, khu-

susnya terhadap masyarakat sebagai pendukung masing-masing sektor, dalam hal ini masyarakat nelayan yang berjuang menghidupi keluarganya dengan berangkat pada penerapan pola pencaharian atau strategi yang berbeda namun dengan satu tujuan adalah mencari nafkah hidup.

Indonesia yang hadir di permukaan bumi ini secara garis besar memiliki wilayah yang dapat dilihat dalam dua komponen utama yang sama sekali berbeda. Kedua elemen besar dimaksud adalah satu bagian wilayah daratan dan satu bagian lainnya adalah wilayah lautan. Kedua komponen wilayah disebutkan, masing-masing berada pada rana yang memiliki unsur kelebihan, terutama yang erat keterkaitannya dengan posisinya sebagai ruang yang dapat dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah hidup. Seperti halnya wilayah daratan yang kaya akan hasil bumi berkat kesuburan tanahnya yang berbeda antara satu dengan lainnya pada setiap wilayah persebarannya, sehingga membuat hasil bumi yang dapat dijadikan masyarakat sebagai sumber kebutuhan hidup juga beragam. Kondisi seperti digambarkan inilah yang menjadi pendukung sehingga Indonesia terjuluki sebagai negara agraris. Begitu pula halnya dengan kepemilikan hamparan lautnya yang justru tercatat lebih luas dari wilayah daratan yang mana menunjukkan bilangan angka luas $\frac{2}{3}$ dari wilayah daratan. Lebih heroik lagi dengan tampilan wilayah lautan yang terpotret sebagai pembatas dari setiap jejeran pulau-pulaunya, justru mengantar Indonesia dalam kancah dunia internasional meraih sebuah julukan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Kedua komponen wilayah terungkap pada prinsipnya mengantar Indonesia sebagai sebuah negara besar dan kaya akan keberagaman. Hanya saja muncul pertanyaan besar, apa kekayaan alam Indonesia yang menjadi kebanggaan selama ini adalah ternikmati semua lapisan masyarakat, tentu jawabannya tidak, dengan berbagai

alasan yang mendasari sehingga tidak semua orang merasakan kekayaan alam laut yang terdistribusi tidak bertuan. Sebab sesuai fakta di sana sini masih ditemukan masyarakat yang hidup tidak berada pada rana kelayakan. Bahkan orang-orang yang hidup sebagai pemanfaat dan pengguna lingkungan alam laut, yaitu yang berprofesi sebagai nelayan, khususnya yang berada pada status pekerja atau nelayan kebanyakan (*sawi*) selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Sebab yang dapat jadi penikmat sesuai fakta adalah orang-orang yang berada pada status penguasaan atau pengendali jalannya suatu usaha (*juragang*), seperti halnya usaha penangkapan hasil laut berkat kepemilikan *power* atau kekuatan mengendalikan pencaharian sekaligus penangkapan.

Penampakan luas hamparan laut Indonesia tidak semata terdeteksi sebagai sebuah pajangan yang patut menjadi kebanggaan, termasuk ketika kita menyimak kehadiran wilayah laut yang hanya tampak seperti sebuah ruang yang hampa. Tetapi yang mesti mengisi perairan sebuah kebanggaan dengan kehadiran wilayah laut dengan pencapaian luas lebih kurang 5,8 juta km², dengan rincian panjang garis pantai adalah lebih kurang 81.000 km. Tetapi justru yang menjadi terpenting dalam rangka membanggakan atas kepemilikan wilayah laut Indonesia adalah dalam posisinya sebagai sebuah ruang perekonomian yang menyimpan cukup banyak sumber daya yang dapat dijadikan setiap orang maupun kelompok berkompeten untuk berkompetisi dalam rangka memanfaatkannya sebagai sarana atau ruang pemenuhan kebutuhan hidup.

Hanya saja dalam usaha mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam laut yang dikatakan menyimpan cukup banyak sumber kebutuhan hidup bagi manusia boleh dikatakan tidak semudah dengan mengolah wilayah daratan yang boleh dikatakan berisiko lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lautan. Dikata-

kannya seperti ini oleh karena wilayah laut kenyataannya merupakan sebuah ruang produksi yang penuh dengan sifat kemisteriusan yang luar biasa. Sebab kondisinya sewaktu-waktu justru dapat menjadi penghancur sekaligus pemusnah sendi-sendi kehidupan terhadap manusia, baik terhadap manusia yang bukan berposisi sebagai pengguna, terlebih lagi terhadap orang-orang yang memang hidupnya hanya semata tergantung pada dunia laut atau terkhusus pada masyarakat yang dijuluki sebagai nelayan yang memang tempat tinggalnya di daerah pesisir yang selalu dalam kondisi terancam bencana, seperti halnya abrasi, angin kencang, dan tingginya gelombang air laut yang selalu menghantam wilayah pemukiman mereka.

Potensi pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan seperti dituangkan (Mulyadi, 2007: 2) dapat dilihat dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pertama adalah berkaitan dengan sumber daya dapat pulih atau dikenal dengan istilah *renewable resources*. Adapun wujud dari pengelompokan sumber daya alam yang dapat pulih, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Keseluruhan komponen disebutkan mengambil peran penting dalam melihat kehidupan laut, misalnya hutan mangrove berfungsi sebagai unsur pendukung penting terhadap kehidupan di wilayah pesisir dan lautan, termasuk dalam fungsi ekologis dan ekonomi, seperti dicontohkan mangrove sebagai penahan abrasi dan mangrove juga berfungsi sebagai sumber penyedia kayu dan obat-obatan dari daunnya, begitu seterusnya.

Berkaitan dengan kelompok kedua adalah sumber daya yang tidak dapat pulih, seperti menyangkut mineral dan geologi yang terungkap lewat penyediaan bahan tambang yang terdiri dari berbagai kelas atau golongan, seperti minyak, gas (migas) dan batu bara. Sedangkan kelompok ketiga adalah berkaitan de-

ngan persoalan yang melihat fungsinya sebagai sektor jasa, seperti fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata khususnya wisata bahari, termasuk menjadi media transportasi dan komunikasi, juga menjadi lahan atau ajang penelitian oleh karena sifatnya mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya karena keunikannya yang dikatakan bervariasi. Jadi dengan kepemilikan luas wilayah laut Indonesia yang terbagi dalam beberapa fungsi membuat masyarakat yang berkecimpung pada dunia kelautan juga mengalami perbedaan spesifik terhadap setiap orang yang melihat perbedaan dimaksud, termasuk yang erat keterkaitan dengan pola hidup tentu satu sama lainnya berbeda. Bahkan dengan adanya perbedaan pola hidup pada masyarakat nelayan dengan sendirinya terjadi pembentukan struktur baru dalam kehidupan yang boleh dikatakan menjadi status atau strata, yaitu sebagai penguasa/pemodal tentu menyandang status sosial yang lebih tinggi dibanding dengan para nelayan yang berstatus pekerja. Pembentukan status baru dimaksud sangat ditentukan dengan tingkat penghasilan setiap pelaku.

Lingkungan laut yang terhampar begitu luas tentu dapat dilihat dalam berbagai fungsi yang melatari masing-masing bagian berdasarkan penggunaan atau pemanfaatannya. Seperti dalam sebuah tulisan (Soerjani dkk, 1987: 21-22) yang membagi lingkungan laut berdasarkan zona-zona atau wilayah menurut penggunaan dan pemanfaatannya. Wilayah laut yang terplot sebagai area "perairan teritorial" luasnya mencapai angka lebih kurang 0,3 juta. Zona yang dimaksud dengan perairan teritorial ini terakomodir sekaligus terpantau sebagai tempat atau lokasi tumbuh dan berkembangnya beragam tumbuhan laut, terutama terumbu karang dan hutan-hutan bakau. Kedua wahana dimaksud disinyalir sangat berperan oleh karena terpatok sebagai tempat berkembangbiaknya berbagai jenis biota laut, sekaligus tempat

berlindungnya, khususnya ikan-ikan yang selama ini dijadikan sasaran tangkap utama atau area pencarian bagi kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Selain pengklasifikasian sebagaimana terungkap sebelumnya, wilayah laut Indonesia juga terklasifikasi atau tersetting sebagai wilayah perairan atau lazim disebut dengan istilah “laut nusantara”, yang memiliki luas lebih kurang 2,8 juta km². Sedangkan pembagian wilayah laut lainnya ada yang dikatakan dengan istilah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya diprediksi dengan angka lebih kurang 2,7 juta km².

Selain penggambaran terkait dengan pembagian berdasarkan zona penggunaan dan pemanfaatan lingkungan alam laut, pada sisi lain lingkungan alam laut dapat terungkap dengan melihat sisi-sisi negatif yang dapat dikeluarkan sewaktu-sewaktu. Pengungkapan lingkungan laut yang dikatakan berasumsi negatif oleh karena laut dikatakan memiliki sifat yang penuh kemisterian, khususnya mengenai perubahan yang terpatriti lewat bentuk hantaman badai dan gelombang air laut yang datang secara tiba-tiba, artinya tidak dapat diperkirakan sebelumnya gelombang air laut akan datang. Lingkungan alam laut juga dikatakan termasuk area atau ruang produksi yang sukar dimasuki orang untuk melakukan aktivitas survei oleh karena sewaktu-waktu kondisinya dapat berubah, di samping sumber daya biota laut yang dikandungnya merupakan milik dan kekayaan bersama, artinya laut dan segala isinya tidak terklaim sebagai sebuah ruang yang mempunyai pemilik. Itulah sebabnya segala cara yang dilakukan orang untuk mengolahnya. Dan besar kemungkinan penyebab dari adanya kebebasan sehingga di sana sini terjadi kerusakan yang sangat susah dipulihkan, terutama terumbu karang yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan-ikan yang menjadi sasaran utama bagi masyarakat nelayan, di samping biota laut sejenisnya.

Terjadinya kondisi lingkungan laut seperti digambarkan

sebelumnya tentu dalam meraih atau menangkap sumber daya yang dikandungnya, terutama yang terkait dengan sumber kebutuhan manusia, dalam hal ini ikan dan biota laut sejenisnya dengan sendirinya akan mengundang lahirnya persaingan atau kompetisi sesama kelompok nelayan sebagai pengguna sekaligus pemanfaat dalam rangka memperebutkan sumber daya yang dikandungnya, (Smith dalam Lampe, 1989: 2-3). Bahkan Gordon (1954) mengatakan, bahwa salah satu karakteristik laut dengan segala potensi yang dikandungnya merupakan sebuah ruang perekonomian yang sejak dahulu hingga kini adalah menjadi kekayaan bersama bagi manusia (*common property*). Namun dibalik itu semua, walau lingkungan laut itu dikatakan siapa saja yang berhak memanfaatkannya oleh karena dikatakan tidak bertuan, tetapi persoalan ini tidak menjadi sesuatu yang dikatakan mudah oleh karena kenyataannya justru menghendaki lain, dalam artian tidak semua orang termasuk yang mengolah dan memanfaatkan lingkungan alam laut berada pada posisi merasakan nikmatnya atau hidup pada posisi menguntungkan atas kehadiran lingkungan alam laut yang kaya akan keberagaman sebagai penutupi kebutuhan manusia. Sebab setiap orang atau kelompok yang mesti menguasai lingkungan alam laut secara maksimal, terutama yang erat keterkaitannya dengan faktor produksi, tentu keberpihakan pada orang-orang yang berada pada posisi memiliki modal kerja, menguasai teknologi, serta memiliki tenaga skill. Artinya, orang-orang yang berada pada posisi seperti dimaksud inilah memiliki unsur-unsur pendukung sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah menjadi penikmat kekayaan kandungan alam laut secara maksimal.

Sedangkan pada sisi lain, orang-orang yang berada pada posisi sebagai nelayan kebanyakan yang justru merasakan dirinya tertindas oleh pihak penguasa atau pemodal hanya hadir

dan tampil sebagai penonton, padahal merekalah yang berada pada posisi tulang punggung menyediakan segala rupa biota laut untuk dikonsumsi manusia. Artinya, orang-orang dimaksud hanya hadir sebagai pemanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat, bukan dalam posisi sebagai penikmat kekayaan atau kesejahteraan. Walau dikatakan kebanyakan masyarakat nelayan hanya hadir sebagai penonton, tetapi yang bersangkutan tetap merasakan nikmatnya hidup sebagai pemanfaat dan pengguna lingkungan alam laut. Sebab baginya yang dijadikan sasaran kenikmatan bukan untuk meraih kekayaan, tetapi yang menjadi pengharapan adalah terkait dengan kepuasan yang tertuang lewat kesetiannya bertahan dalam rangka menekuni bidang pekerjaan para leluhur yang sudah berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang kami temukan sekarang ini, dengan menuai harapan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup sesaat. Padahal sebenarnya mereka yang merasa hidup sebagai pekerja juga mengharapkan banyak adanya perubahan, khususnya menyangkut kesejahteraan hidup bersama anggota keluarganya ke arah yang lebih baik dari jauh hari sebelumnya.

Penggambaran tentang kondisi lingkungan alam laut yang dimiliki Indonesia, apakah itu terpotret lewat kandungan sifatnya yang penuh dengan kemisteriusan ataukah yang terpotret lewat kepemilikan kandungan biota laut yang cukup potensial dijadikan sasaran pemenuhan kebutuhan hidup, adalah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hanya saja, untuk melihat suatu kenyataan, tentu semua akan terjawab jika kita menelusuri setiap fenomena-fenomena yang dihadapi masing-masing masyarakat di wilayah persebarannya. Walau sebenarnya sudah banyak tulisan para ahli yang tegas mengatakan, bahwa nelayan yang terplot sebagai pendukung, khususnya pendukung langsung kebanyakan selalu diidentikkan dengan sebuah dilema kehidupan sosial yang

dihadapi masyarakat, disebut kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri, pada prinsipnya dipahami tidak berangkat dari hanya melihat pada satu titik persoalan saja, tetapi terjadi sebagai suatu yang merujuk pada bentuk kehidupan yang dikatakan hidup berada di bawah standar rata-rata, yang kejadiannya dapat disebabkan oleh banyak faktor.

Salah seorang pakar yang melihat kemiskinan lebih jauh adalah John Haba. Beliau dalam bukunya (Haba, 2001) mengungkapkan, bahwa penyebab terjadinya yang dikatakan kemiskinan, khususnya yang terpotret pada masyarakat Indonesia secara umum adalah terkait dengan unsur alam dan lingkungan fisik, termasuk persoalan yang melihat posisi masyarakat dalam keterbatasan untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, juga termasuk persoalan yang melihat keterbatasan masyarakat dalam menikmati kesehatan yang memadai, di samping terbatasnya kesempatan masyarakat memperoleh pengakuan hak untuk mengekspresikan diri sekaligus berkarya. Aspek lain yang juga turut serta menjadi pemicu terjadinya kemiskinan adalah sulitnya seseorang melepaskan diri dari keberpihakan elit birokrasi sebagai pelaku ekonomi. Dengan kondisi seperti ini, maka yang terjadi adalah kepincangan distribusi, termasuk adanya aksi yang tergolong penindasan hak-hak para kaum marginal untuk memperoleh hidup yang dikatakan layak.

Kekisruan-kekisruan terkait dengan persoalan yang merunut pada masalah kemiskinan seperti terungkap sebelumnya, pada prinsipnya dapat dikatakan melanda hampir seluruh masyarakat yang boleh dikatakan hidup dalam posisi termarginalkan, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang tercaplok sebagai komunitas nelayan, lebih khusus lagi bagi nelayan kebanyakan yang statusnya dalam sebuah sistem adalah sebagai buruh atau yang populer dalam dunia kenelayanan dengan sebutan sawi.

Kondisi seperti apa yang terungkap terkait dengan masyarakat nelayan juga ditemukan pada lingkup kehidupan masyarakat nelayan yang dewasa ini bermukim di sebuah wilayah yang dijadikan sasaran penelitian, yaitu Sumpang Minangae, Kota ParePare, Sulawesi Selatan. Sebab pada intinya, berbicara mengenai masyarakat nelayan, adalah membicarakan sesuatu yang tidak terlepas dari membicarakan sebuah sistem. Ketika dalam sebuah sistem itu ada komponen tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya, maka yang akan dicapai adalah sebuah bentuk kehidupan yang dikatakan keterpurukan, dalam hal ini menuai kegagalan dalam berusaha.

Sebenarnya pengungkapan terkait dengan kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan sudah banyak dilirik oleh para pakar atau ahli, salah satunya yang diungkap (Kusnadi, 2004). Beliau mengungkapkan, bahwa isu-isu kemiskinan nelayan dan berbagai akibatnya mulai mencuat awal tahun 80-an. Pada saat itu pemerintah mencetuskan program motorisasi untuk kebutuhan perahu sebagai sarana transportasi melaut, dan modernisasi peralatan tangkap yang sudah berlangsung satu dasawarsa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perumusan kebijakan yang dilakukan pihak pemerintah dengan tujuan mendorong proses eksploitasi sumberdaya perikanan secara intensif, justru berdampak negatif oleh karena kebijakan itu menuai munculnya suara yang tertuju pada kelangkaan sumber daya perikanan, munculnya aksi konflik antar nelayan, terjadi kesenjangan sosial, tumbuhnya kemiskinan, serta terjadi kerusakan ekosistem pesisir dan lautan.

Khusus terkait lahirnya kemiskinan, secara faktual dapat dikatakan ada benarnya oleh karena terjadinya kemiskinan, termasuk yang ditemukan pada masyarakat nelayan tidak terlepas dari dua faktor utama yang saling terkait sebagai penyebabnya.

Kedua faktor dimaksud disebut faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adalah mencakup keterbatasan sumber daya manusia pada lingkup masyarakat nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha, termasuk teknologi penangkapan, hubungan kerja dalam organisasi penangkapan dianggap kurang menguntungkan nelayan, kesulitan melakukan diversifikasi usaha pencaharian sekaligus penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Sedangkan ketika kita merenset ke faktor eksternal berkaitan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah terpatok pada persoalan menyangkut kebijakan pembangunan perikanan yang mana lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, bukan pada nelayan tradisional, sistem pemasaran yang digunakan lebih menguntungkan pedagang-pedagang perantara, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan laut, terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascatangkap, terbatasnya peluang kerja di sektor nonperikanan di desa-desa nelayan, kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melaut sepanjang tahun, dan isolasi geografis desa nelayan mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia, (Kusnadi, 2004: vi-vii).

Ketika kita menengok sekaligus mencermati saksama lewat berbagai bacaan dan pengamatan terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yang melanda khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebagaimana terungkap sebelumnya, pada prinsipnya menjadi sesuatu yang sukar terhindarkan sekaligus terpecahkan dewasa ini, apalagi ketika yang dijadikan sasaran adalah nelayan yang masih berada dalam tatanan tradisional, yaitu masyarakat nelayan yang masih sebatas

pengguna dan pemanfaat dengan peralatan yang seadanya, artinya tidak mendukung sebagaimana parahnya perubahan tingkat keganasan lingkungan alam laut. Pada hal sebenarnya berbagai model dan cara yang pernah menjadi titik tolak, sekaligus menjadi keinginan pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh, namun sampai sekarang boleh dikatakan harapan itu tinggal harapan. Sebab tidak semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat nelayan yang hidupnya masih mengandalkan peralatan seadanya dalam beraktivitas mencari sekaligus menangkap biota laut (kelompok nelayan) boleh dikatakan belum berada pada posisi sebagai penikmat kesejahteraan yang menjadi tujuan dan harapan pemerintah dimaksud. Sebab memang penerapan strategi pembangunan yang dilangsungkan di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia khususnya, masih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi atau dengan istilah *Growth oriented strategy*, yang mana memusatkan perhatian pada investasi modal luar negeri yang cukup besar di dalam satu atau beberapa faktor, seperti industri dan pertambangan, sedangkan pemerintah sendiri mengarahkan modalnya pada sektor pedesaan, (Everst dalam Sumardi, Mulyanto, 1982: 1).

Sebenarnya di Indonesia terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar pada prinsipnya dijamin oleh Negara. Persoalan semacam ini diperkuat dengan satu kekuatan hukum yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 27 mengatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan dalam perundangan yang sama namun terungkap dalam pasal yang berbeda, yaitu pada pasal 31 ayat 1 justru dikatakan menjamin tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Termasuk yang terungkap dalam penjelasan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengungkapkan, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Selanjutnya dinyatakan, bahwa hasil-hasil material yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan dan sesuai dengan nilai-nilai dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara (Tap MPR No. IV/MPR/1978 dalam Sumardi, Mulyanto, 1982: 5-6).

Keinginan sebagaimana terungkap sebelumnya dikatakan sudah dicanangkan sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu dengan menuangkan sekaligus menetapkan Undang-undang No. 3 yang memuat tentang kesejahteraan sosial, bahkan lebih dipertegas dalam sebuah pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, ayat 2, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Termasuk perlindungan orang miskin dan anak terlantar dipelihara negara yang terungkap dalam pasal 34, ayat 1 Undang-Undang dasar 1945, (Taslim, 2006). Hanya saja, perundang-undangan yang jelas tujuannya itu sebenarnya boleh dikatakan merupakan sebuah slogan belaka. Sebab masalah penanggulangan kemiskinan, khususnya yang ditemukan di Indonesia boleh dikatakan justru tidak pernah henti-hentinya menjadi perbincangan serius, baik pembicaraan dalam rangka penyusunan program kerja pemerintah, maupun keterkaitannya dengan masalah penyaluran bantuan, yang kenyataannya sering dikatakan tidak memenuhi atau tidak kena sasaran. Usaha untuk melihat kehidupan nelayan dalam keterkaitannya apa yang dikatakan kemiskinan, maka penelitian ini memang digiring ke arah yang melihat persoalan yang membuat nelayan secara umum identik dengan kemiskinan. Mencermati berbagai persoalan yang

lahir dengan melihat nelayan sebagai kelompok orang yang tidak memiliki keberdayaan, dalam hal ini hidup dalam keterbatasan atau miskin, maka muncul pertanyaan besar yang dapat dijadikan sasaran dalam melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan, yaitu bagaimana model dan bentuk penerapan strategi masyarakat nelayan dalam rangka melokoni hidupnya sebagai pemanfaat lingkungan alam laut?; bagaimana bentuk dan model keterlibatan pemerintah dan unsur-unsur masyarakat terkait dalam rangka berusaha merubah pola hidup masyarakat nelayan?; bagaimana sistem nilai budaya dalam keterkaitannya dengan penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat nelayan?. Pertanyaan disebutkan sebelumnya menjadi tolak ukur dalam melihat nelayan secara umum dan nelayan Sumpang Minangae secara khusus. []

BAGIAN KEDUA

SUMPANG MINANGAE DAN MASYARAKATNYA

Banyak unsur atau piranti-piranti yang perlu menjadi point pembahasan dalam usaha melihat penggambaran mengenai suatu wilayah penelitian secara utuh, dalam hal ini wilayah Kelurahan Sumpang Minangae yang secara sengaja dipilih dan ditetapkan sebagai lokasi penelitian sebagaimana terungkap dalam tulisan ini. Namun pemilihan lokasi penelitian tetap mengacu pada pelbagai pertimbangan yang mengarah ke arah prihal spesifik yang membedakan dengan tempat-tempat lainnya, khususnya wilayah yang juga masyarakatnya dominan hidup dengan melihat sektor kelautan sebagai yang utama dalam menunjang kehidupannya, dalam hal ini beraktivitas sebagai nelayan. Piranti-piranti sebagaimana dimaksud dapat terungkap lewat pemberi gambaran tentang perihal yang erat keterkaitannya dengan pembahasan khusus mengenai wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, termasuk penggambaran warga masyarakat atau penduduk yang menjadi penghuni wilayah Sumpang Minangae yang

terungkap sebagai salah satu wilayah persebaran dari Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Langkah-langkah dalam melihat semua unsur atau komponen yang dijadikan pembahasan dalam tulisan ini, pada dasarnya akan terungkap dalam pembahasan lewat pembagian dua komponen utama, yaitu satu komponen melihat secara utuh tentang Sumpang Minangae sebagai sebuah wilayah yang dihuni penduduk berdasarkan persebaran kesukubangsaan di Sulawesi Selatan, yaitu berlatar belakang suku bangsa Bugis. Sedangkan satu komponen utama lainnya adalah perihal yang erat keterkaitannya dengan penggambaran warga masyarakat yang menjadi penghuni tetap wilayah Sumpang Minangae itu sendiri.

Penggambaran Wilayah Sumpang Minangae

Dalam membicarakan sebuah wilayah, seperti halnya wilayah Sumpang Minangae yang dikatakan sebelumnya sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian yang terungkap dalam tulisan ini, tentu banyak komponen atau item yang melingkupi dalam rangka membentuk sebuah sistem, mulai menyoroti masalah yang terkait dengan posisi letak wilayah Sumpang Minangae, terkait dengan luas wilayah Sumpang Minangae dan persebarannya berdasarkan satuan pemukiman terkecil dan penggunaan tanah, orbitasi wilayah dari beberapa pusat aktivitas pemerintahan dari wilayah Sumpang Minangae sebagai mitra kerja, kondisi alam yang menyangkut keadaan tanah, cuaca dan musim, potensi sumberdaya alam, hingga pada persoalan menyangkut kondisi perikanan.

Letak Sumpang Minangae

Kelurahan Sumpang Minangae merupakan salah satu wilayah sebaran dari Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Letak kelurahan kalau dicermati posisinya berdasarkan fakta adalah wilayahnya dibelah

dua sebuah jalan provinsi ke arah utara yang menghubungkan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumpang Minangae sebagai sebuah wilayah juga berada pada posisi sebagai pintu gerbang ke arah utara dari Kota Makassar yang menghubungkan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, diantaranya Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, hingga ke wilayah Sulawesi Barat walau terlebih dahulu melewati Kabupaten Pinrang yang berbatasan langsung dengan Polewali Mandar yang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Sulawesi Barat. Penataan wilayah Sumpang Minangae sangat jelas terlihat, yaitu pada posisi sebelah barat jalan dari arah Makassar adalah menjadi area pemukiman yang dominan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan wilayahnya memang berhadapan langsung dengan laut yang pada prinsipnya dijadikan sasaran utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada posisi sebelah kanan jalan dari arah Makassar terplot sebagai area pemukiman yang mana masyarakatnya tidak berada pada posisi sebagai pemanfaat lingkungan alam laut, tetapi masyarakatnya hidup dalam pemilihan keberagaman aktivitas. Wujud wilayahnya adalah darat yang kondisinya sebahagian berbukit. Untuk melihat kondisi wilayah Sumpang Minangae dalam satu sudut pandang, khususnya yang menjadi area persebaran komunitas nelayan, perhatikan gambar berikut.



Foto 1. Kondisi Pemukiman Nelayan

Gambar yang tampak di atas adalah salah satu pemandangan dari salah satu wilayah Sumpang Minangae. Area yang kosong dan tergolong terbuka ini dijadikan sekaligus dimanfaatkan masyarakat nelayan setempat untuk lokasi penjemuran ikan. Selain memberikan penggambaran tentang salah satu potret wilayah, juga pada gambar yang tampak di atas adalah memperlihatkan bentuk aktivitas masyarakat yang erat keterkaitannya dengan kehidupan nelayan, yaitu aktivitas penjemuran ikan.

Berdasarkan pembagian wilayah secara administrasi, Kelurahan Sumpang Minangae berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Posisinya sebagai sebuah wilayah hunian penduduk, Kelurahan Sumpang Minangae berbatasan langsung dengan beberapa daerah lainnya, seperti di sebelah utara dari wilayah Sumpang Minangae adalah berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ujung, posisi di sebelah timur dari wilayah Kelurahan Sumpang Minangae berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bacukiki Timur. Pada posisi sebelah selatan dari wilayah Kelurahan Sumpang Minangae berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barru dan pada posisi sebelah barat dari Kelurahan Sumpang Minangae merupakan wilayah laut, yaitu Selat Makassar. Untuk melihat wilayah laut dimaksud, perhatikan gambar berikut.



Foto 2. Wilayah Laut Sumpang Minangae

Gambar yang tampak di atas adalah salah satu pemandangan area laut yang berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Sumpang Minangae. Dari gambar di atas terungkap pula sebuah pemandangan dimana pada area pesisir pantai ini terlihat sebuah sarana transportasi melaut nelayan yang sedang ditambat pemiliknya setelah digunakan melaut.

Berkaitan dengan orbitasi wilayah yang tergambar adalah dari pusat Kelurahan Sumpang Minangae ke dan dari beberapa tempat atau satuan kerja yang dikatakan menjadi mitra, khususnya terkait dengan menjalankan administrasi pemerintahan adalah masing-masing berjarak tempuh, seperti ke dan dari arah pusat kecamatan, tepatnya Bacukiki terungkap berjarak lebih kurang 0,5 km. Jarak tempuh ke dan dari pusat pemerintahan, yaitu Kota Parepare tercatat lebih kurang 4 Km. Sedangkan jarak tempuh dari pusat Kelurahan Sumpang Minangae ke dan dari arah ibukota provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Makassar adalah lebih kurang 155 km. Secara geografis, Kelurahan Sumpang Minangae pada posisinya berada pada daerah pinggiran dari Kota Parepare, tetapi posisinya justru menjadi gerbang sebelum memasuki pusat Kota Parepare dan sebahagian wilayahnya dapat dikatakan berhadapan langsung dengan laut. Untuk melihat dari dekat kondisi wilayah laut yang berada pada posisi sebelah barat dari wilayah pemukiman penduduk Sumpang Minangae, perhatikan gambar berikut.



Foto 3. Wilayah Laut Sumpang Minangae

Gambar pemandangan yang tampak di atas adalah, selain memperlihatkan wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah pemukiman yang berada di sebelah barat, juga memperlihatkan area pesisir pantai yang digunakan masyarakat nelayan memi-
kirkan perahu yang menjadi sarana transportasi melaut. Sarana transportasi yang tampak pada gambar di atas yang digunakan masyarakat nelayan sebagai pengguna alat tangkap bunre.

Luas, Persebaran dan Tata Guna Lahan

Posisi Kelurahan Sumpang Minangae sebagai wilayah huni-
an, tergambar luasnya lebih kurang 0,31 Km² atau 3,10 Ha. Dari luas wilayah terungkap, Kelurahan Sumpang Minangae hingga kini membentuk satuan pemukiman setingkat Rukun Warga (RW) sebanyak empat buah. Keempat buah Rukun Warga dimaksud adalah RW I dengan nama Cappa Batue, RW II dengan nama Dusungnge, RW III dengan nama Paccekke dan RW IV dengan nama Brimob. Dari masing-masing RW membentuk area persebaran se-
tingkat Rukun Tetangga (RT), yaitu untuk RW I tersebar ke dalam tiga buah RT, RW II tersebar empat buah RT, RW III tersebar tiga Rt dan RW IV tersebar ke dalam tiga RT. Berdasarkan informa-
si masyarakat setempat, pemberian nama terhadap setiap RW sebagaimana yang ditemukan di Kelurahan Sumpang Minangae tidak terlepas daripada kondisi masing-masing wilayah yang me-
latari nama wilayah tersebut. Misalnya RW Cappabatue adalah menggambarkan posisi wilayah yang memang fisiknya berada
pada posisi paling ujung dari perkampungan. RW Dusungnge terindikasi daerah ini menjadi area pemukiman penduduk yang
ketika itu hanyalah tergambar sebagai sebuah dusun. Untuk RW paccekke adalah menggambarkan suatu area yang sebelumnya
tercatat dalam sejarah berkaitan dengan rute perjalanan para pejuang. Sedangkan khusus penamaan RW yang disebut Brimob

oleh karena ditempat inilah bermarkasnya satu kompi satuan Bri-mob.

Selain penggambaran wilayah berdasarkan daerah sebarannya sebagaimana diungkapkan sebelumnya, penggambaran mengenai tataguna tanah juga menjadi sesuatu yang diperlukan dalam tulisan ini oleh karena dengan penggambaran dimaksud, maka terungkap item-item penggunaan lahan berdasarkan fungsinya. Walau sebenarnya dalam sumber data yang ditemukan (Profil Kelurahan Sumpang Minangae, 2011) tidak tergambar rincian angka pasti mengenai masing-masing penggunaannya. Tetapi sedikitnya banyaknya yang dapat digambarkan adalah sarana dan prasarana peruntukannya, seperti yang tampak adalah lokasi yang digunakan sebagai area perumahan sekaligus pekarangan masyarakat, area perkantoran pemerintah terkait, area pembangunan sarana sosial seperti diantaranya lokasi pekuburan serta beberapa peruntukkan lainnya seperti sarana olah raga dan lain sebagainya.

Kondisi Lingkungan Alam, Fasilitas Lingkungan dan Musim

Mencermati kondisi wilayah Sumpang Minangae pada prinsipnya secara garis besar dibedakan atas dua karakteristik, yaitu satu bagian area merupakan wilayah yang dikatakan lautan dan pesisir dan satu bagian lainnya adalah wilayah daratan yang ada juga tergolong kategori tanah berbukit. Dengan kondisi fisik alamnya seperti tergambar sebelumnya, diketahui posisinya berada pada garis lintang yang letaknya antara $3^{\circ}57'39''$ - $4^{\circ}04'49''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}36'24''$ - $119^{\circ}43'40''$ Bujur Timur, posisinya dikatakan diapit daerah-daerah tingkat II, seperti di sebelah utara Kabupaten Pinrang, di sebelah timur Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebelah selatan Kabupaten Barru dan di sebelah ba-

rat adalah hamparan lautan, yaitu Selat Makassar.

Berkaitan dengan peredaran musim yang dikatakan datang-nya silih berganti sepanjang tahun, khusus di Kelurahan Sumpang Minangae dan Parepare secara keseluruhan tergambart, bahwa pada bulan april hingga mei dan bulan oktober hingga november lazimnya masyarakat setempat menyongsong yang dikatakan masa peralihan musim atau perubahan arah tiupan angin, yaitu dari arah barat ke timur. Sebaliknya memasuki bulan oktober hingga november dalam setiap tahun berjalan angin mulai berti-up cukup kencang yang mana pertanda akan tiba atau datangnya musim penghujan atau lazim diistilahkan di lingkungan masyarakat petani awal musim barat dan pada bulan april tiupan kecepatan angin mulai berkurang dan masa ini pertanda masyarakat akan memasuki suatu masa yang dikatakannya masa angin timur.

Terbentuknya kondisi perubahan cuaca seperti digambarkan sebelumnya, maka terungkap temperatur udara di wilayah Sumpang Minangae khususnya dan Parepare secara keseluruhan, adalah tercatat keadaan temperatur udara mencapai angka minimal adalah rata-rata 26°C dan temperatur udara maksimal jatuh pada angka 33°C , dengan kelembaban udara minimal mencapai angka rata-rata 80% dan maksimal 98%. Terjadinya kondisi seperti ini menuntut terjadinya kondisi curah hujan di wilayah Sumpang Minangae adalah mencapai angka 667 mm dengan frekuensi hujan sebanyak 79 hari. Sebenarnya apa yang digambarkan terkait dengan peredaran musim ini dapat dikatakan berlakunya hampir sama semua di wilayah persebaran yang ada dalam wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan kalau kita berbicara dalam skop lebih sempit. Namun hal semacam ini adalah sesuatu kejadian yang tidak lagi dapat diukur ketepatannya sebab apa yang dijadikan standar baku tahun-tahun sebelumnya tidak lagi menjadi sebuah ukuran, sebab semua bentuk perhitungan boleh

dikatakan tidak lagi berlaku semestinya oleh karena pengaruh terjadi pergeseran yang kejadiannya tidak dapat diprediksi lagi, khususnya terkait dengan kapan turunnya hujan termasuk kapan tibanya musim kemarau yang boleh dikatakan menjadi ukuran masyarakat dalam beraktivitas, khususnya terkait dengan pekerjaan pada sektor pertanian (petani dan nelayan).

Berkaitan dengan fasilitas lingkungan, khususnya bangunan rumah tinggal penduduk, pada prinsipnya juga menjadi salah satu tolak ukur dalam rangka melihat dan menentukan struktur kondisi kehidupan masyarakat bersangkutan, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Sumpang Minangae, terkhusus kelompok masyarakat yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, yaitu kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Artinya, kondisi bangunan rumah masyarakat yang menghuni Kelurahan Sumpang Minangae adalah menjadi salah satu titik tolak dalam rangka melihat layak tidaknya kehidupan masing-masing orang. Sebab memang pada prinsipnya kondisi bangunan rumah sebuah masyarakat juga menjadi salah satu alternatif dalam rangka mengukur tingkat perekonomian sebuah masyarakat, walaupun sebenarnya bukan kondisi ini dapat dijadikan patokan dalam menentukan sejahtera tidaknya seseorang. Untuk melihat kondisi bangunan rumah penduduk yang dewasa ini bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae, khusus yang ditemukan di pemukiman nelayan berdasarkan sumber data (Profil Kelurahan Sumpang Minangae, 2011), tergambar bahwa aset bangunan rumah tinggal yang dijadikan dasar mengukur kondisinya terungkap dalam tiga pengklasifikasian, yaitu satu sisi terkait dengan bahan baku yang digunakan membangu dinding rumah, bahan baku yang menjadi bahan pembuatan lantai sebuah rumah dan klasifikasi ketiga adalah terkait dengan bahan baku penggunaan atap sebuah rumah tinggal. Jadi ketiga komponen bangunan rumah tinggal

masyarakat yang bermukim di wilayah Sumpang Minangae disebutkan menjadi ukuran dalam rangka melihat dan mengklasifikasi kualitas rumah tinggal penduduk.

Bangunan rumah tinggal yang ditemukan di Sumpang Minangae, khususnya yang dindingnya terbangun dari bahan batu atau disebut juga dengan istilah tembok jumlahnya mencapai angka 429 buah, yang berdinding terbuat dari bahan kayu atau papan adalah berjumlah 676 buah dan khusus yang masih berdinding dari bahan bambu jumlahnya 12 buah. Ketika kondisi dinding bangunan rumah penduduk seperti digambarkan dijadikan ukuran dalam melihat kondisi kehidupan pada masyarakat yang bermukim di Sumpang Minangae, maka jawabannya boleh dikatakan secara keseluruhan bangunan rumah yang ada dapat dikatakan tergolong cukup memadai. Tetapi ketika kita merujuk pada kondisi bangunan rumah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, maka boleh dikatakan sebahagian besar tidak memadai, bahkan dari data yang diperoleh bangunan rumah yang berdinding kayu dan bambu, termasuk klasifikasi atap dan lantai yang tidak dirancang secara permanen umumnya ditemukan pada bangunan rumah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan walaupun ada bangunan rumah nelayan yang tergolong baik, dalam hal ini memadai, maka umumnya adalah kelompok orang yang berposisi sebagai pemilik usaha (*pongga*) bukan berstatus pekerja (*sawi*).

Lain lagi ketika ukuran menentukan kondisi bangunan rumah dilihat berdasarkan penggunaan lantai, maka tergambar bahwa bangunan rumah di Sumpang Minangae yang berlantai tembok atau batu (keramik) mencapai angka 387 buah, yang berlantai semen berjumlah 42 buah dan yang berlantai kayu adalah mencapai angka tertinggi. Hal ini jika dilihat dari kondisinya, maka bangunan rumah yang ditemukan juga boleh dikatakan juga me-

madai. Sedangkan dengan melihat kondisi bangunan rumah berdasarkan penggunaan atap, maka tergambar, bahwa bangunan rumah penduduk yang menggunakan atap genteng sebanyak 48 buah, menggunakan atap seng 1053 buah, menggunakan beton 14 buah dan menggunakan atap kayu (*sirap*) sebanyak 2 buah. Dengan mengacu pada penggambaran tentang penggunaan bahan atap bangunan rumah yang digambarkan sebelumnya, maka bangunan rumah penduduk secara keseluruhan dikatakan sudah tergolong layak.

Sebenarnya memang ketika kita mengacu pada angka-angka penggunaan perangkat bangunan rumah penduduk yang terungkap dalam sumber data seperti digambarkan sebelumnya adalah sesuatu yang tergolong memadai. Sebab apa yang digambarkan tersebut adalah berlaku secara keseluruhan dalam melihat bangunan yang ada di Kelurahan Sumpang Minangae, yang mana banyak tergolong baik oleh karena bangunan rumah pada dua RW rata-rata bangunan rumahnya sudah permanen. Sedangkan bangunan rumah yang berada pada dua RW lainnya yang sebenarnya justru menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah bangunan rumah penduduk yang terklasifikasi sebagai pekerja yang disebut nelayan.

Ketika kita bertolak pada usaha melihat bangunan rumah tinggal masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pada dasarnya hampir sebagian besar memang dibangun dari model bangunan rumah panggung, tetapi kondisinya sebenarnya boleh dikatakan tidak menjadi sesuatu yang layak. Sebab ada bangunan rumah yang dibangun dari menggunakan bahan bambu untuk tiang, dinding, dan lantai, dengan menggunakan atap daun rumbia. Usaha untuk melihat kondisi bangunan rumah penduduk atau warga masyarakat Sumpang Minangae, khusus bangunan rumah masyarakat yang berkecimping sebagai nelayan, dapat

terungkap seperti berikut.



Foto 4. Bangunan Rumah Nelayan

Gambar yang tampak di atas adalah cerminan salah satu potret yang memperlihatkan kondisi bangunan rumah penduduk yang ditemukan di area pemukiman nelayan, termasuk penataan posisi berdirinya bangunan rumah yang terlihat tidak teratur, bahkan ketika kita mencermati gambar di atas boleh dikatakan ada kesan di wilayah Sumpang Minangae khusus pada area yang dijadikan tempat bermukimnya umumnya komunitas nelayan terlihat kumuh dan penataan letak rumah dikatakan tidak beraturan, termasuk tidak ada lahan yang dijadikan tempat bermain kecuali pada jalan setapak yang terbangun dalam pemukiman tersebut.

Berkaitan dengan musim, peredarannya pada prinsipnya tidak berbeda seperti apa yang ditemukan di beberapa daerah lainnya khususnya di Sulawesi Selatan, yang intinya hanya mengenal dua musim yang datang silih berganti dengan rotasi sepanjang tahun enam-enam bulan setiap satu musim. Kedua musim dimaksud adalah musim penghujan dan musim kemarau. Kedua musim ini sebenarnya perlu diungkapkan oleh karena pada prinsipnya sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian yang ditekuni masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal-

nya di Sumpang Minangae, musim hujan yang disebutnya wettu pabbosiang dan musim kemarau disebutnya wettu timo. Kondisi alam ketika datangnya kedua musim yang terungkap dengan silih berganti, yaitu ketika musim hujan, berarti kondisi alam boleh dikatakan curah hujan yang turun cukup tinggi, sebaliknya ketika musim kemarau tiba, curah hujan yang turun sedikit atau terkadang hampir tidak ada sama sekali.

Sebelumnya datangnya kedua musim ini dapat diprediksi dalam setiap tahunnya, hanya saja beberapa tahun belakangan kondisi seperti ini sukar lagi diprediksi oleh karena terjadi pergeseran atau perubahan musim yang tidak lagi menentu. Misalnya sebagaimana yang diprediksi, khusus di wilayah Parepare yang justru menjadi satu kesatuan dengan wilayah Sumpang Minangae, berdasarkan perhitungan waktu atau bulan yang dinyatakan masuknya musim kemarau adalah rata-rata jatuh pada bulan Mei sampai dengan september setiap tahun berjalan. Sedangkan datangnya musim hujan diprediksi berlangsung dari bulan oktober sampai dengan bulan Mei setiap tahun berjalan. Tetapi dewasa ini apa yang diprediksi tentang datangnya kedua musim biasanya meleset, seperti musim hujan bisa berlangsung cukup lama dan begitu pula sebaliknya terkadang musim kemarau berkepanjangan. Jadi pada intinya persoalan berganti atau beralihnya antar dua musim yang berlaku umum di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan yang tidak lagi dapat dijadikan seseorang yang membutuhkan berpola yang sebelumnya dapat diprediksi 6 bulan setiap musim dalam setahun, tetapi kedua musim ini bisa musim kemarau lebih panjang dan bisa pula musim hujan yang lebih panjang.

Datangnya kedua musim ini sebenarnya tidak membawa keuntungan secara keseluruhan bagi masyarakat yang berorientasi hidup sebagai pemanfaat dan pengguna lingkungan alam laut

(nelayan). Artinya, kedua musim ini ada yang dianggapnya cocok atau tepat dengan profesi mereka sebagai pengguna lingkungan alam laut (nelayan). Tetapi sebagai masyarakat yang hidup dan bergantung pada sektor pertanian, bekerja sebagai petani, kedua musim ini boleh dikatakan menjadi bagiannya. Dikatakan seperti ini oleh karena ketika musim hujan tiba, maka sebagai petani bergas melakukan persiapan untuk mengolah lahan persawahannya dengan menanam padi, dan ketika musim kemarau tiba mereka mengolah lahan perkebunannya dengan menanam palawija atau beragam jenis tanaman jangka pendek lainnya.

Khusus bagi masyarakat yang berkecimpung sebagai pemanfaat dan pengguna lingkungan alam laut, kedua musim ini tetap dijalani sebagai waktu untuk menjalankan usahanya. Sebab bagi masyarakat nelayan kondisi alam bagi mereka menjadi sebuah tantangan yang sangat besar karena sangat sulit diprediksi. Sebab terkadang kondisi cuaca bagus, namun hasil yang menjadi harapan kurang memuaskan. Sebaliknya terkadang cuaca kurang bagus, seperti halnya musim hujan justru menjadi jempolan dengan hasil yang baik. Kondisi alam seperti inilah terutama yang dikatakan tidak menentu atau tidak tepat untuk melaut yang memaksa kebanyakan nelayan yang bertempat tinggal di Sumpang Minangae mengalihkan perhatiannya dengan mencari nafkah hidup menjadi pekerja pada sektor lainnya, seperti turut serta menjadi buruh bangunan, tukang becak dan lain sebagainya, walau yang mereka lakukan hanyalah merupakan kerja sampingan dalam rangka mengisi kekosongan saat tidak memungkinkan untuk melaut.

Melaut baginya memang sudah merupakan satu jenis usaha atau sarana mencari nafkah hidup yang dianggapnya sudah menjadi kodrat dalam hidupnya, bahkan besar kemungkinannya pekerjaan sebagai nelayan sangat sulit ditinggalkan dengan su-

atu bukti mereka yang hidup sebagai nelayan sekarang ini rata-rata sudah merupakan generasi yang tidak lagi dapat diprediksi sebagai turunan ke berapa dari generasi sebelumnya. Jadi pada prinsipnya, masyarakat nelayan setempat yang mengatakan walaupun kebanyakan nelayan tidak dapat mengubah hidupnya ke arah model kehidupan yang lebih layak, tetapi pekerjaan ini tetap ditekuni bahkan dikatakan sulit lagi ditinggalkan oleh karena mereka sudah berada pada tatanan melihat beraktivitas sebagai nelayan itu adalah suatu tradisi yang perlu mendapat tempat terhormat dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab umumnya mereka sudah merasa diri sulit mencari usaha lain yang dianggapnya performa baru dalam hidupnya.

Potensi Sumber Daya Alam

Pada bahasan gambaran wilayah terungkap sebelumnya yang dikatakan bahwa kondisi geografis Sumpang Minangae yang terdiri dari daerah pantai dan daratan sampai yang berbukit, pada prinsipnya merupakan sebuah wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Hanya saja, khusus daerah daratan dan perbukitan umumnya terlihat hanya dijadikan sebagai areal pemukiman penduduk, termasuk perkantoran dan sarana sosial lainnya. Namun yang menjadi perhatian serius terkait dengan persoalan potensi sumber daya alam adalah terfokus pada wilayah lautnya.

Dicantumkannya wilayah laut sebagai wilayah alam berpotensi oleh karena sumber daya yang dikandungnya dikatakan tidak mungkin habis, bahkan wilayah laut juga tidak hanya dapat dilihat dalam fungsinya sebagai ruang produksi bagi masyarakat pendukungnya, dalam hal ini nelayan. Tetapi wilayah lautpun dapat dijadikan sebagai arus lalu lintas perairan. Seperti halnya fakta yang ditemukan di Kelurahan Sumpang Minangae yang mana masyarakat mendominasi aktivitas sebagai nelayan dengan karak-

teristik aktivitas yang berbeda, seperti sebagai penangkap ikan, sebagai petambak dan sebagainya yang kesemuanya tergolong usaha yang bersentuhan langsung dengan laut. Sedangkan usaha yang dikatakan tidak bersentuhan langsung dengan laut seperti berprofesi sebagai penjual dan pembeli ikan atau hasil tangkapan nelayan lainnya, ada sebagai pengering hasil laut dan lain sebagainya.

Pola pemukiman

Pola pemukiman yang ditemukan pada wilayah Kelurahan Sumpang Minangae terungkap atas empat RW. Keempat RW pada prinsip tergambar berdasarkan kondisinya masing-masing. Seperti halnya RW III dan RW IV atau yang disebut dengan nama RW Paccekke dan RW Brimob merupakan area pemukiman yang terbangun dengan bercirikan pemukiman modern dengan menampilkan identitas khususnya bangunan rumah yang terbuat dari bahan baku batu atau semen dalam model pertokoan, termasuk ditemukannya bangunan kantor-kantor pemerintah, bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan dan masjid, bahkan tampak di belakang dari kedua wilayah pemukiman dimaksud ditemukan area yang bergunung.

Sedangkan pola pemukiman yang ditemukan di RW I dan RW II yang juga dikenal dengan nama masing-masing RW Cappabatu dan Dusungnge adalah menjadi tempat hunian mayoritas warga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan kondisi pemukiman terlihat padat dengan bangunan rumah penduduk, termasuk sarana atau tempat pelelangan ikan (TPI), pasar tradisional, Koperasi Unit Desa (KUD). Bahkan terlihat bangunan rumah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tumbuh pada area pesisir dari bantaran muara sungai yang disebut Sungai Karajang untuk memudahkan nelayan menambat perahu yang di-

gunakan melaut, bahkan pada bantaran sungai dimaksud juga difungsikan sebagai dermaga yang digunakan sebagai tempat berlabuh, sekaligus menaikkan hasil tangkapan nelayan saat pulang dari melaut. Usaha penulis memperlihatkan kondisi pemukiman di wilayah Sumpang Minangae, khususnya yang dijadikan lokasi pemukiman masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, perhatikan gambar berikut.



Foto 5. Kondisi Pemukiman Nelayan

Gambar yang tampak di atas adalah potret dari salah satu arah yang memperlihatkan keadaan atau penataan berdirinya bangunan rumah penduduk, khususnya yang berkecimpung sebagai nelayan. Bahkan yang terlihat ada genangan air merupakan jalan yang sekaligus berfungsi sebagai pembatas antar wilayah perairan dengan wilayah pemukiman penduduk. Bahkan pesisir jalan, termasuk pinggiran pantai yang dewasa ini merupakan beton menjadi tempat atau lokasi, selain untuk menambak perahu juga untuk sarana menjemur ikan.

Penggambaran Penduduk Sumpang Minangae

Sama ketika kita menggambarkan mengenai wilayah, dalam menggambarkan mengenai penduduk suatu wilayah, da-

lam hal ini penduduk Sumpang Minangae, yang menjadi sasaran pengungkapan tidak terlepas dari beberapa item, seperti terkait dengan besaran jumlah penduduk, terkait dengan pengklasifikasiannya, termasuk yang terkait dengan latar belakang sosial budaya yang melatari kehadirannya sebagai pendukung satu komunitas atau kelompok sosial yang mayoritas, seperti yang terungkap dalam sumber data, yaitu didominasi dengan penduduk yang berlatar belakang sosial Bugis. Kondisinya seperti memaksa di lingkungan masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sumpang Minangae menjadi bahasa Nbugis sebagai bahasa pengantar atau disebut juga bahasa sehari-hari, di samping Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan bangsa Indonesia.

Besaran Jumlah Penduduk

Mengacu pada sumber data (Profil Kelurahan Sumpang Minangae, 2011), tergambar jumlah penduduk Kelurahan Sumpang Minangae adalah sebanyak 5.225 jiwa. Dari jumlah ini terinci penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan besaran jumlahnya adalah 2.440 jiwa dan berjenis kelamin perempuan besarannya adalah 2.785 jiwa. Dengan melihat angka perbandingan ini dengan sendirinya melahirkan suatu penggambaran tentang penduduk yang menghuni wilayah Sumpang Minangae. Penggambaran dimaksud adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan jumlahnya lebih besar dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dengan selisih adalah 345 jiwa atau sekitar 6,60%.

Besaran jumlah penduduk sebagaimana terungkap sebelumnya, juga tergambar besaran jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah sebanyak 1.617 orang dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki 1.488 orang dan berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 129 orang. Kondisi seperti menggambarkan bahwa ti-

dak selamanya kaum laki-laki dalam sebuah rumah tangga yang berposisi sebagai kepala keluarga, kaum perempuan pun juga bisa bertindak sebagai kepala keluarga, dengan dilatari berbagai sebab seperti perempuan bersangkutan ditinggal sang suami, di samping yang bersangkutan belum pernah menikah dan usianya sudah terbilang tua, maka perempuan yang dimaksud pantas berada pada posisi sebagai penanggungjawab dalam sebuah rumah tangga. Bahkan informasi dari masyarakat setempat perempuan yang berstatus atau diangkat sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga oleh karena yang bersangkutan memang menjadi tulang punggung dalam rangka mencari nafkah hidup terhadap anggota keluarga. Sebenarnya terjadinya kondisi seperti ini besar pengaruhnya ke arah persoalan keterpaksaan, apalagi dalam prinsip hidup komunitas Bugis laki-laki sebagai pemimpin, sekaligus yang bertindak sebagai pencari nafkah.

Pengklasifikasian Penduduk

Selain pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin yang digambarkan sebelumnya, persoalan pengklasifikasian penduduk juga dapat dilihat dalam banyak hal. Misalnya terungkap dalam rangka melihat penduduk berdasarkan sebaran per persatuan pemukiman setingkat RW menyangkut tingkat pendidikan penduduk, yaitu:

Di RW I atau Cappabatie penduduk yang tamat Sekolah Dasar (SD) 152 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 197 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 238 orang dan mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 130 orang. Di RW II atau Dusungnge penduduk yang tamat SD 211 orang, SLTP 480 orang, SLTA 341 orang dan PT 110 orang. Di RW III atau Paccekke penduduk yang tamat SD 145 orang, SLTP 182 orang, SLTA 274 orang dan PT 98 orang. Sedangkan di RW IV atau

Brimob penduduk yang tamat SD 65 orang, SLTA 65 orang, SLTP 119 orang dan PT 49 orang.

Melihat angka yang terkait dengan masalah pendidikan yang digeluti masyarakat sebagaimana digambarkan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa masalah pendidikan secara keseluruhan dapat dikatakan sudah mendapat perhatian masing-masing keluarga atau rumah tangga. Bahkan dapat dikatakan masalah pendidikan formal dalam lingkup kehidupan masyarakat di Kelurahan Sumpang Minangae sudah menjadi salah satu tuntutan kebutuhan yang dikatakan bersifat primer atau utama. Walau sebenarnya menurut sebagian masyarakat, khususnya yang berkecimpung sebagai pekerja yang memanfaatkan lingkungan alam laut, dalam hal ini sebagai nelayan, untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan yang mutlak tentu memerlukan perjuangan yang dikatakan cukup berat, mengingat kebutuhan akan makan pun dari usaha melaut dianggapnya cukup berat.

Begitu pula pengkalsifikasian penduduk yang terkait dengan agama anutan. Sesuai sumber perolehan data dikatakan, bahwa warga masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae pada prinsipnya menganut beragam agama, namun ada salah satu agama yang tetap menjadi agama anutan mayoritas masyarakat, yaitu agama Islam dengan besaran jumlah penganutnya adalah 4.954 orang dengan persentase perbandingan yang cukup tinggi dengan penganut agama lainnya, yaitu 95,21%. Sedangkan sisanya adalah penganut agama kristen atau Nasrani sebanyak 228 orang dengan rincian yang beragama Katolik 213 orang dan Protestan sebanyak 15 orang. Sedangkan sebagai penganut agama Hindu/Buddha, adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai penganut agama Hindu 19 orang dan Buddha 2 orang.

Mengacu pada perbandingan angka pada setiap penganut

agama yang terungkap sebelumnya, dapat dikatakan umumnya warga masyarakat yang tidak menjadikan agama Islam sebagai agama anutannya sesuai informasi yang bersangkutan adalah orang-orang yang digolongkan pendatang. Mereka bersangkutan datang dan bertempat tinggal di daerah ini oleh karena di sinilah mereka mencari nafkah hidup, artinya khususnya yang beragama Nasrani penduduk yang bersangkutan terangkat atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ABRI dan Polisi, termasuk sebagai pegawai swasta. Sedangkan warga masyarakat yang berstatus sebagai penganut agama Hindu dan Budha, yang bersangkutan adalah orang-orang Tionghoa (orang Cina) yang umumnya membuka pertokoan.

Sedangkan klasifikasi penduduk terkait dengan mata pencaharian yang digeluti, sesuai sumber data yang sama dikemukakan sebelumnya terungkap jumlah penduduk yang menjadikan usaha di sektor formal, dalam hal ini menjadi PNS sebanyak 420 orang, sebagai ABRI/POLRI 526 orang dan menjadi pegawai di instansi swasta sebanyak 1.461 orang. Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pedagang dalam banyak hal adalah sebanyak 1.277 orang, sebagai buruh 1.204 orang, sebagai tani 315 orang. Sedangkan yang terplot sebagai pekerja pada sektor pemanfaatan dan pengguna lingkungan alam laut atau sebagai nelayan sebanyak 399 orang. Khusus yang menjadikan pekerjaan sebagai nelayan dalam melakoni hidupnya sebagai nelayan tangkap didukung dengan berbagai macam atau jenis alat tangkap, yaitu bagang tancap, jala, jaring (pukat biasa), pancing dan bunre yang dikatakannya merupakan alat tangkap tergolong baru pada masyarakat nelayan di Sumpang Minangae.

Perahu yang merupakan salah satu sarana transportasi laut yang dikatakannya menjadi kebutuhan vital setiap kali nelayan melakukan aktivitasnya, baik ketika jenis peralatan atau alat tang-

kap digunakan dilangsungkan secara perorangan, terlebih lagi ketika sistem operasional sebuah alat tangkap mesti dilakukan secara kelompok kerja. Artinya, semua bentuk aktivitas nelayan, justru perahu menjadi sarana transportasi yang dikatakan sangat berperan oleh karena pada satu sisi perahu menjadi sarana angkutan para nelayan dan pada sisi lain perahu menjadi satu bagian dengan alat tangkap yang digunakan. Pada prinsipnya jenis perahu digunakan tidak berada pada ukuran besar tetapi memang dirancang hanya untuk mengangkut maksimal 4 orang pekerja, bahkan yang berukuran lebih kecil pun masioh ditemukan sebagai sarana transportasi nelayan khusus pengguna alat tangkap pancing, dan terkadang yang sepererti dimaksud tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan layar dan dayung.

Latar Belakang Sosial Budaya

Walau sebenarnya seperti terungkap sebelumnya dikatakan, bahwa warga masyarakat yang mendiami atau yang menjadi penduduk tetap wilayah Kelurahan Sumpang Minangae adalah terdiri dari kumpulan orang-orang yang tidak berada pada posisi sesama suku bangsa atau dikatakan berbeda latar belakang etnis, namun dalam rangka mengungkap perihal terkait dengan latar kehidupan sosial budaya, maka yang dijadikan tolak ukur dalam tulisan ini adalah etnis atau suku bangsa Bugis. Dijadikannya suku bangsa Bugis sebagai sasaran pengungkapan oleh karena kehadiran pendukung dari suku bangsa dimaksud justru menjadi yang dominan, sehingga kedominannya itu bisa mencerminkan bahwa di wilayah Sumpang Minangae masyarakatnya sangat kental dengan budaya Bugis. Dan terhadap masyarakat lainnya, pada prinsipnya hanya hadir sebagai penduduk pendatang, walau yang bersangkutan sudah menjadi penduduk tetap dalam keterkaitannya dengan penggambaran melalui identitas diri.

Berbicara masalah latar sosial budaya pada suatu kelompok sosial, termasuk terhadap suku bangsa Bugis yang menjadi prioritas dalam melihat masyarakat Sumpang Minangae sebagai objek kajian, pada prinsipnya tidak terlepas dari mengungkap berbagai persoalan menyangkut perihal hidup dan kehidupan pada masyarakat yang dijadikan sasaran pengkajian. Walau sebenarnya yang dijadikan sasaran kajian adalah masyarakat Bugis yang populer dengan Bugis Parepare, tetapi pada prinsipnya masyarakat Bugis Parepare dapat dipastikan tidak berbeda dengan perihal latar belakang sosial budaya dengan kelompok sosial Bugis lainnya yang ada tersebar di masing-masing wilayah persebarannya, seperti diantaranya daerah persebaran etnis Bugis yang menjadi pengapit wilayah Parepare, seperti masing-masing Masyarakat Bugis Pinrang, Bugis Sidenreng Rappang, termasuk Bugis Barru. Bahkan kesemuanya daerah disebutkan justru pernah menjadi satu kesatuan di masa kerajaan yang disebutnya daerah Ajatappareng.

Konsep-konsep hidup dalam pikiran mereka umumnya masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang menjadi peninggalan para leluhurnya. Terkondisinya alam pikiran sebagaimana terungkap oleh karena setiap orang sejak masih berada pada masa kanak-kanak memang alam pikirannya telah diisi dengan beragam aturan yang berwujud penerapan tata cara dan kebiasaan, termasuk nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat. Konsep berpikirnya pun boleh dikatakan masih berada dalam kondisi dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan masa lalu, yang lazim dengan istilah masih kental dengan wujud ketradisionalannya, walau sebenarnya banyak kiaty-kiat yang dipertahankan padahal tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam posisinya sebagai penganut agama Islam. Untuk melihat ke arah beberapa komponen kehidupan dalam masyarakat yang erat kerkaitannya dengan persoalan kehidupan sosial budaya,

maka perlu mengungkap berbagai kriteria yang terungkap dalam kehidupan.

Stratifikasi/Strata Sosial

Pengenalan yang dinamakan stratifikasi atas status sosial dalam sebuah masyarakat, pada prinsip muncuat ketika bangsa Indonesia secara keseluruhan penerapan sistem pemerintahannya adalah bersifat kerajaan. Pada saat inilah setiap masyarakat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan status masing-masing yang mana ditetapkan atau dijatuhkan kepada setiap orang berdasarkan posisi yang dimiliki dalam masyarakat. Sebab penetapan posisi atau status sosial seseorang memang sangat ditentukan beberapa hal yang melatari kehidupan dalam masyarakat ketika itu. Misalnya yang bersangkutan adalah seorang yang dipercaya sebagai pemimpin, dalam hal ini berposisi sebagai raja, maka orang-orang yang menjadi turunan dari sang raja dimaksud yang dijunjung sebagai orang berdarah bangsawan atau dikatakan berstatus sosial teratas.

Lain lagi cara memilih atau menetapkan golongan orang-orang yang ketika itu dikatakan masyarakat biasa atau kebanyakan. Dalam rangka menetapkan golongan orang yang lazim disebut masyarakat kebanyakan ketika itu, adalah tercetus lewat menentukan posisi dalam masyarakat, yakni dalam posisinya sebagai pasukan, sekaligus anggota masyarakat yang boleh dikatakan tidak terikat pada orang-orang yang berposisi sebagai penguasa, dalam hal ini raja, artinya orang bersangkutan berada dalam posisi bebas menentukan arahnya. Sedangkan orang-orang yang ketika itu hidupnya dalam masyarakat berada dalam genggamannya atau taksis sang raja, maka golongan orang inilah yang digiring atau dikategorikan sebagai masyarakat yang berada dalam golongan bawah.

Prinsip pengelompokan atau pengorganisasian sosial dalam sebuah kelompok sosial adalah menganut suatu prinsip yang disebut prinsip hirarki. Lahirnya suatu prinsip yang dikatakan seperti ini dalam kehidupan masyarakat adalah dilandasi adanya orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu yang mana kondisi atau statusnya dikatakan lebih tinggi daripada kedudukan orang lain. Dengan prinsip hirarki adalah mendorong timbulnya sistem stratifikasi sosial yang sekaligus menjadi salah satu dasar fundamental dalam rangka pengelompokan organisasi sosial dalam setiap masyarakat. Seperti dicontohkan di zaman dahulu yang mana masyarakat Bugis yang bertempat tinggal di Parepare secara umum dan di Kelurahan Sumpang Minangae khususnya memang mengenal sistem pelapisan sosial yang lahir dan dibentuk tersusun secara hierarkis.

Adapun susunan status sosial masyarakat ketika itu terdiri atas golongan bangsawan yang populer dengan sebutan kata "Arung". Masyarakat atau kelompok orang yang berada pada posisi ini ketika itu dikatakan berada pada tatanan status sosial tertinggi. Namun tidak semua orang yang berstatus sebagai bangsawan ketika itu dipandang sama derajatnya, tetapi ada golongan bangsawan yang dikatakan bangsawan tinggi atau diistilahkan "arung matase" lalu ada golongan bangsawan yang disebut bangsawan rendah yang dalam masyarakat setempat diistilahkan "tau deceng" dan selanjutnya ditemukan kelompok orang yang populer dengan sebutan orang kebanyakan atau "tau sama", lalu dikenal pula adanya golongan orang yang dikatakan hamba sahaya atau lazim dengan istilah "ata".

Dalam lingkup masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa Bugis, seperti warga masyarakat yang dewasa ini menghuni Kelurahan Sumpang Minangae, sebenarnya mengenal dua kategori bangsawan, yaitu satu kelompok yang digolongkan

bangsawan tinggi dan satu kelompok orang yang digolongkan bangsawan rendah. Ketika itu cara yang dilakukan untuk menetapkan kelompok orang yang digolongkan bangsawan tinggi adalah orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan ketika itu. Sedangkan kelompok orang yang dikatakan bangsawan rendah adalah dapat dilihat dari dua porsi, yaitu porsi pertama adalah yang bersangkutan tidak pernah menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan dan porsi kedua adalah kebangsawanannya tidak utuh, dalam artian ada dari salah satu kedua orang tuanya yang bukan berdarah bangsawan, terutama dari kaum ibu biasanya berasal dari rumpun masyarakat biasa.

Sedangkan kelompok atau golongan orang yang populer dengan posisinya dalam masyarakat berada pada tingkatan kedua, adalah orang-orang yang ketika itu memang dalam masyarakat adalah orang-orang kebanyakan dan dia mempunyai kedudukan yang diistilahkan bersifat bebas, dalam hal ini tidak tergantung pada orang-orang yang berdarah bangsawan, tetapi orang-orang bersangkutan tetap menjadi keluarga kerajaan. Sedangkan orang-orang yang dikatakan berada dalam derajat atau tingkatan ketiga berdasarkan statusnya, adalah kelompok orang yang berada dalam posisi dalam masyarakat sebagai suruhan raja atau juga diistilahkan sebagai budak raja. Orang-orang yang dikategorikan sebagai budak ketika itu meruapkan orang menjadi tawanan perang.

Sebenarnya pengklasifikasian orang dalam setiap masyarakat yang dikenal ketika kita berada pada zaman kerajaan, dewasa ini tidak lagi dikenal sebagaimana sebelumnya. Apalagi kelompok orang yang dijuluki sebagai budak dikatakannya sama sekali tidak lagi ditemukan didalam lingkup masyarakat manapun. Sebab sebenarnya posisi orang dikatakan budak dapat dikatakan selalu harus tunduk pada aturan yang ditetapkan rajanya, bahkan

perintah sang raja terhadapnya terkadang dibarengi dengan unsur kekerasan, minimal pemaksaan. Hilang pemberlakuan status atau strata sosial seseorang dalam masyarakat oleh karena dewasa ini orang-orang tidak mesti selalu menjadi sapi perah dari sang pemimpin. Bahkan untuk mengubah status seseorang bisa berbalik, yaitu dari kelompok orang yang sebelumnya menjadi suruhan, agar dapat menjadi panutan, diteladani bahkan didengar perkataannya ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya yang bersangkutan berpendidikan tinggi sehingga perlu mendapat penghormatan, yang bersangkutan memiliki harta yang banyak (kaya) sehingga yang bersangkutan dapat menjadi sumber penolong, sekaligus sumber pendanaan dalam masyarakat dan tidak kalah pentingnya karena yang bersangkutan berperilaku baik dalam masyarakat sehingga yang bersangkutan dapat dijadikan panutan atau suri teladan.

Ketika kita mengacu pada kondisi kehidupan yang ditemukan pada masyarakat yang berprofesi sebagai pengguna dan pemanfaat lingkungan alam laut, seperti halnya yang ditemukan pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, walau sebenarnya tidak lagi tampak penggolongan dalam masyarakat berdasarkan struktur baku sebagaimana yang diberlakukan beberapa tahun silam, tetapi secara faktual posisi setiap orang dalam masyarakat, khususnya masyarakat nelayan unsur-unsur perbedaan status itu sebenarnya boleh dikatakan masih ada, namun sifat organisasinya tidak lagi mengikat dan fungsional diberlakukan sebagaimana yang ditemukan sebelumnya. Sebab sebenarnya memang dalam lingkungan kehidupan masyarakat nelayan faktanya tumbuh dan berkembang suatu bentuk perbedaan dinatara sesama nelayan, apalagi kalau kita mengacu pada posisi yang mereka lakoni dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan, artinya dalam lingkungan masyara-

kat nelayan terbangun sebuah kondisi walau sebenarnya tidak terstruktur, tetapi tingkatan-tingkatan itu tetap ada.

Sebab memang dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan secara umum terbangun sebuah organisasi kerja dalam bentuk sebuah sistem, dengan perangkatnya terdiri dari *pong-gawa* yang umumnya dibagi atas dua, yaitu *pong-gawa* darat dan *pong-gawa* laut yang lazim diistilahkan dengan sebutan juragan. Sedangkan perangkat lainnya adalah kelompok orang yang tergolong buruh, dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan lazim dengan sebutan *sawi*, dan komponen inilah yang sebenarnya dikatakan nelayan. Ketiga komponen yang disebutkan inilah yang dapat dijadikan ukuran dalam menafsirkan bahwa dalam lingkungan masyarakat nelayan walau pun itu kondisinya tidak tercatat sebagai sesuatu yang paten, tetapi melihat kondisi kesehariannya tampak terjadi jurang pemisah yang cukup signifikan. Terjadinya kondisi seperti diungkapkan oleh karena ketiga komponen utama disebutkan cukup jelas terjadi kesenjangan sosial. Sebab nelayan yang berstatus *sawi* mengkondisikan hidupnya sebagai kelompok orang yang bergantung pada *pong-gawa* darat

Seorang *pong-gawa* darat yang posisinya dikatakan banyak menjadi penentu dalam keberhasilan suatu kegiatan nelayan. Sebab seorang yang berstatus *pong-gawa* darat posisinya berada pada tatanan sebagai pemodal kerja, bahkan seorang *pong-gawa* darat terkadang yang bersangkutan juga menjadi pemilik alat tangkap. Itulah sebabnya tidak salah kalau dikatakan aktivitas penangkapan masyarakat nelayan sangat ditentukan oleh kehadiran seorang *pong-gawa* darat. Dengan kekuasaannya pula membuat seluruh persoalan terkait dengan penghasilan saat melaut dibawa kendali *pong-gawa* darat. Kondisi seperti inilah yang menuntut lahir kondisi kehidupan yang melihat seorang *pong-gawa* darat sebagai komponen tertinggi dalam organisasi nelayan.

Lain lagi seorang yang dikatakan berstatus sebagai ponggawa laut, dalam posisinya sebagai pemimpin bagi nelayan saat melaut, bahkan juga menjadi penentu dalam rangka mencapai keberhasilan dalam usaha pencarian. Dikatakan seperti inilah oleh karena mereka yang dipercayakan sebagai pemimpin di laut tidak dipilih atas kehendak pemilik usaha, tetapi yang bersangkutan memang pada dirinya tertanam pengetahuan yang memang terkait dengan seluk beluk dalam mencari nafkah di laut. Bentuk-bentuk pengetahuan yang memang sebenarnya didapat dari pengalamannya menjadi nelayan, termasuk ukuran lamanya menekuni pekerjaan sebagai pencari ikan dan sejenisnya di laut, seperti halnya pengetahuan terkait dengan kondisi musim, dalam hal ini yang bersangkutan tahu kapan waktu bisa dan tidak bisa melaut, tatacara pengambilan tindakan keselamatan di laut sudah menjadi kewenangannya. Dan tidak kalah pentingnya adalah posisinya orang yang mempunyai pengetahuan tentang di lokasi mana yang bisa dan tidak bisa memasang atau melepas alat tangkap yang digunakan, termasuk yang bersangkutan memahami perihal yang terkait dengan hubungan antara nelayan dengan kondisi lingkungan, dalam hal ini terkait dengan persoalan yang menjurus ke hal yang gaib atau magis.

Sedangkan perangkat organisasi yang dikatakan sebelumnya sawi adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai tulang punggung dalam mengoperasikan setiap peralatan yang digunakan. Sebab memang terjadinya organisasi kerja nelayan ditemukan saat penggunaan peralatan kerja itu dituntut melibatkan banyak orang, artinya kegiatan dilangsungkan tidak seorang diri, seperti yang dialami ketika peralatan yang digunakan mencari hasil laut tidak perlu melibatkan orang banyak dalam satu kelompok kerja, dalam hal ini nelayan perorangan. Kehadirannya sebagai seorang sawi karena umumnya yang bersangkutan, selain masih

minim pengalaman, usia masih tergolong belia di sektor nelayan, pengetahuan masih sangat minim, tetapi umumnya yang paling diutamakan di sini adalah faktor fisik yang menjadi palang penentu. Dan mereka dijadikan pekerja sangat tergantung dengan *pongghawa* darat, artinya seorang *pongghawa* daratlah yang menjadi penentu seorang *sawi* dalam keterlibatannya sebagai pekerja.

Terjadinya pembagian kerja yang kelihatannya tampak berbeda pada persoalan tanggung jawab dari masing-masing kelompok kerja adalah sangat berpengaruh pada tingkat penghasilan yang mesti diterima. Artinya paling rendah status seseorang dalam organisasi kerja nelayan, maka semakin kecil pula upah yang diharapkan. Sebab memang dalam organisasi kerja nelayan, seorang *sawi* atau nelayan kebanyakan yang mendapat penghasilan paling kecil, termasuk jika dibandingkan dengan upah yang diterima seorang *pongghawa* laut masih lebih besar dari penghasilan seorang *sawi*, apalagi ketika dibandingkan dengan yang didapat seorang *pongghawa* darat tentu jauh lebih besar lagi dari keduanya. Bahkan seorang yang berstatus sebagai *pongghawa* darat justru menjadi seorang dipertuankan dalam hidupnya oleh karena antara *sawi* dan juragan menjadikannya sebagai bank berjalan; dalam hal ini sebagai tempat meminta bantuan dalam bentuk pinjaman.

Status sosial dalam sebuah kerabat atau keluarga dalam satu kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat pada masyarakat Bugis yang ditemukan di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare sangat berpengaruh dan ditentukan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam hal pemilihan jodoh serta pembagian harta warisan. Misalnya dalam masyarakat yang beretnis Bugis di Kelurahan Sumpang Minangae, walau sebenarnya hal seperti ini persoalan masa lalu, tetapi tetap terbawa sekarang walau kondisinya tidak lagi seheboh sebelumnya. Misalnya seorang anak hanya mewarisi stratifikasi sosial

pihak ayahnya. Artinya, ketika kondisinya dalam keluarga yaitu seorang laki-laki bangsawan menikahi seorang wanita kebanyakan (bukan bangsawan), dan kemudian hari melahirkan turunan, anak-anaknya kelak tetap tergolong berdarah bangsawan. Sebaliknya, ketika kondisi yang terjadi di mana seorang ibu yang berdarah bangsawan dan seorang ayah hanya berstatus sebagai masyarakat kebanyakan, turunan yang dilahirkan dari suami istri yang digambarkan tidak terwariskan status sosial yang dimiliki ibunya. Artinya, seorang anak yang lahir dengan kondisi suami istri seperti digambarkan, maka sang anak tidak terwariskan darah bangsawan yang dimiliki ibunya, tetapi berada pada tatanan kehidupan keluarga berstatus sosial sama dengan ayahnya.

Sistem Kekerabatan

Sama halnya masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok sosial suku bangsa Bugis yang ditemukan di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis yang dewasa ini bertempat tinggal di di Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare dikatakannya sejak dahulu kala mengenal sistem kekerabatan yang orintasinya dikatakan bersifat bilateral, yaitu mengacu pada dua arah turunan, yaitu pihak ayah maupun pihak ibu. Terkonstruksi perinsip kekerabatan seperti dikatakan, yaitu bersifat bilateral adalah menjadi pengacu tumbuhnya sebuah bentuk hubungan kekerabatan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Bugis yang dapat ditelusuri melalui hubungan kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Secara prinsip, pembentukan kerabat baru dalam satu lingkungan keluarga, sebenarnya tidak hanya terbangun melalui satu jalur yang dikatakan hubungan darah. Tetapi pembentukan kerabat baru juga dapat dibentuk lewat sebuah jalur yang disebut jalur perkawinan. Hanya yang membedakan di antara kedua

komponen keluarga ini adalah ditemukan pada persoalan adanya istilah yang disebut kedekatan, dalam artian ada keluarga yang biasanya dibentuk dengan jalur perkawinan dan inilah yang lazim dengan sebutan keluarga jauh, ada kerabat yang memang terlahir dari adanya hubungan darah, inilah yang dikategorikan keluarga dekat. pembentukan kerabat seperti digambarkan berasal dari dua jalur dimaksud memaksa masyarakat yang dewasa ini bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare, khususnya yang berlatar belakang suku bangsa Bugis mengenal kelompok-kelompok kekerabatan dalam dua momentum, yaitu momentum pertama dikenal dengan keluarga inti atau lazim dengan istilah keluarga batih (*nuclear family*).

Adapun yang dimaksud keluarga batih, adalah kelompok keluarga yang komponen atau anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kelompok keluarga seperti terungkap dalam komunitas orang Bugis disebut dengan istilah lokal “sianang” atau “maranak”. Sedangkan kelompok keluarga yang kedua disebut keluarga luas (*extended family*) atau dalam lingkungan orang Bugis populer dengan istilah lokalnya “sidapo” atau “sidapureng”, yaitu satu bentuk kelompok keluarga yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga yang komponen atau anggotanya terdiri dari keluarga inti, yaitu ayah, ibu dan anak, di samping beberapa komponen lainnya, seperti seorang adik atau kakak ipar, mertua, kakek, nenek dan keluarga lainnya yang terungkap dari kedua belah pihak.

Terbentuknya ikatan kekerabatan atau keluarga melalui hubungan darah, merupakan sesuatu yang dianggap ikatan kekerabatan yang bersifat abadi. Sebab hubungan yang dikatakan ikatan darah tidak akan terputus atau lepas sampai pada posisi keluarga bagaimana pun. Artinya, keluarga ini tidak akan terputus kendati ada diantara mereka yang sudah ditetapkan sebagai

pendukungnya meninggal dunia. Tetapi sebaliknya, terbentuknya ikatan kekerabatan melalui jalur hubungan perkawinan, hanya akan berlangsung atau bisa langgeng selama sebuah ikatan perkawinan itu sendiri masih dianggap kekal atau utuh. Sebab manakala ikatan perkawinan antara kedua belah pihak diakhiri dengan satu masa yang disebut masa perceraian atau dalam istilah lokal (Bugis) *sisara'* atau *massarang*, termasuk peristiwa meninggal dunia, yang terjadi adalah persoalan terputusnya ikatan kekerabatan kedua belah pihak.

Sistem kekerabatan seperti terungkap sebelumnya pada intinya dapat juga dituangkan lewat melakoni hidup dan kehidupan nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya, khususnya yang erat keterkaitannya dengan memposisikan diri dalam melihat organisasi kerja yang terbentuk dalam kelompok kerja yang dikenal dengan *pongawa* darat, *pongawa* laut (juragan) dan sebagai *sawi*. Misalnya seorang pemilik modal usaha yang dikenal dengan istilah *pongawa* darat dalam mempekerjakan, baik sebagai seorang juragan maupun sebagai *sawi*, pada dasarnya walau tidak mesti menjadi suatu ketentuan yang mutlak adanya, tetap yang bersangkutan mengacu pada persoalan kedekatan terhadap seseorang yang akan dijadikan pekerja, bahkan yang paling banter lagi adalah memilih kerabat, baik itu kerabat yang terbilang sudah jauh terlebih lagi terhadap kerabat yang sudah terbilang jauh. Dipilihnya pihak kerabat sebagai pekerja dalam lingkup usaha mereka memang dilatari berbagai bentuk pertimbangan. Namun yang dijadikan pertimbangan utama adalah ketika menghadirkan keluarga mudah mengontrolnya serta mudah pula menyelesaikan ketika suatu ketika terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Persoalan memilih keluarga dalam organisasi kerja nelayan oleh seorang pemodal umumnya diberlakukan pada pemakaian seorang juragan. Dan faktor yang paling utama menjadi perhatian

dalam memilih tenaga kerja adalah penegakan kejujuran barulah menyusul persyaratan lainnya, seperti diantaranya *skill* atau keterampilan.

Bahkan seorang pemodal dalam merekrut tenaga kerja ketika tidak ditemukan orang dalam lingkup kerabat, maka yang menjadi perhitungan adalah persahabatan, termasuk tetangga. Dipilihnya dua kategori yang diidentikkan dengan keluarga oleh karena kedua komponen masyarakat ini mudah diukur atau diketahui sekaligus mengenal watak atau karakter yang bersangkutan. Sebab dalam hidup dan kehidupan, tetangga maupun sahabat dikatakannya sudah menjadi bahagian dari mereka, bahkan diasumsikan, bahwa sahabat dan tetangga itu boleh lebih dipilih daripada memilih kerabat yang sudah terbilang jauh hubungannya.

Sistem Perkawinan

Walau perkawinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai sekarang masih dipandang suci atau disakralkan oleh hampir seluruh kelompok sosial, terutama di lingkungan kelompok sosial yang menekan diri orang Bugis, termasuk di Kelurahan Sumpang Minangae. Sebab memang pada prinsip persoalan mengenai perkawinan bagi setiap kelompok masyarakat, termasuk di lingkungan masyarakat Sumpang Minangae, selain merupakan tuntutan bagi para manusia yang beragama, juga perkawinan merupakan sesuatu peristiwa yang dapat terlihat mempertahankan momentuk kesakralannya. Aturan serta tahapan-tahapan dalam suatu proses perkawinan terpatrit dalam adat-istiadat orang Bugis. Bahkan masalah perkawinan boleh dikatakan menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dengan persoalan status seseorang. Artinya, dalam perkawinan tradisional inilah seluruh unsur-unsur yang bersifat pantangan/pemali lahir sebagai keku-

atan adat istiadat. Sebab walau perkawinan ini banyak bentuk kegiatannya hanya digolongkan sebagai sajian serimonial, tetapi hampir semua dapat dipertahankan keberadaannya.

Misalnya kita lihat yang terkait dengan persoalan menetapkan dan menjatuhkan pilihan yang akan dipersunting, lazim diistilahkan pemilihan jodoh, dalam acara perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam proses perkawinan. Dalam lingkup kehidupan masyarakat yang tergolong berlatar belakang suku bangsa Bugis, seperti yang ditemukan pada masyarakat Bugis yang bertempat tinggal di Sumpang Minangae, dalam memilih dan menentukan jodoh terhadap anaknya lebih mengutamakan kerabat, baik kerabat dari seorang maupun kerabat dari seorang ibu. Bahkan persoalan kerabat yang dipilih menjadi teman hidup tidak terputus sampai di situ, tetapi dalam lingkup kerabat masih dipersyaratkan lagi ke arah yang paling eksklusif, yaitu terhadap sepupu sampai tingkatan ketiga ke bawah, yaitu antara sepupu sekali (*sapposisiseng*), sepupu dua kali (*sappokadua*) dan sepupu tiga kali (*sappokatellu*). Bahkan dalam budaya orang Bugis, justru dari ketika tingkatan sepupu dalam kerabat terkait dengan perkawinan adat masih ada pilihan yang dianggap paling ideal, yaitu perkawinan sesama sepupu dua kali.

Menurut pandangan umum masyarakat Bugis, dikondisionkannya perkawinan mesti berlangsung seperti ini oleh karena *sanga* dikaitkan dengan pemilikan harta benda yang akan menjadi warisan orang tua kepada anaknya kelak. Artinya, dijadikan persyaratan seperti kondisi digambarkan sebelumnya agar harta yang dimiliki orang tua dari masing-masing mempelai tidak jatuh ke mana-mana, tetapi harta dimaksud tetap menjadi milik kerabatnya, bukan kepada orang yang tidak tergolong ke dalam lingkungan kerabat atau dikatakan orang lain. Perkawinan yang mesti jatuh pada sepupu adalah bertujuan agar keutuhan sebagai

kerabat tidak terputus, artinya dengan perkawinan yang dipersyaratkan adalah juga bertujuan lebih mendekatkan ikatan atau hubungan kekerabatan, seperti halnya dalam kelompok etnis Bugis sepupu lapisan ketiga dianggap sudah mulai jauh, bahkan diasumsikan sudah hampir putus hubungan kekerabatannya.

Hampir semua aturan-aturan yang dipertahankan sebelumnya oleh karena hanya mengarah ke persoalan memberlakukan adat istiadat, terutama terkait dengan masalah perkawinan, sebenarnya dapat dikatakan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang paling tampak di permukaan masyarakat dewasa ini adalah terkait dengan pemilihan jodoh yang faktanya tidak lagi terdesak dengan aturan adat yang mengharuskan sistem perkawinan dilangsungkan secara indogami atau perkawinan kedalam lingkup keluarga atau kerabat dekat. Tetapi yang berlaku setiap orang, walau masih ada yang ditemukan tetap berada pada rel perkawinan adat seperti terungkap sebelumnya, sudah didaulat dalam mencari jodoh tidak lagi berpatokan dalam lingkup kerabat. Artinya, setiap anak yang sudah masuk usia perkawinan diberi kebebasan memilih atau menentukan pilihannya, namun tetap pada koridor meminta restu atau disetujui orang tua atau kerabat dekatnya.

Terjadinya pergeseran atau perubahan terkait dengan perihal kawin-mawin yang mana sebelumnya sangat kental dengan penekanan pada pemberlakuan adat istiadat sebagaimana digambarkan sebelumnya, pada prinsipnya membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap warga masyarakat sebagai penghuni sebuah wilayah pemukiman, dalam hal di Kelurahan Sumpang Minangae. Artinya, dengan adanya kebebasan memilih atau menentukan jodoh yang diberikan kepada setiap anak yang memasuki usia perkawinan, maka tidak heran ketika warga masyarakat yang dewasa ini menjadi penghuni atau penduduk tetap

di Kelurahan Sumpang Minangae terlihat beragam, yang menjadi dominan adalah beragam asal daerah, kalau pun ada beragam etnis, mungkin kejadiannya sangat kecil jumlahnya. Tetapi yang paling tampak dengan adanya kebebasan anak dalam memilih dan menentukan jodohnya adalah membentuk wilayah ini sebagai wilayah yang dihuni beragam penduduk asal daerah lain, walau tetap berlatar belakang suku bangsa Bugis. Bahkan ada segelintir informasi dari masyarakat Parepare secara ke seluruh yang mengatakan, bahwa umumnya yang menjadi penduduk dewasa ini adalah orang-orang yang datang dari berbagai daerah khususnya daerah Bugis, seperti diantaranya, dari Sidenreng Rappang, Pinrang dan lain sebagainya.

Sistem Kepercayaan

Pembahasan sebelumnya diungkapkan, bahwa mayoritas warga masyarakat yang menghuni Kelurahan Sumpang Minangae Parepare adalah orang-orang yang menjadikan agama Islam sebagai tuntunan hidup. Sesuai kondisi yang ditemukan, warga masyarakat Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa masyarakat kelurahan Sumpang Minangae terdiri dari beberapa agama, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sebagian besar penduduk yang berada di daerah tersebut beragama Islam, hampir semua laki-laki dewasa dan wanita dewasa sangat taat di dalam menjalankan ibadah Shalat lima waktu. Hal ini terlihat apabila ketika waktu shalat telah tiba mereka datang ke masjid untuk shalat jamaah.

Ketaatan warga masyarakat melakukan ibadah Shalat, di satu sisi menunjukkan ketaatan mereka dalam rangka pelaksanaan sebagian dari syariat agama Islam yang dianutnya. Namun di lain sisi warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut masih tetap percaya dengan adanya makhluk-mahluk gaib dan kekuat-

an sakti (*super natural power*) yang konon kabarnya sangat menentukan keselamatan diri maupun perolehan rezeki bagi nelayan. Oleh karena itu untuk menjaga keselarasan antara manusia dengan sang Maha Kuasa, maka manusia melakukan berbagai macam persembahan. Sistem kepercayaan dapat dilihat dalam berbagai upacara daur hidup yaitu upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, dan sebagainya.

Masyarakat nelayan yang ditemukan di Kelurahan Sumpang Minangae memiliki beberapa pengetahuan, diantaranya ialah:

1. Keadaan air laut, di mana nelayan mampu mengetahui dan mengelompokkan keadaan air laut menjadi tiga bagian, yakni air laut yang dangkal, air laut keadaan sedang, air laut yang dalam,
2. Gerakan air laut, di mana nelayan mampu membaca gerakan air pasang naik dan air pasang turun ketika para nelayan akan mengadakan perjalanan mengarungi laut,
3. Gelombang air, di mana pengetahuan para nelayan mengenai ombak apabila di sebelah timur, barat, utara dan selatan terdapat awan tebal menghitam, maka dapat dipastikan dalam waktu dekat akan terjadi ombak besar. Ombak besar biasanya terjadi pada awal bulan Juni sampai bulan Agustus.

Keadaan Perikanan

Usaha perikanan yang momentum pengungkapannya erat keterkaitannya apa yang dijadikan sasaran pengkajian dalam tulisan ini, adalah terungkap lewat aktivitas penangkapan yang ter-tuju pada pemanfaatan beragam jenis alat atau peralatan alat tangkap yang kalau dicermati kehadirannya rata-rata masih tertuju pada persoalan yang dikelola masih dengan cara tradisional. Umumnya hasil tangkapan nelayan sepulang melaut dipasarkan dengan mengarah pada penjualan yang dilaksanakan dalam

kampung, hanya bentuk penjualannya berlangsung bukan secara pantai atau borongan, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Tetapi ketika penjualan dilangsungkan di luar wilayah yang menjadi sasaran kajian, maka model penjualannya dilangsungkan dalam jumlah besar.

Semua wilayah persebaran penduduk, khususnya yang beraktivitas sebagai nelayan memiliki waktu-waktu tertentu yang mana waktu dimaksud menjadi sasaran beraktivitas yang dianggap terbaik. Seperti halnya informasi yang didapatkan yang mengatakan, bahwa masa ikan atau musim ikan sepanjang tahun berjalan adalah antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Bahkan dalam melakukan kegiatan terkait posisinya sebagai nelayan, masyarakat nelayan Sumpang Minangae juga mengenal apa yang dinamakan masa kurang beruntung, bahkan bisa dikatakan masa paceklik, yaitu antara bulan November sampai bulan April. Ketika kondisi seperti ini terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan termasuk yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae, nelayan sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Sebab sebatas kebutuhan akan makan pun boleh dikatakan sangat susah. Kondisi alam ketika ini datang, maka hujan mulai sering turun dan angin bertiup cukup kencang. Dengan kondisi seperti inilah sehingga nelayan itu selalu tergambar atau digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang memang faktanya hidup dalam keterbatasan, termasuk masyarakat nelayan yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae Parepare yang bekerja hanya sekedar menutupi tuntutan akan kebutuhan makan dan minum terhadap keluarganya. Apalagi memang model jenis usaha penangkapan yang dilakukan sebahagian besar masyarakat nelayan Sumpang Minangae umumnya masih berada dalam tatanan pengguna peralatan atau alat tangkap tergolong ramah lingkungan. Kesemuanya alat tangkap yang terungkap dalam penjelasan nantinya

merupakan spesifikasi alat tangkap yang sudah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan para nelayan sebelumnya, arti peralatan-peralatan pendukung yang ditemukan adalah karya para pendahulu.

Gambaran Perikanan di Kelurahan Sumpang Minangae

Usaha perikanan yang momentumnya adalah pengungkapan perihal yang erat keterkaitannya dengan apa yang dijadikan sasaran pengkajian dalam tulis ini, adalah terungkap lewat aktivitas penangkapan yang tertuju pada pemanfaatan beragam jenis alat atau peralatan alat tangkap yang kalau dicermati kehadirannya rata-rata masih tertuju pada persoalan yang dikelola masih dengan cara tradisional. Umumnya hasil tangkapan nelayan selupang dari melaut dipasarkan dengan mengarah pada penjualan yang dilangsungkan dalam kampung, hanya bentuk penjualannya berlangsung bukan secara partai atau borongan, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Tetapi ketika penjualan dilangsungkan di luar wilayah yang menjadi sasaran kajian, maka model penjualannya dilangsungkan dalam jumlah besar dengan sistem borongan.

Semua wilayah persebaran penduduk, khususnya yang beraktivitas sebagai nelayan memiliki waktu-waktu tertentu yang mana waktu dimaksud menjadi sasaran beraktivitas yang dianggap terbaik. Seperti halnya informasi yang didapatkan yang mengatakan, bahwa masa ikan atau musim ikan sepanjang tahun berjalan adalah antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Bahkan dalam melakukan kegiatan terkait posisinya sebagai nelayan, masyarakat nelayan Sumpang Minangae juga mengenal apa yang dinamakan masa kurang beruntung, bahkan bisa dikatakan masa paceklik, yaitu satu tenggang masa aktivitas nelayan yang dilangsungkan antara bulan November sampai bulan April.

16360 Ketika kondisi seperti ini terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan, termasuk yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae, nelayan sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Sebab sebatas pemenuhan kebutuhan akan makan pun boleh dikatakan sangat susah apalagi usaha mencari untuk pemenuhan kebutuhan akan perihal yang bersifat primer tentu semakin susah pula. Kondisi alam ketika seperti ini dikatakan datang, hujan mulai sering turun dan angin bertiup cukup kencang. Dengan kondisi seperti inilah sehingga nelayan itu selalu tergambar atau digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang memang faktanya hidup dalam keterbatasan, termasuk masyarakat nelayan yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae Parepare yang bekerja hanya sekedar menutupi tuntutan akan kebutuhan makan dan minum terhadap keluarganya. Apalagi memang model jenis usaha penangkapan yang dilakukan masyarakat nelayan Sumpang Minangae masih berada dalam tatanan pengguna peralatan atau alat tangkap tergolong ramah lingkungan.

Bahkan dikatakan ke semua alat tangkap yang terungkap dalam penjelasan dalam tulisan ini merupakan spesifikasi alat tangkap yang sudah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan para nelayan yang diterimanya sebagai bentuk teknologi yang ada sebelumnya. Artinya, peralatan-peralatan pendukung yang ditemukan adalah masih merupakan karya para pendahulu, khususnya terkait dengan alat tangkap dan beberapa komponennya. Kalau pun ditemukan adanya perubahan terutama dari segi penggunaan komponen terkait dengan peralatan atau alat tangkap yang ditemukan dewasa ini, termasuk penambahan jenis alat tangkap yang baru, itu sudah menjadi sebuah bentuk pemaksaan yang bersifat keharusan menggunakan komponen dimaksud. Sebab sangat terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dikatakan sudah sukar lagi terbendung. Apa-

lagi kondisi alam laut yang dijadikan masyarakat nelayan sebagai sasaran tangkap memang semakin hari semakin memperlihatkan sifat keganasannya. Ke semua sifat keganasan lautan dimaksud tentu memerlukan suatu strategi dalam rangka menaklukkannya. Begitu pula dengan adanya penambahan jenis alat tangkap baru, pada prinsipnya tidak terlepas daripada suatu bentuk pengharapan masyarakat nelayan secara keseluruhan untuk mencari bentuk atau model yang tepat untuk tetap memfungsionalkan lingkungan alam laut sebagai ruang produksi yang menjanjikan. []

BAGIAN KETIGA

SISTEM NILAI BUDAYA SEBAGAI DASAR PENANGGULANGAN KEMISKINAN NELAYAN

Merujuk daripada apa yang terungkap lewat penetapan sekaligus pengangkatan judul penelitian sebagaimana tersusun secara sistematis, yaitu sistem nilai budaya sebagai dasar penanggulangan kemiskinan. Pengangkatan judul penelitian yang terfokus pada masyarakat nelayan terkait dengan kemiskinan mengambil sasaran pada suatu wilayah yang sekaligus menjadi setting penelitian adalah Sumpang MinangaE Kota Parepare. Ketika mencermati apa yang menjadi sasaran dari pengungkapan sebuah judul penelitian sebagaimana tertera, maka tentu sasaran utamanya adalah bagaimana melihat kehidupan masyarakat nelayan yang dalam banyak tulisan dikatakan identik dengan kemiskinan.

Pembuktian-pembuktian nelayan yang selalu diidentikkan dengan kemiskinan akan terungkap lewat pengangkatan beberapa bentuk pertanyaan penelitian sebagaimana yang terung-

kap melalui rumusan masalah yang mana melahirkan tiga buah pertanyaan penelitian. Ketiga buah pertanyaan penelitian seperti terungkap yang pertama, adalah meminta penggambaran tentang bagaimana model dan bentuk penerapan strategi masyarakat nelayan dalam rangka melokoni hidupnya sebagai pemanfaatan lingkungan alam laut? Masalah yang kedua, adalah meminta penggambaran bentuk dan model keterlibatan pemerintah dan unsur-unsur masyarakat terkait atas kesungguhannya untuk berusaha merubah pola hidup masyarakat nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae? Sedangkan permasalahan yang ketiga, adalah meminta penggambaran bagaimana kedudukan sistem nilai budaya dalam keterkaitannya dengan penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae? Kesemua permasalahan sebagaimana diungkapkan sebelumnya adalah terungkap lewat pemaparan sesuai kondisi yang ada di lokasi penelitian.

Model Penerapan Strategi Masyarakat Nelayan

Dalam rangka melihat model penerapan strategi yang diterapkan atau dibangun masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, Kota Parepare dalam rangka mencari nafkah hidup guna menutupi kebutuhan hidup bersama anggota keluarganya, sekaligus menjadi mata pencaharian pokok, yang mana era ini dikatakan semakin hari semakin terdesak dengan pesatnya perkembangan zaman yang telah mengarah pada pembentukan atau kedekatan penggunaan teknologi maju (modern), pada prinsipnya dapat tertuang atau digambarkan lewat pembahasan terkait dengan penggunaan peralatan atau alat tangkap serta beberapa sarana atau peralatan pendukung lainnya, seperti sarana transportasi yang menjadi perangkat vital dalam melangsungkan aktivitas pencarian sekaligus penang-

kan. Dikatakannya seperti ini oleh karena sarana transportasi berupa perahu dalam berbagai motif dan ukuran serta penggunaan kelengkapan menjadi suatu alat dukung yang dapat difungsikan, yaitu selain sebagai sarana angkutan para pengguna, juga menjadi satu komponen dengan alat tangkap tertentu. Nelayan seperti dikatakan memang merupakan sebuah sistem, yang mana dalam rangka melihatnya ia terlahir dengan menempatkan sub-sub sistem di dalamnya sebagai komponen yang turut berperan penting dalam sistem dimaksud. Sebab kesemua subsistem nantinya akan berfungsi lebih optimal ketika usaha yang tengah dijalani berjalan sesuai koridor.

Alat Tangkap Jala

Alat tangkap yang populer di lingkungan masyarakat nelayan dengan sebutan jala, pada prinsipnya merupakan salah satu dari sekian banyak alat tangkap yang selama ini digunakan masyarakat nelayan untuk mencari sekaligus memburu beragam jenis ikan dan jenis biota laut lainnya. Alat tangkap jala dalam posisinya sebagai alat tangkap yang boleh dikatakan lebih populer dengan beberapa jenis alat tangkap nelayan lainnya, secara faktual dari dulu hingga kini boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik yang terkait dengan model dan rancang bangun dari alat tangkap nelayan yang dikatakan tergolong sangat sederhana, juga terhadap penggunaannya tidak hanya tertuju pada nelayan yang menjadikan fokus penangkapan pada area laut. Tetapi alat tangkap yang populer dengan sebutan jala memang merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan mencari ikan dalam semua ruang, seperti di sungai, di danau dan terlebih di area laut. Bahkan alat tangkap yang disebut jala ini boleh dikatakan tidak hanya ditemukan sekaligus dimiliki masyarakat yang hidupnya berprofesi sebagai nelayan.

Tetapi alat tangkap dimaksud bahkan kepemilikannya sering ditemukan pada masyarakat lain yang bukan berprofesi sebagai nelayan. Artinya, alat tangkap yang disebut jala ini boleh dikatakan mudah didapat pada setiap lapisan masyarakat, terutama yang memang sekitar mereka tinggal ada sungai, termasuk danau. Itulah sebabnya sehingga dikatakan jala mudah ditemukan.

Kondisi seperti ini besar kemungkinannya disebabkan berbagai hal, seperti alat tangkap yang disebut jala mudah didapat dengan cara membeli di toko-toko yang memang menyediakan berbagai jenis dan perlengkapan nelayan. Bahkan dikatakan dalam lingkungan masyarakat nelayan, alat tangkap yang disebut dengan nama jala kebanyakan bentuk pengadaannya dengan cara merajut sendiri, artinya yang bersangkutan hanya menyiapkan dengan cara membeli bahan-bahan baku yang menjadi kelengkapannya baru dirajutnya sendiri. Termasuk penggunaan saat dioperasikan, alat tangkap jala dikatakan cukup peraktis dan dikatakan tidak mengenal waktu kapan akan dioperasikan.

Khusus alat tangkap yang disebut jala yang digunakan masyarakat nelayan yang dewasa ini bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare sebenarnya bukan sebuah alat tangkap yang disebut jala seperti digambarkan dalam penjelasan sebelumnya yang dikatakan dapat digunakan pada area sungai dan danau dengan memanfaatkan waktu kapan saja. Tetapi alat tangkap yang disebut jala pada masyarakat nelayan Sumpang Minangae yang menjadi pengguna sekaligus pendukungnya alat tangkap dimaksud adalah sebuah alat tangkap yang ketika dioperasikan tidak dengan cara melempar ke arah yang dijadikan sasaran atau diperkirakan ada kerumunan ikan, bahkan terkadang pelemparan dengan cara menduga-duga adanya kerumunan ikan. Tetapi jala sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini cara mengoperasikannya adalah ditebar dan harus digunakan di

lingkungan laut. Penebarannya pun tidak dilakukan sembarangan, tetapi saat ditebar selalu tertuju pada satu area yang selama ini dijadikan tempat memasang perangkat yang dikatakan rompongg, artinya jala hanya ditebar pada area di mana terdapat rompongg secara melingkar atau dipasang mengelilingi area di mana rompongg terpasang. Sebab memang rompongg merupakan salah satu ruang yang dirancang khusus untuk menjadi arena berkumpul sekaligus bermainnya ikan-ikan yang dijadikan sasaran tangkap nelayan pengguna alat tangkap jala.

Sebagaimana nelayan pengguna alat tangkap lainnya dalam mencari nafkah hidup di laut, bagi nelayan pengguna alat tangkap yang disebut jala, dalam keterkaitan dengan prosudur yang dilakukan setiap kali melaut tetap mengacu pada aturan-aturan dasar yang mana dimulai dengan memasuki suatu tahapan yang disebut tahapan awal atau tahapan pertama yang mesti dilakukan. Pada tahapan awal ini yang juga dikenal dengan tahap persiapan, para nelayan pendukungnya, sebelum berangkat melaut terlebih dahulu mempersiapkan segala bentuk dan rupa yang akan menjadi bahan pendukung saat dilangsungkannya kegiatan penangkapan, mulai dari mempersiapkan jala yang selalu sudah dalam kondisi siap digunakan, artinya alat tangkap ini ketika mau difungsikan secara maksimal kondisinya berada dalam keadaan baik, yaitu tidak ditemukan kerusakan, seperti adanya jala yang robek tentu memerlukan perbaikan lebih dini sebelum digunakan. Sebenarnya kesiapan jala dianggap yang paling utama dan dianggap sesuatu yang menjadi prioritas.

Selain persiapan dalam bentuk fungsionalnya sebuah jala, maka perlengkapan lainnya juga dipersiapkan, seperti halnya kondisi sarana transportasi harus dalam kondisi siap pakai atau dioperasikan sebagai sarana angkutan, termasuk perlengkapan lain yang sifatnya menjadi kebutuhan nelayan saat melaut. Dija-

dikannya perhatian utama terkait dengan persiapan seluruh perlengkapan penduduk berada dalam kondisi siap pakai oleh karena ketika semua dimaksud tidak dalam keadaan siap pakai tentu nelayan bersangkutan dibuat susah kemudian saat mau digunakan baru ketahuan ada di antara perlengkapan yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebab risiko dari ketidaksiapan perlengkapan saat melaut tentu tertuju pula pada nelayan, selain bisa mengurangi tingkat pencapaian harapan, yaitu keberhasilan mendapatkan hasil buruan, juga menjadi suatu pekerjaan yang bersifat sia-sia. Sebab dalam satu kali beroperasi untuk mencapai sasaran nelayan bersangkutan tetap mengeluarkan biaya, terutama biaya pembelian bahan bakar untuk keperluan perahu motor sebagai sarana transportasi melaut. Kesemua kebutuhan yang akan digunakan melaut persiapannya dilangsungkan disore hingga malam hari dan beginilah proses seterusnya saat nelayan pengguna alat tangkap jala.

Setelah tahapan persiapan dilakukan sore hari hingga malam hari, maka sekitar jam 3 dini hari nelayan yang rata-rata dalam satu unit alat tangkap jala didukung 2-3 orang personil di mana satu orang berada dalam posisi sebagai ponggawa laut (juragan) dan satu atau dua orang personilnya berada pada posisi sebagai sawi atau anak buah berangkat menuju ke arah dimana yang setiap waktu memang sudah terplot sebagai area atau dijadikan sasaran menebar jala. Setelah tiba pada area yang dituju dengan lama perjalanan diperkirakan lebih kurang setengah jam, terutama ketika area pencarian masih berada dalam zona wilayah Parepare, para pekerja langsung menyalakan lampu sebagai alat penerang pada area rompongg, dahulu menggunakan lampu petromax, dewasa ini menggunakan alat penerang yang sumber listriknya berasal dari tenaga genset atau generator. Setelah lampu dinyalakan, maka para personil mulai menurunkan dengan cara

menebar mengitari rompongg yang khusus dirakit menjadi sarana menebar jala.

Nelayan pengguna alat tangkap jala, dalam setiap kali menebar jala yang digunakan tidak perlu lagi menunggu lama setelah jaring diturunkan untuk mengangkat atau menariknya kembali ke atas perahu, artinya jala yang diturunkan sebenarnya bukan untuk dipasang sambil menunggu masuknya ikan yang menjadi sasaran buruan, tetapi setelah ditebar secara keseluruhan langsung diangkat atau ditarik secara manual naik kembali ke atas perahu, artinya ada ikan tidak ada ikan yang terperangkap jaring setelah diturunkan tidak menunggu, tetapi langsung ditarik kembali. Setelah jaring seluruhnya berada dalam kondisi di atas perahu, nelayan turut serta bekerja atau beraktivitas sesuai tugas bergegas mengeluarkan ikan yang tertangkap dalam jala, lalu memasukkannya dalam wadah penampungan yang sebelumnya sudah berisi es batu sebagai bentuk antipasi mencegah mudahnya ikan hasil tangkapan rusak atau membusuk. Jadi beginilah proses terus menerus model sistem penangkapan yang dilakukan nelayan pengguna alat tangkap jala hingga menjelang mereka pulang melaut yang rata-rata sekitar jam 5 subuh hari. Ketika musim ikan tergolong normal, maka satu hari beroperasi bisa mencapai hasil 6 ember ikan berukuran besar, seperti halnya ikan cakalang dan sejenisnya yang bisa mencapai berat dalam satu ekor rata-rata 10-15 kg.

Adapun kondisi fisik daripada alat tangkap yang populer dinamakan jala dalam tulisan ini adalah terlihat dari bagian atas ke bawah berbentuk kerucut, yaitu terlihat makin ke bawah, keadaan fisiknya terlihat semakin luas, termasuk mata jaringnya dirajuk berbeda ukuran antara bagian atas bagian tengah dan bagian jaring paling bawah. Pada bagian atau ujung bawah sebuah jala diberi bahan pemberat yang umumnya dibuat dari bahan baku

berupa besi yang dibentuk melingkar menyerupai cincin yang terpasang pada jari tangan. Alat tangkap yang disebut jala dimaksud adalah alat tangkap nelayan laut yang masuk dalam lingkup alat tangkap kategori jaring atau net. Alat dimaksud khusus digunakan nelayan di laut, termasuk yang digunakan masyarakat nelayan adalah salah satu alat tangkap yang tergolong menjadi prioritas masyarakat nelayan Kelurahan Sumpang Minangae yang dikatakan mayoritas berlatar belakang suku bangsa Bugis, walau sebenarnya dalam beberapa tulisan, seperti diantaranya (Syamsul Bahri, 2012) yang mengungkapkan, bahwa alat tangkap yang dikatakan jala juga merupakan salah satu jenis alat tangkap nelayan yang menjadi spesialis bagi orang yang berlatar belakang suku bangsa Buton. Artinya, alat tangkap jala dimaksud adalah termasuk alat tangkap yang diandalkan nelayan suku bangsa Buton dalam rangka mencari nafkah hidup, khususnya terhadap nelayan Buton yang ditemukan bermukim di Pulau Makassar.

Bahkan dalam tulisan yang sama dikatakan, bahwa alat tangkap yang dikatakan jala, dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan berlatar belakang suku bangsa Buton justru mengatakannya sebagai penggambaran identitasnya oleh karena menjadi alat tangkap yang pertama hadir dan digunakan sebagai alat mencari biota laut. Kondisi seperti ini dapat dikatakan tidak berbeda seperti apa yang ditemukan di lingkungan masyarakat nelayan yang dewasa ini bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae, yang mana juga melihat alat tangkap yang populer dengan sebutan jala adalah menjadi alat tangkap populer dibanding dengan beberapa alat tangkap yang dioperasikan mencari hasil laut, seperti disebutkan sebelumnya, yaitu alat tangkap jaring (pukat biasa) dan pancing.

Perakitan Alat tangkap yang diberi nama jala, pada prinsipnya dibangun dengan menggunakan bahan baku berupa

benang nilon yang dirancang menyerupai kerucut terbalik ketika digunakan, sebagaimana diungkap sebelumnya teracik yaitu makin ke bawah makin kecil lingkarannya, termasuk mata jaringnya makin ke bawah makin kecil ukuran mata jaringnya dan pada bagian bawah di posisi g tengah dirancang atau dirajuk sebuah ruang yang difungsikan sebagai tempat tertampungnya atau terperangkapnya biota laut yang masuk ke dalam. Satu unit alat tangkap yang dikatakan jala dirancang dengan ukuran besaran lingkaran berbeda, termasuk ukuran mata jaringnya yang juga berbeda atas empat macam ukuran, begitu pula pewarnaan tali atau benang nilon sebagai bahan baku dirajuk dalam tiga bagian. Ketiga warna dimaksud masing-masing tertera berdasarkan posisinya, yaitu pada posisi bagian bawa dengan mata jaring berukuran paling kecil diberi warna hitam, pada posisi bagian paling atas diberi warna hijau tua, dan bagian atas diberi warna putih. Pada bagian paling atas umumnya diracik berwarna hitam atau hijau tua dengan satu asumsi, bahwa kedua warna disebutkan tidak mudah terdeteksi ikan atau biota laut yang menjadi sasaran tangkap.

Selain alasan disebutkan sebelumnya, pewarnaan terhadap jala dengan cara bervariasi dituangkan pula alasan lain, yaitu dalam melihat dan memandangnya. Tetapi dari sekian penggambaran alasan terungkap sebelumnya, yang menjadi terpenting dari alasan mewarnai secara bervariasi terhadap alat tangkap jala dimaksud adalah menjadi sebuah cara untuk menjaga lamanya alat dimaksud bisa bertahan digunakan atau dikatakan agar selalu awet, juga menjadi sebuah taktik yang dilakukan para nelayan dalam berusaha menyiasati agar ikan tidak berada pada posisi takut mendekati alat tersebut oleh karena jaring terlalu terang terlihat. Usaha menjaga ketahanan dan keuletan sebuah alat tangkap yang disebut jala, menurut masyarakat pengguna ham-

pir setiap tahun terutama saat nelayan berada pada kondisi tidak melaut atau memasuki masa rawan melaut, alat tangkap dimaksud diperbaharui dengan cara merebus dalam sebuah drum. Saat merebus, air yang digunakan dan berada dalam drum dimasukkan kulit kayu yang berfungsi sebagai pewarna sekaligus perekat benang-benang jaring yang sudah mulai terlihat kurang menyatu.

Cara seperti ini dapat dilakukan berulang-ulang sebelum alat tangkap jala rusak atau sama sekali tidak dapat lagi digunakan untuk mencari ikan sebagaimana kelayakannya. Selain cara perawatan seperti merebus sebagaimana digambarkan sebelumnya, perawatan alat tangkap yang disebut jala juga dilakukan dengan cara menambal atau menyirat jaring yang terlihat robek. Pemeliharaan satu unit alat pemeliharaan juga dilakukan setiap kali habis dipakai melaut dilakukan pembersihan dengan cara melepas kotoran yang melekat pada jaring, termasuk menyiratnya jika sehabis dipakai ada yang sobek.

Strategi mengoperasikan sebuah alat tangkap jala, dilalui dengan beberapa tahapan, dan pengoperasiannya pun dilaksanakan secara berkelompok, yaitu menggunakan seorang ponggawa laut atau disebut juga dengan istilah *juragang*, dibantu satu atau dua orang anggotanya yang berstatus sebagai *sawi*, namun tidak tertampik terkadang dalam mengoperasikan alat tangkap jala hanya menggunakan satu orang *juragang* dan satu orang. Artinya, ketika dua orang tidak memungkinkan, dalam hal ini tidak bisa hadir sebagai tenaga kerja, maka sang juragan hanya ditemani satu orang *sawi*. Sedangkan orang-orang yang umumnya dilibatkan sebagai *sawi*, adalah dari kalangan keluarga dekat dari seorang juragan atau minimal dari kalangan tetangga. Karena sesuai fakta lapangan menunjukkan, bahwa masyarakat nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya, terkhusus ketika alat tangkap yang digunakan dilaksanakan secara kelompok, maka saat ini-

lah yang dikatakan kegiatannya berlangsung secara kekeluargaan. Adapun alasan melibatkan kalangan keluarga atyau minimal tetangga dalam beraktivitas pada prinsipnya yang bersangkutan tidak susah dikontrol dan segalanya mudah diatur.

Dalam mengoperasikan alat tangkap jala, rompong menjadi salah satu yang menjadi pendukung utama, bahkan dapat dikatakan rompongg menjadi suatu wujud yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, ketika nelayan menggunakan jala sebagai alat tangkap, yang mesti dijadikan sasaran atau area tangkap adalah tempat pemasangan atau penempatan rompongg. Hanya saja, bagi nelayan pengguna alat tangkap jala, klasifikasi rompong yang digunakan sebagai area menebar jala adalah kategori rompong berukuran kecil, termasuk penempatannya tidak jauh keluar, bahkan umumnya menjadi milik sendiri para nelayan pengguna alat tangkap jala, dan walaupun bukan miliknya umumnya milik keluarga mereka dan dikatakan tidak seperti rompong yang dirancang khusus untuk area pemasangan atau melingkar pukot besar yang disebut gae atau pukot cincing yang juga menjadi salah satu dari sekian banyak alat tangkap nelayan, dengan ukuran besaran minimal besarnya sama dengan ukuran tripleks, yaitu 120 cm × 210 cm dan kalau rumpon untuk alat tangkap jala umumnya ukuran besarnya berkisar satu meter persegi, dengan kedalaman laut yang menjadi sasaran pemasangan adalah berkisar antara 8-15 meter dan dirancang awalnya dari bahan bambu lalu berubah menggunakan bahan gabus.

Bagi nelayan pengguna alat tangkap jala, keterkaitannya dengan perihal memasarkan atau mendistribusikan hasil tangkapannya pada intinya tidak ditujukan langsung kepada konsumsi iakan dan biota laut lainnya, melainkan hasil tangkapan yang mereka peroleh atau dapat didistribusikan langsung kepada pedagang pengumpul dengan sistem partai, artinya seluruh ha-

sil tangkapan langsung dijual ke pedagang, termasuk ketika alat tangkap yang digunakan mencari nafkah, maka hasil tangkapan seluruhnya diserahkan kepada pemodal, nanti pemodallah yang mendistribusikan ke pembeli lainnya. Namun ketika alat tangkap jala yang digunakan sudah menjadi milik Sebagaimana diinformasikan, bahwa alat tangkap berupa jala ada sudah menjadi milik snelayan bersangkutan, maka hasil tangkapanyang ada di Pare-pare maupun di pasar-pasar tradisional yang ditemukan di Kota pinrang, Sidenreng Rappang dan di Kabupaten Barru.

Terkait dengan perhitungan pendapatan bagi nelayan pengguna alat tangkap jala, sebenarnya berani jika dikatakan tidak berbeda ketika nelayan berada pada posisi sebagai pengguna alat tangkap lainnya, khususnya yang sistem aktivitasnya juga berlangsung secara berkelompok (kelompok kerja), yaitu selalu berdasar pada tiga komponen yang mendapat bagian, yaitu pertama kelompok pemilik modal atau pemilik alat tangkap yang umum disebut dengan istilah *pongawa darat*, yang kedua adalah terhadap para nelayan atau pekerja yang berada pada posisi pengendali atau *pongawa* dalam satu kelompok kerja, yaitu lazim dengan sebutan juragan atau *pongawa laut*. Sedangkan kelompok yang ketiga yang turut serta mendapatkan upah adalah kelompok orang yang berada pada posisi pekerja yang sebenarnya yang mana populer dengan sebutan *sawi*.

Ketiga komponen yang digolongkan menjadi penerima upah dikatakan hadir dalam nuansa berpenghasilan yang berbeda jauh jumlah secara signifikan. Artinya, pembagian mengenai upah kerja dari tiga komponen yang berada pada posisi sebagai penerima upah tidak berlangsung secara perhitungan ratio, dimana seorang yang berstatus sebagai juragan dan *sawi* menerima upah kerja sesuai yang telah menjadi kesepakatan dengan pemodal atau pemilik usaha, walau sebenarnya ketentuan pembagian

upah tidak berbeda dengan apa yang ada pada masyarakat nelayan yang bermukim di daerah-daerah lain, yaitu satu bagian untuk para sawi dan dua bagian untuk para juragan. Perhitungan upah yang menjadi penghasilan para juragan dan para sawi diketahui setelah seluruh biaya operasional setiap kali melaut dikeluarkan. Sistem pembayaran upah kerja yang diterima para juragan dan sawi sebagaimana yang ditemukan atau diinformasikan masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap jala di Sumpang Minangae pada prinsipnya tidak diserahkan setiap kali turut serta melaut, tetapi umumnya pembayaran upah kerja dilangsungkan rata 2 kali sebulan dan biasa juga terjadi sekali sebulan, tergantung kondisi hasil tangkapan setiap kali melaut lebih cepat dibayar, tetapi sebaliknya ketika bulan berjalan setiap kali melaut kurang yang didapat, maka upah penghasilan diterima juga bisa lambat.

Kesemua bentuk penerimaan upah para pekerja, khusus terhadap nelayan pengguna alat tangkap jala yang tidak dibayar secara langsung dengan alasan agar para pekerja bisa menikmati hasil kerjanya dengan menerima upah dalam jumlah besar sesuai sehari kerja yang tersimpan, yaitu 2-3 tiga minggu baru diterima. Sorang pekerja yang popukler dengan nama nelayan, termasuk pengguna alat tangkap jala, setiap kali melaut kalau bulan yang dihadapi itu musim ikan, maka mereka setiap kali melaut mendapat bagian berupa ikan yang tidak mungkin dapat dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi sehari. Dan pembagian sehari-hari inilah yang umumnya dijual sebahagian dalam rangka mengusahakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang setiap harinya mesti terpenuhi. Tetapi kalau para nelayan tidak berada pada kondisi dimana ikan dan biopla laut lainnya susah didapat, maka pada kondisi seperti inilah nelayan membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari para kelaurganya. Keadaan

seperti ini umumnya mengantar masyarakat pada suatu bentuk kehidupan yang dikatakan tidak mampu. Usaha memperlihatkan dan memperkenalkan alat tangkap jala dimaksud, perhatikan gambar berikut.



Foto 6. Alat Tangkap Nelayan “Jala”

Gambar yang tampak di atas adalah seorang nelayan yang berada pada posisi mencari ikan dengan menggunakan jala. Pada prinsipnya penggunaan peralatan yang disebut jala tidak mesti dilakukan pada area yang jauh ke luar, tetapi alat tangkap ini dapat digunakan pada area pesisir seperti yang tampak pada gambar di atas di mana nelayan sedang melempar jalanya yang terkonsentrasi pada area pesisir.

Pukat atau Jaring Biasa

Sama halnya seperti dikatakan terkait dengan alat tangkap jala biasa, kehadirannya sebagai alat tangkap dapat ditemukan tidak hanya pada kalangan masyarakat yang beraktivitas sebagai nelayan, khususnya nelayan yang menjadikan laut sebagai sarana atau ruang produksi, tetapi sungai dan danau juga menjadi area yang dijadikan sarana penangkapan, bahkan pukat yang disebut juga jaring biasa dikatakan mudah didapat pada semua lapisan masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang mana wilayah

tempat tinggalnya tidak jauh dari area keberadaan aliran sungai. Pukat atau yang lazim disebut jaring biasa bukan merupakan sebuah alat tangkap yang menjadi spesifik penggunaannya dalam satu wilayah persebaran masyarakat, tetapi alat tangkap yang disebut pukat biasa merupakan sebuah alat tangkap yang berlaku umum, dan khusus di lingkungan masyarakat nelayan pengguna laut sebagai area tangkap, termasuk yang ditemukan di Sumpang Minangae rata-rata dalam sebuah rumah tangga memiliki alat tangkap dimaksud.

Pukat atau jaring biasa dalam posisinya sebagai alat tangkap dirancang pembuatannya dengan menggunakan bahan baku utamanya adalah tasi, artinya bahana baku pembuatan khusus jaringnya adalah dari tasi, dengan sistem disirat dalam bentuk jaring yang panjang dan lebar atau kedalamannya tercebur ke dalam air umumnya selalu disesuaikan dengan penggunaannya. Tetapi yang umum ditemukan pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah yang dikenal dengan nama Sumpang Minangae, ada yang mencapai panjang dengan ukuran lebih kurang 500 meter dengan lebar yang diidentikkan dengan kedalaman tercebur ke laut ada yang mencapai lebih kurang 2,5-3 meter, termasuk ada jaring yang dirancang dengan ukuran panjang lebih kurang 200 meter dengan lebar yang tercebur ke dalam air 1,5 meter. Satu unit pukat biasa dibangun dengan dilengkapi beberapa komponen yang terdiri dari alat pelampung, alat pemberat dan tali bentangan.

Satu unit pukat biasa dilengkapi dengan alat pelampung sebagaimana yang ditemukan di dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan Bugis di Sumpang Minangae, umumnya terbuat dari tiga wujud bahan baku, yaitu ada pelampung yang terbuat dari sayatan karet yang bahannya sama dengan karet sandal jepit. Alat pelampung ini dirancang dengan model sayatan bundar

melingkar dengan diameter rata-rata 7 cm, ada pelampung yang dirancang dari bahan baku kayu yang dibentuk dengan model bulat lonjong yang di tengahnya terlihat berlubang sebagai tempat memasukkan tali bentangan. Sedangkan bahan baku pelampung lainnya adalah dirancang dari bahan baku plastik yang wujudnya sebuah bola plastik berukuran kecil seperti ukuran besaran bola tenis. Satu unit pukat biasa ukuran mata jaringnya juga dirancang bervariasi, sesuai kondisi ikan yang dijadikan sasaran buruan, artinya besar kecilnya mata jaring satu unit pukat biasa, selalu disesuaikan dengan sasaran tangkap, termasuk penyesuaian lokasi kedalaman area operasional. Sebab sebuah pukat biasa dapat digunakan pada sekitar area pesisir pantai, di samping sedikit lebih jauh dari pesisir pantai.

Selain jaring dan pelampung, satu unit pukat biasa dilengkapi pula timah sebagai alat pemberat sehingga jaring tidak mudah terbawa arus. Pembangunan satu unit pukat biasa menggunakan timah dalam jumlah besar, umum besaran ukuran timah dirancang menyerupai lempengan butiran kecil, sekitar besaran butiran jagung. Posisi alat berupa timah ini dipasang pada ujung paling bawah dari sebuah jaring dalam skema berjejer. Termasuk dua buah tali bentangan yang panjangnya masing-masing sedikit lebih panjang dari ukuran panjang jaring. Untuk tali bentangan yang berukuran sebesar jari kelingking orang dewasa ditempatkan pada posisi ujung bagian atas dari jaring. Sedangkan satu tali lainnya yang ditempatkan pada posisi pada ujung paling bawah dari sebuah jaring ukurannya jauh lebih kecil dari tali yang dibentangkan pada bagian atas dari sebuah jaring.

Mengoperasikan satu unit pukat biasa umumnya dilangsungkan seorang diri dan saat nelayan membentangkannya yang bersangkutan menggunakan perahu bisa berukuran kecil dan tidak bermesin, namun tidak tertutup kemungkinannya ada juga

nelayan dalam membentangkan pukut menggunakan perahu bermesin, terutama ketika jarak pengoperasiannya sedikit lebih jauh dari pesisir pantai. Bahkan khusus pukut biasa ketika dioperasikan, terutama yang bentangan panjangnya lebih kurang 200 meter, maka tidak menggunakan pun perahu dapat dioperasikan. yang bisa tidak bermesin terutama ketika area yang dijadikan sasaran membentangkannya adalah daerah pesisir pantai, itupun klasifikasi pukut yang digunakan rata panjangnya cuma mencapai 200 meter dengan kedalaman tercebur ke laut hanya mencapai angka maksimal 1,5 meter. Tetapi ketika klasifikasi pukut biasa yang dibentangkan berukuran panjang seperti dikatakan lebih kurang 500 meter dengan kedalaman tercebur ke laut lebih kurang 2-3 meter, maka pembentangan dilakukan walau tetap seorang diri, tetapi mereka menggunakan perahu bermesin membentangkannya dan lokasi pemasangannya sedikit lebih jauh ke luar.

Jadi pada prinsipnya penggunaan jaring biasa sebagai salah satu alat tangkap yang ditemukan di Lingkungan masyarakat ber-etnis Bugis di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, merupakan salah satu jenis alat tangkap atau mencari nafkah hidup, walau sebenarnya posisinya tidak berada pada suatu tatanan alat tangkap menjadi prioritas mencari nafkah hidup, tetapi sedikit banyaknya dengan kepemilikan alat tangkap yang disebut pukut biasa ketika dioperasikan minimal dapat menuai satu pemenuhan kebutuhan akan konsumsi keluarga bersangkutan. Artinya, ketika pukut dimaksud dioperasikan, minimal hasil tangkapannya dapat menutupi kebutuhan anggota keluarga nelayan bersangkutan akan konsumsi ikan, namun tidak tertutup kemungkinannya ketika suatu waktu hasil tangkapan melimpah, nelayan yang bersangkutan juga melakukan penjualan. Artinya, dengan menggunakan alat tangkap pukut biasa dalam mencari ikan, secara faktual tidak lagi

difungsikan sebagai alat tangkap yang cukup fungsional seperti beberapa alat tangkap lainnya yang memang dioperasikan untuk mencari pendapatan yang lebih, bahkan boleh dikatakan khusus untuk dijual atau didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan akan pasar.

Teknis pengoperasian alat tangkap yang memang cukup populer dengan nama pukat biasa adalah dengan membentangkan secara melebar sesuai panjang jaring. Setelah jaring terbentang, guna memudahkan ikan-ikan yang menjadi sasaran tangkap, nelayan bersangkutan menghalau yang halauannya dimulai agak jauh dari area pembentangan hingga sampai yang bersangkutan merapat dan langsung mengangkat atau mengambil ikan yang terlihat terperangkap dalam jaring, lalu menempatkan ikan-ikan dimaksud pada kantong-kantong penampungan yang telah dipersiapkan. Pemasangan alat tangkap jaring biasa bisak dilakukan secara berpindah-pindah tempat tergantung kecerdikan sipemakai dalam rangka melihat dan memperkirakan kondisi lingkungan laut yang memandai menebar atau membentangkan pukat biasa. Pemasangannya pun boleh dikatakan tidak mengenal waktu, namun yang paling populer dengan alat dimaksud, waktu pemasangannya sore hingga menjelang malam, artinya minimal di saing hari.

Walau dikatakan sebelumnya bahwa dengan penggunaan alat tangkap pukat biasa tidak pada posisi sebagai alat yang mengutamakan lagi hasil tangkapan untuk penjualan, tetapi ketika persoalan semacam ini masih terjadi atau sekarang dikatakan masih menuai hasil yang melimpah saat melakukan kegiatan penangkapan, dengan hasil tangkapannya yang dikatakan beragam ukuran, maka pendistribusiannya dapat dilangsungkan dengan dua cara, yaitu dapat dilakukan dengan cara nelayan bersangkutan menjual langsung ke nelayan pengumpul, di samping dilaku-

kan dengan cara nelayan bersangkutan menjual langsung ke konsumen sebagai pengkonsumsi ikan. Kedua model pendistribusian yang dilakukan oleh nelayan pemakai pukat biasa umumnya dilangsungkan di dermaga yang menjadi tempat mangkal atau mendaratnya nelayan setelah kembali melaut. Bahkan terkadang ketika penjualan ditujukan langsung pemakai atau pengkonsumsi langsung ikan biasanya penjualannya dilangsung di di pasar atau minimal ibu rumah tangga yang membutuhkan ikan datang menemui langsung nelayan yang akan menjual hasil tangkapannya. Umumnya medel atau posisi hasil tangkapan nelayan pengguna alat tangkap pukat biasa dilangsungkan dengan cara mengikat atau *mattole* (Bugis) berdasarkan keseimbangan besar kecilnya ikan dalam satu ikatan. Sebab makin besar ukuran ikan, maka semakin kurang pula jumlahnya yang diberikan dalam satu ikatan.

Menyangkut sistem konsumsi, bagi nelayan pengguna alat tangkap pukat atau jaring biasa sebenarnya sistem konsumsinya dikatakan tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada nelayan pengguna alat tangkap lainnya, terutama alat tangkap yang juga tidak mesti dilakukan dengan cara berkelompok kerja. Ketika kegiatan dilangsungkan menggunakan orang atau tenaga kerja, tentu pembagian hasil atau upah kerja setiap kali melaut tetap mendapat pembagian yang berbeda sesuai dengan posisinya dalam kelompok, walau sebenarnya tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari kalangan kerabat, termasuk ketika yang dilibatkan adalah anak sendiri, yang bersangkutan tetap menerima haknya sebagai pekerja. Tetapi khusus ketika pengoperasian berlangsung seorang diri, maka hasil tangkapan secara prinsip tidak dibagi kepada siapa-siapa. Tetapi untuk menjadikan sistem ini berjalan sesuai koridor, hasil penjualan yang nelayan dapat untuk menyisihkan sebagai simpanan dalam menutupi kebutuhan sewaktu-waktu, yaitu yang sifatnya mendesak atau juga kebutuhan sangat sulit terpenuhi karena jum-

lah cukup banyak, para nelayan bersangkutan selalu berusaha menyisihkan dari hasil penjualan setiap harinya, walau sebenarnya dalam jumlah yang tidak banyak. Namun nelayan bersangkutan tetap menyisahkan sebagian dari hasil penjualan dalam rangka berusaha menjadikan modal kerja setiap kali melaut. Usaha penulis memberi gambaran mengenai alat tangkap yang disebut pukut biasa, perhatikan gambar berikut.



Foto 7. Salah satu alat tangkap nelayan (pukat biasa)

Gambar yang tertera di atas adalah salah satu alat tangkap nelayan yang hingga kini masih digunakan sebagai sarana mencari atau menangkap ikan, yaitu populer dengan nama jaring atau pukut biasa. Alat tangkap jala yang tampak pada gambar di atas berada dalam kondisi tidak digunakan dan kondisinya tersimpan di bawah kolong rumah.

Pancing/Kail

Pancing atau kail merupakan salah satu jenis alat tangkap nelayan yang keberadaannya sebagai alat tangkap cukup terbilang tua dan tergolong cukup populer pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, baik yang menjadikan danau sebagai ruang penyedia ikan sebagai sasaran tangkap utama, terlebih lagi nelayan yang terfokus ke area laut sebagai sebuah ruang menyimpan cukup banyak biota laut, khususnya beragam jenis ikan.

Bahkan dari sisi pemanfaatan alat tangkap yang disebut pancing ini, juga banyak digunakan masyarakat awam yang bukan spesifik sebagai komunitas nelayan mencari sekaligus memburuh ikan yang beragam ukuran besaran. Bahkan tidak jarang alat tangkap yang disebut pancing atau kail ini dijadikan masyarakat umum sebagai ajang menghabiskan waktunya untuk mencari ikan dengan berpatokan pada persoalan penyaluran aspirasi atau kemaran mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap yang disebut pancing.

Pancing atau kail sebenarnya merupakan salah satu alat tangkap nelayan yang sejak dahulu hingga kini bentuk perancangannya sangat sederhana, artinya alat tangkap pancing dari dulu hingga kini tidak mengalami perubahan, terutama terkait dengan penggunaan bahan baku dalam membentuknya dalam satu unit, yaitu alat untuk mengail ikan adalah sebuah alat tangkap yang walau sebenarnya bentuk fisiknya sangat sederhana, tetapi alat tangkap ini tidak bisa dibuat sendiri seperti beberapa alat tangkap lainnya, seperti hal pukot dan beberapa alat tangkap yang terklasifikasi sebagai jaring. Terkait dengan alat penarik atau tali dari sebuah alat tangkap pancing juga tidak pernah berubah, yaitu tetap menggunakan tali sebagai alat tarik. Sedangkan komponen lainnya adalah alat penggulung atau rol tali yang biasa menggunakan kaleng atau batangan kayu, termasuk dibuat dari bahan plastik dan alat dimaksud sudah umum dijual di toko-toko penjual kebutuhan nelayan.

Perihal yang ditemukan mengalami perubahan dari hadirnya pancing sebagai alat tangkap nelayan adalah terkait dengan keterampilan masing-masing nelayan meracik pancing sesuai kebutuhan. Artinya, alat tangkap pancing yang ditemukan dewasa ini, termasuk di lingkungan masyarakat Sumpang Minangae secara fisik terlihat beragam racikan, yaitu ada satu unit pancing di-

racik dengan menggunakan satu mata pancing, ada yang diracik dengan menggunakan 2-3 mata pancing dan ada juga satu unit pancing menggunakan lebih banyak mata pancing, bahkan seperti yang ditemukan di beberapa daerah persebaran masyarakat nelayan ada juga yang dinamakan pancing khusus digunakan untuk mencari gurita dan cumi-cumi, seperti diungkap (Syamsul Bahri, 2007).

Alat tangkap pancing bagi masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, merupakan salah satu alat tangkap nelayan yang hingga dewasa ini masih menjadi alat tangkap yang diprioritaskan dalam rangka mencari nafkah hidup, artinya pancing hingga dewasa ini masih dijadikan salah satu spesifik yang ditekuni masyarakat nelayan untuk mencari hasil laut, khususnya ikan. Sebagai pengguna alat tangkap yang disebut pancing, dalam melakukan aktivitas pada prinsipnya rata-rata dilaksanakan seorang diri, termasuk waktu pencaharian tergantung pada musim ikan, yaitu bisa dilaksanakan siang maupun malam hari. Dengan lokasi penangkapan tergantung kondisi sarana transportasi yang digunakan. Saat nelayan beroperasi menggunakan perahu bermesin, nelayan bersangkutan dapat menjangkau wilayah tangkapan yang lebih jauh keluar jika dibanding ketika nelayan pengguna alat tangkap pancing hanya menggunakan perahu tidak bermesin, dengan lokasi yang dijadikan sasaran adalah sekitar area pemukiman.

Sebagai nelayan pengguna alat tangkap pancing dalam beraktivitas, pada prinsipnya tidak hanya tertuju pada satu area sebagai sasaran tangkap, tetapi yang bersangkutan dalam beraktivitas dilaksanakan secara berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pemilihan tempat mancing yang dikatakan mendukung adalah sesuai pengetahuan masing-masing nelayan terkait dengan keberadaan ikan. Tetapi area yang tetap menjadi sasar-

an mancing para nelayan adalah sekitar persebaran karang yang diyakininya sebagai area berkembang sekaligus arena bermain. Salah satu cara untuk memancing mudahnya ikan-ikan berkumpul terutama saat beroperasi malam hari, para nelayan melaut menyalakan lampu walau hanya satu mata, sebagaimana yang ditemukan di lingkungan masyarakat Sumpang Minangae ada yang menggunakan petromaks, ada yang menggunakan balon lampu listrik, bahkan ada yang hanya menggunakan lampu yang disebut pelita. Khusus ketika menggunakan pelita, alat penerang dimaksud dilepas mengapung di atas permukaan air dengan menggunakan bahan apung dari racikan gabus.

Saat berlangsung kegiatan penangkapan, untuk menjaga agar semua hasil tangkapan berupa ikan tidak mudah rusak atau busuk, alat penampungan ikan yang dewasa ini umumnya dibuat dari bahan gabus diberi es batu. Diperlukannya upaya mencegah busuk atau rusaknya ikan ini memang sangat diperlukan oleh karena saat memancing hasil tangkap tidak serta merta seperti saat menggunakan alat lainnya. Tetapi ketika menggunakan pancing ikan yang menjadi sasaran terkumpul satu demi satu, sehingga tidak ada kemungkinannya hasil tangkapan dibawa pulang sebelum nelayan bersangkutan kembali dari melaut.

Populernya penggunaan alat tangkap pancing tidak terlepas dari tingkat kemampuan memiliki alat tangkap ini, yaitu perakitannya tergolong dapat dilakukan semua kalangan nelayan, termasuk biaya yang dibutuhkan untuk merancang alat tangkap dimaksud tidak tergolong mahal, boleh dikatakan dapat terjangkau oleh semua golongan masyarakat nelayan, bahkan dikatakannya dianggap mudah mendapat bahan bakunya. Termasuk sistem operasionalnya tidak membutuhkan satu model keterampilan bagi pendukungnya yang mesti dipelajari secara khusus. Tetapi siapa saja dapat mengoperasikannya, mulai dari kalang-

an orang tua sampai tingkat kanak-kanak dapat menggunakan alat tangkap dimaksud. Tidak jarang alat tangkap yang disebut pancing digunakan sekadar iseng, artinya nelayan sambil mengayuh perahu pancing dibawa tetap diturunkan, termasuk ketika mengoperasikan peralatan tangkap lainnya, aktivitas memancing pun dapat digunakan, hanya saja kapasitasnya tidak pada posisi yang memang nelayan bersangkutan spesifik menggunakan alat tangkap pancing mencari nafkah hidup.

Bagi nelayan pengguna alat tangkap pancing, jenis ikan yang didapat, sekaligus dijadikan sasaran tangkap utama adalah ikan berukuran besar, seperti diantaranya ikan cakalang, ikan tongkol, terkadang ikan sunu, dan kerapu. Sebagai nelayan pancing, hasil tangkapannya boleh dikatakan tidak terbilang banyak, yaitu dihitung perekor. Model pendistribusian hasil tangkapan nelayan pengguna alat tangkap pancing umumnya tidak terikat pada pedagang pengumpul atau pengusaha tertentu, tetapi yang bersangkutan terkadang melakukan penjualan kepada pengkonsumsi langsung dan dilangsungkan di dermaga atau di pelelangan ikan. Kalau pun tidak dilakukan penjualan langsung ke konsumen sebagai pengkonsumsi ikan, penjualan ditujukan kepada pedagang pengecer yang biasanya setiap saat siap menunggu datangnya nelayan dari melaut, termasuk nelayan pancing.

Terkait dengan penerapan sistem konsumsi, bagi nelayan pengguna alat tangkap pancing yang bermukim di Sumpang Minangae, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan terhadap anggota keluarganya, nelayan bersangkutan sebelum memasarkan hasil tangkapannya terlebih dahulu menyisihkan secukup hasil tangkapan terutama ketika hasil tangkapan memadai disisihkan. Tetapi ketika hasil tangkapan dikatakan tergolong kurang memadai, semua hasil tangkapan lebih menguntungkan jika dijual habis. Artinya ada saat-saat tertentu nelayan pengguna

alat tangkap pancing lebih memilih menjual secara keseluruhan hasil tangkapan dibanding menyisihkan sebahagian untuk kebutuhan konsumsi.

Biasa setelah penjualan hasil tangkapan barulah sebahagian uang penjualan dibelikan kembali ikan sesuai yang diinginkan. Sebab ada perlakuan spesifik terhadap nelayan pengguna alat tangkap pancing di kelurahan Sumpang Minangae yang mengatakan, bahwa hasil tangkapan lebih senang kalau diuangkan, dengan alasan yang mengemukakan, adalah dengan uang yang didapat langsung dari penjualan hasil tangkapan, selain kemudahan mengaturnya berdasarkan beragam penggunaan atau kebutuhan sehari-hari, juga dengan uang yang diterima dari penjualan jika ada yang tersisa dari pembelian kebutuhan, sisianya dapat disimpan sebagai uang tabungan dalam arti simpanan sementara yang ketika suatu waktu yang bersangkutan tidak dalam kondisi siap melaut, baik karena cuaca tidak berada pada posisi mendukung untuk melaut, maupun ketika nelayan bersangkutan tengah tidak punya kemampuan seperti halnya sakit sehingga tidak melaut. Usaha melihat kondisi sebuah alat tangkap yang disebut pukat atau jaring biasa, perhatikan gambar berikut.



Foto 8. Nelayan Pengguna pancing

Gambar di atas memperlihatkan beberapa nelayan menyebarkan alat tangkap dalam rangka mencari biota laut dengan menggunakan alat tangkap yang populer dengan pancing/kail.

Bunre

Bunre yang diketahui sebagai salah satu suku kata yang terungkap dalam bahasa Bugis, merupakan salah satu jenis alat tangkap nelayan yang ditemukan bermukim di wilayah Kelurahan Sumpang Minangae. Sebagai salah satu jenis alat tangkap nelayan, alat tangkap bunre dikatakan terbilang di antara beberapa jenis alat tangkap yang digunakan nelayan Bugis yang bermukim di Sumpang Minangae. Tetapi ketika mencermati fakta yang ditemukan di lapangan yaitu dikaitkan dengan alat tangkap bunre justru dikatakan menjadi sebuah alat tangkap yang cukup populer, artinya bunre menjadi salah satu alat tangkap yang cukup digemari masyarakat setempat untuk mencari nafkah.

Kegemaran masyarakat nelayan setempat menggunakan alat tangkap yang disebutnya bunre, menurutnya dilatari beberapa faktor, mulai dari faktor yang erat keterkaitannya dengan kemudahan-kemudahan, seperti dirasakan kemudahan memperoleh atau mengadakan salah satu penunjang utama dari alat tangkap dimaksud, yaitu sarana penerang berupa kumpulan beberapa buah balon lampu listrik yang dirancang menjadi satu dalam satu wadah. Artinya, bahan baku dari alat penerang ini mudah ditemukan, oleh karena balon lampu dewasa ini tersedia dimana-mana, termasuk merancangnyanya dalam satu wadah dikatakan sesuatu yang tidak sulit oleh karena wadah dimaksud hanya terbuat dari bilahan papan yang difungsikan sebagai ruang memasang sekaligus menata posisi balon lampu masing-masing. Kemudahan lain yang ditemukan dengan menggunakan alat tangkap yang disebut bunre, harga beli dari satu unit alat penerang sebagai sarana uta-

ma dioperasikannya alat ini dikatakan dapat terjangkau oleh masyarakat nelayan, termasuk sarana pendukung lainnya, yaitu sebuah perahu bermesin, termasuk sumber tenaga listrik (genset).

Terbangunnya satu unit alat tangkap yang populer dengan sebutan *bunre* di kalangan masyarakat nelayan, khususnya yang ditemukan di lingkungan masyarakat nelayan di Kelurahan Sumpang Minangae adalah serangkaian kumpulan beberapa komponen yang boleh dikatakan menjadi satu kesatuan, seperti perahu motor, alat penerang (lampu) sebagaimana terungkap sebelumnya, genset atau generator, serta jaring yang diberi gagan. Perahu motor yang menjadi satu komponen yang saling terkait dalam rangka mengoperasikan alat tangkap yang disebut *bunre*, secara faktual berfungsi sebagai sarana transportasi. Artinya, perahu motor menjadi satu kebutuhan vital dalam rangka meraih kesuksesan saat melakukan kegiatan pencaharian, sekaligus penangkapan. Sebab dengan perahu motor nelayan dapat menjangkau area atau lokasi mana saja, tergantung dari kondisi dimana nelayan anggap cocok atau tetap mencari nafkah dengan menggunakan peralatan dimaksud alat tangkap *bunre*, bahkan perahu motor bagi nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, merupakan suatu perlengkapan yang dikatakan mutlak adanya oleh karena perahu motor dimaksud hadir sebagai sebuah komponen yang tak dapat dipisahkan, dalam hal ini perahu motor menjadi tempat atau area menempatkan lampu dan perlengkapan nelayan lainnya, termasuk menjadi sarana nelayan saat menyisir area keberadaan ikan buruan dengan menggunakan jaring yang dibentuk persegi tiga.

Selain perahu sebagai sarana transportasi, genset atau generator juga menjadi satu kebutuhan vital oleh karena sarana atau alat dimaksud menjadi pencipta atau melahirkan tenaga listrik untuk menyalakan balon-balon lampu yang berfungsi sebagai alat penerang guna memancing ikan yang menjadi sasar-

an buruan agar lebih mudah mendekat, bahkan masuk ke dalam jaring. Sebab dengan cahaya lampu yang cukup terang, menurut informasi masyarakat pengguna dikatakannya ketika musim ikan betul-betul lagi tiba ikan-ikan yang menjadi buruan tidak lagi terperangkap pada jaring, tetapi ikan-ikan tersebut langsung masuk atau melompat dengan sendirinya ke dalam perahu yang digunakan melaut. Menurut informasi nelayan setempat terjadinya kondisi ikan seperti ini oleh karena selain ikan memang cukup melimpah oleh karena memang lagi musim, juga cahaya lampu cukup terang dan seakan ikan lagi terbius dengan cahaya dan panasnya terik lampu.

Kondisi *bunre* sebagai sebuah alat tangkap masyarakat nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae, pada prinsipnya terbangun dengan komponen-komponen yang terdiri dari sebuah perahu motor berukuran sedang, sebuah generator yang difungsikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik untuk menyalakan lampu sebagai wadah memancing ikan yang menjadi sasaran buruan agar lebih mudah mendekat sekaligus masuk ke dalam jaring sebagai perangkap. Adapun balon lampu yang digunakan dalam rangka membangun satu unit alat tangkap yang disebut *bunre*=bahasa Bugis jumlahnya sekitar 32 buah diatur berjejer dalam satu wadah yang telah dirancang sebelumnya dengan kapasitas satu mata balon antara 15-20 watt. Satu unit alat tangkap yang disebut *bunre*, juga diperlengkapi sebuah jaring yang dirancang berbentuk segi tiga sama sisi dengan ukuran masing-masing sisinya antara 1,5-2,00 meter dan diberi bentangan masing-masing sisinya guna mengencangkan posisi bentangan jaring yang terbuat dari bahan bambu atau rotan, termasuk gagang yang dipegang nelayan saat dioperasikan. Untuk melihat satu unit alat tangkap yang disebut *bunre*, penulis menyuguhkan dua buah gambar yang tertera seperti berikut.



Foto 9. Sarana Transportasi



Foto 10. Alat Penerang

Gambar yang tampak di atas adalah satu unit peralatan alat tangkap nelayan yang disebut *bunre*. Pada gambar 10 tampak sarana transportasi yang digunakan melaut dan dilengkapi jaring sebagai alat menjaring jenis ikan buruan. Sedangkan pada gambar 10 juga tampak sebuah komponen alat tangkap *bunre*, yaitu sebuah alat penerang yang terdiri dari beberapa buah balon lampu yang racik sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah alat penerang yang kompleks.

Masyarakat nelayan yang ketika beraktivitas menggunakan alat tangkap *bunre*, waktu beraktivitasnya dilangsungkan pada malam hari, yang mana menurut informasi masyarakat nelayan setempat berlangsung dari sekitar pukul 19.00 hingga menjelang pagi hari, yaitu sekitar jam 5.00 subuh hari. Bagi nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, saat beraktivitas umumnya berlangsung secara kelompok kerja, dengan jumlah personil adalah bisa mencapai tiga orang, namun tidak tertutup kemungkinannya hanya menggunakan dua orang, dengan tugas masing-masing adalah satu orang mengontrol nyala lampu, satu orang jurumudi dan satu orang lainnya adalah memegang jaring. Khusus jurumudi dan pengatur nyala lampun bisa dilakukan hanya satu orang.

Menurut informasi masyarakat nelayan setempat, alat tangkap *bunre* saat dilangsungkannya penelitian, dikatakannya

merupakan alat tangkap walau berwujud baru dalam lingkungan masyarakat setempat tetapi alat tangkap dimaksud justru menjadi alat tangkap yang populer di antara beberapa alat tangkap lainnya. Menurut penggunaanya, dikatakannya sebagai alat tangkap populer dewasa ini oleh karena banyak hal yang dapat dijadikan ukuran dalam rangka memprioritaskan alat dimaksud. Misalnya alat tangkap ini pengadaannya dikatakan tergolong cukup murah. Misalnya perahu yang digunakan tidak berukuran begitu besar, yaitu sekitar panjang sekitar 4,00 meter dan lebar antara 80 cm-1,00 meter atau seperti perahu lepa-lepa=bahasa Bugis, lampu penerang yang digunakan bentuk sederhana, dalam artian nelayan dapat merancang sendiri, begitupula jaring yang digunakan tidak memerlukan biaya yang cukup besar.

Selain kemudahan terkait dengan pengadaan komponen-komponen yang disebutkan, mengoperasikan alat tangkap bun-re boleh dikatakan tidak mengenal musim oleh karena area yang dijadikan sasaran tangkap atau mencari tidak hanya terpaku pada area sekitar wilayah perairan Sumpang Minangae, tetapi nelayan dapat mencari area tangkap lebih jauh, menurut nelayan setempat mereka beraktivitas terkadang sampai di daerah perairan Baruru dan Pangkep. Sebab ikan yang menjadi sasaran buruan, yaitu ikan mairo, bete-bete dan layang kecil musimnya tidak bersamaan. Termasuk teknis penangkapannya tidak sukar, nelayan cukup menyusuri area pesisir dengan menggunakan perahu motornya sambil menyalakan lampu penerang, ikan-ikan yang menjadi sasaran buruan dengan mudah mendekat, artinya nelayan tidak perlu bersusah payah menempuh area tertentu lalu memasang alat tangkap yang digunakan, tetapi cukup berjalan menyusuri area pesisir mereka sudah mendapat ikan yang menjadi sasaran tangkap.

Terkait dengan pendistribusian hasil tangkapan yang mana

ketika musim ikan buruan berlangsung dalam semalam beroperasi bisa mencapai hasil tangkapan bisa mencapai sekitar 12 basket atau keranjang, namun ketika kondisi tidak berada pada musim ikan nelayan sama sekali tidak dapat melihat ikan, bahkan untuk kegiatan konsumsi keluarga boleh dikatakan tidak dapat terpenuhi sama sekali. Bentuk pendistribusian hasil tangkapan nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, pada prinsipnya tidak dilakukan penjualan secara langsung kepada konsumen sebagai pemakai, tetapi umumnya dilakukan dengan menjualnya ke pedagang pengumpul yang memang sudah menjadi sasaran penjualan sebelumnya, dengan cara menjual secara partai atau borongan. Artinya, nelayan setelah kembali melaut yaitu di pagi hari langsung menuju dermaga dimana tempat yang dijadikan berlabuh setiap kali melaut, ditempat inilah dilangsungkan transaksi jual beli.

Hasil tangkapan yang dijual umumnya setelah dikeluarkan jatah untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari para nelayan yang turut serta terlibat setiap kali kelaut, baik jatah harian para punggawa maupun jatah bagi para sawi. Bagi nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, model penjualan hasil tangkapan bisa dilangsungkan dengan dua cara, terutama ketika ikan yang menjadi sasaran lagi musim. Cara pertama yang menjadi umum dilakukan adalah menjual ikan hasil tangkapan dalam kondisi basah, artinya langsung dipasarkan saat nelayan pulang melaut. Sedangkan cara yang kedua mendistribusikan hasil tangkapan nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, adalah ikan hasil tangkapan dijual dalam kondisi sudah dikeringkan terlebih dahulu, artinya ikan hasil tangkapan terlebih dahulu dijemur para pemiliknya untuk kemudian dipasarkan. Menurut informasi para nelayan yang terlibat sebagai pengguna alat tangkap *bunre*, sebenarnya penjualan dengan kondisi ikan terlebih dahulu dikeringkan harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan ikan dalam kondisi basah. Hanya saja, keti-

ka ikan terlebih dahulu dikeringkan, nelayan memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan uang, padahal banyak kebutuhan keluarga sehari-sehari yang mendesak mesti terpenuhi.

Jadi kedua pilihan cara memasarkan hasil tangkapan nelayan pengguna alat tangkap *bunre*, pada prinsipnya menuai dua kontroversi yang perlu diperhitungkan sebagaimana terungkap dalam penggambaran sebelumnya, yaitu satu sisi harga jual lebih mahal ketika hasil tangkapan terlebih dahulu dikeringkan, tetapi kendalanya nelayan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapat uang oleh karena waktu pengeringan ikan hasil tangkapan bisa berlangsung satu hingga dua hari perhitungan maksimal ketika kondisi cuaca mendukung dan 3-4 empat hari ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Bahkan ketika kondisi cuaca berada dalam posisi kurang menguntungkan untuk aktivitas pengeringan, tidak tertutup kemungkinannya ikan-ikan terancam kurang berkualitas, dalam artian harga jual kurang menguntungkan oleh karena kondisi ikan dianggap kurang baik, termasuk sistem kerja pengeringannya juga tergolong rumit oleh karena yang bersangkutan ketika datang hujan langsung mengumpulkan ikan yang berada dalam tebaran dan kembali mengeringkan pada saat sinar matahari membaik lagi.

Terkait dengan pola konsumsi, bagi masyarakat nelayan pengguna alat tangkap *bunre* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama nelayan yang berada dalam posisi sebagai *pongga-wa laut* (juragan) dan pekerja kebanyakan (*sawi*) mendapatkan hasil atau upah kerja sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan pengguna alat tangkap lainnya yang juga sistem kerjanya berlangsung secara kelompok kerja. Menurut informasi nelayan setempat, sebenarnya upah kerja yang mereka dapat dari melaut bersumber dari dua momen, yaitu momen pertama didapat dari hasil setiap kali melaut. Hanya

saja hasil yang didapat dari momen seperti ini dalam bentuk barang atau ikan sebagai hasil tangkapan dan jumlah besarnya tidak ada standar, tetapi pembagian yang mereka dapat selalu diperhitungkan kondisi besaran hasil tangkapan setiap kali melaut. Bagi masyarakat nelayan, pembagian semacam ini ketika memadai untuk untuk dijual sebahagian mereka melakukan penjualan setelah menyisihkan untuk kebutuhan konsumsi dalam rumah tangganya. Tetapi ketika tidak memungkinkan untuk dijual seluruh jatahnya dibawa pulang ke rumah. Jadi sebenarnya jatah sehari dari melaut inilah yang dijadikan masyarakat nelayan sebagai ajang menutupi kebutuhan hidup sehari hari. Itulah sebabnya ketika nelayan berada dalam kondisi tidak atau kurang menguntungkan selama melaut, maka nelayan umumnya sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sedangkan penghasilan lainnya yang dikatakan sisfatnya menetap adalah momen yang didapat dari setiap kali melaut, namun diterima dalam jangka waktu, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara pemilik modal dengan para pekerja. Perhitungan upah dimaksud setiap harinya dikumpulkan dan diterima bisa dua kali sebulan paling cepat. Upah seperti dimaksud setiap kali melaut dihitung dengan perbandingan 3:1, artinya pemilik peralatan kerja mendapatkan hasil tiga bagian dan para pekerja mendapat satu bagian. Misalnya setiap kali pulang melaut hasil penjualan yang dilakukan oleh pemilik usaha dicatat berapa bagian yang mesti diterima para pekerja. Hasil inilah yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu untuk diterima kemudian, dengan perbandingan ketika hasil penjualan mencapai nilai jual satu juta rupiah bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, berarti para pekerja mendapatkan 250 ribu rupiah dan 750 ribu yang didapat para pemilik. Dari 250 ribu rupiah yang menjadi jatah para pekerja sebenarnya masih dibagi lagi, dengan ketentuan

para juragan atau ponggawa laut berhak mendapatkan dua bagian dan para sawi mendapat satu bagian. Sehingga ketika 250 ribu rupiah yang menjadi hak para nelayan, berarti juragan mendapat dua bagian dan para sawi mendapat satu bagian.

Jadi diumpamakan ketika upah kerja yang menjadi hak khusus untuk para pekerja Rp250.000,- dengan jumlah sawi dua orang, maka Rp250.000,- dibagi empat berarti dua bagian didapat juragan dan masing-masing sawi mendapat satu bagian. Tetapi ketika jumlah sawi yang dilibatkan dalam satu kelompok kerja pengguna alat tangkap bunre hanya satu orang, maka upah cukup dibagi tiga tetapi tetap juragan mendapatkan dua bagian. Misalnya ketika menggunakan sawi dua orang berarti Rp250.000,- dibagi empat berarti masing-masing sawi mendapat Rp62.000,- dan juragan mendapat Rp125.000,-. Lain halnya ketika dalam beraktivitas hanya melibatkan satu orang sawi, berarti Rp250.000,- dibagi tiga, yaitu sawi mendapat Rp83.333,33 dan juragan mendapat upah kerja Rp. 166.666,67.

Jadi dengan mencermati perbandingan penghasilan yang didapat para pekerja, terutama para sawi, pada prinsipnya memang dapat dikatakan jauh dari harapan untuk mengubah pola hidup para nelayan kebanyakan ke arah yang lebih baik. Sebab penghasilan yang didapat dari setiap kali melaut tetap didominasi oleh pihak penguasa, dalam hal ini para pemilik modal usaha. Kondisi perbandingan penghasilan seperti inilah yang memperkuat sehingga posisi para pekerjaan di sektor kenelayan, baik para juragan terlebih para sawi yang terlihat tidak bisa terlepas dari himpitan jeritan hidup dalam kekurangan, bahkan hidupnya diidentikkan dengan kemiskinan. Sebab mereka bekerja sebenarnya hanya sebatas mencari sesuap makan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi secara umum waktu yang dimanfaatkan untuk melaut, khususnya momen meraih hasil mak-

simal boleh dikatakan lebih sedikit dibanding dengan masa-masa tidak dapat melaut. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada masyarakat nelayan yang spesifik menggunakan alat tangkap yang disebut *bunre*, tetapi berlaku secara umum di kalangan masyarakat nelayan, terutama yang masih berorientasi pada penggunaan peralatan yang secukupnya.

Terkait dengan nelayan pengguna alat tangkap khusus *bunre*, ada satu bentuk kegiatan yang juga menjadi bagian terpenting dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, adalah aktivitas penjemuran ikan sebagai hasil tangkapan. Kegiatan semacam ini umumnya dilakukan ketika hasil tangkapan dianggap melimpah, namun tidak tertutup kemungkinannya ada nelayan yang tetap melakukan pengeringan tidak hanya ketika hasil tangkapan melimpah, tetapi berapa pun hasil tangkapan dianggapnya lebih menguntungkan ketika dijual dalam kondisi dikeringkan terlebih dahulu, artinya hasil tangkapan dijual dalam bentuk ikan kering. Aktivitas penjemuran ikan sebagai dimaksud dilaksanakan pada area atau kantong-kantong di area pemukiman yang terlihat kosong, termasuk di area sepanjang pesisir pantai yang terlihat sudah dalam kondisi ditembok.

Model pengeringan ikan yang dihasilkan saat melaut nelayan pengguna alat tangkap *bunre* dilaksanakan dengan menebar pada sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang dipipih dengan dua batang bambu sebelah kiri kanannya, sekaligus menjadi gagang atau pegangan saat lantai jemuran itu diangkat. Selain dari anyaman bambu, lantai jemur ada juga yang terbuat dari jaring berwarna hitam yang kedua sisinya diberi penyangga, tyeramsuk ada lantai pengeringan yang terbuat dari bahan besi, cuma ketika menggunakan rang dari bahan besi tentu tidak dapat bertahan lama oleh karena tidak tahan dari tingkat keasaman air garam yang cukup mudah memberi karat

pada bahan besi. Lama pengeringan sebenarnya sangat ditentukan kondisi cuaca, artinya pengeringannya lebih cepat bisa hanya dua hari ketika terik matahari memungkinkan dan sebaliknya bisa pengeringannya lebih lama ketika berada dalam kondisi musim hujan.

Bahkan ketika musim hujan pengeringan memerlukan kegiatan ekstra, yakni selalu menjaga datangnya terik matahari untuk menjemur kembali dan memungut kembali setelah hujan turun. Hanya saja waktu memungut kembali ikan-ikan yang dijemur, pemilik bersangkutan tidak perlu membawanya pulang ke rumah, tetapi cukup menyusunnya pada area yang sudah dirancang sebelumnya. Bentuk atau model pengeringan ikan hasil tangkapan, khusus ikan maero dan bete-bete yang didapat nelayan pengguna alat tangkap bunre, ada yang dilakukan dengan menempatkan rangka-rangka jemuran yang sudah dirancang dalam suatu lokasi dan ada pula yang dilakukan dengan cara meletakkan atau menyandarkan dengan posisi berdiri miring pada tembok-tembok pinggir pantai. Untuk melihat kondisi pengeringan ikan hasil tangkap dimaksud, perhatikan gambar berikut.



Foto 11. Model Pengeringan Ikan

Gambar yang tampak di atas menunjukkan model pengeringan ikan hasil tangkapan yang dilakukan nelayan, khususnya nelayan pengguna alat tangkap bunre di Kelurahan Sumpang

Minangae. Gambar juga di atas memperlihatkan beberapa orang nelayan sedang mengontrol ikan-ikan yang sedang diemur, ada yang berada dalam posisi membolak balik dan juga yang berada pada posisi memindahkan posisi jemuran.

Bagi masyarakat nelayan yang bermukim di Kelurahan Sumpang Minangae, berdasarkan pantauan, dalam beraktivitas mencari nafkah hidup, pada prinsipnya tidak hanya memfokuskan perhatian pada kegiatan penangkapan atau pemburuan beragam biota laut. Tetapi ada sebahagian masyarakat nelayan setempat juga berada pada kondisi mengembangkan usaha pada sektor lain. Namun sektor lain dimaksud, ada sebahagian masyarakat yang memang menjadikannya sebagai usaha sampingan dan ada pula sebahagian masyarakat yang memang melihat usaha dimaksud sebagai usaha pokok atau telah menjadi usaha prioritas atau andalan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil pantauan sekaligus menjadi informasi masyarakat nelayan setempat, ada satu jenis usaha yang sebenarnya tidak berada pada kategori usaha pencaharian hasil laut, yaitu usaha pembudidayaan tanaman rumput laut, yang memang diketahui dewasa ini menjadi salah satu tanaman yang bernilai jual cukup tinggi, bahkan sudah tergolong sebagai tanaman berataraf ekspor.

Walau sebenarnya jenis usaha yang digeluti masyarakat setempat dikatakan bukan mencari biota laut, tetapi yang bersangkutan tetap menjadikan lingkungan alam laut sebagai ruang area pengembangan, yaitu dengan memfokuskan perhatian pada area pesisir. Bahkan model usaha yang dikatakan membudidayakan tanaman rumput laut dimaksudkan itu, dalam usaha pengembangannya menjadikan area pesisir sebagai momen pengembangan. Kondisi inilah yang memunculkan sehingga dikatakan ada masyarakat nelayan yang menjadikannya sebagai usaha sampingan, di samping ada pula yang menjadikannya sebagai usaha prioritas

atau menjadikannya sebagai mata pencaharian utama dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga.

Khusus pengembangan budidaya rumput laut menurut pantauan, merupakan suatu bentuk kegiatan atau usaha yang diketahui beragam item aktivitasnya, mulai dari tahapan mempersiapkan bibit tanaman, mengikat bibit tanaman pada tali bentangan, membentangkan bibit pada area pesisir pantai, memanen hasil produksi, mengangkut hasil produksi, melepas hasil produksi dari ikatan tali bentangan, memilah-milah hasil produksi, menjemur hasil produksi, hingga pada aktivitas pendistribusian hasil produksi. Melihat item-item kegiatan yang mesti dibagi oleh setiap tenaga kerja, maka item-item disebutkan dominan digeluti oleh kaum perempuan, terutama kaum perempuan usia dewasa dan tidak jarang dalam kegiatan tertentu seperti halnya pengikatan bibit pada tali bentangan, termasuk kegiatan pembersihan hasil produksi yang umumnya melibatkan sang anak.

Jadi khusus terkait dengan aktivitas pembudidayaan tanaman rumput laut, pada prinsipnya prosesnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pengembang jenis tanaman rumput laut yang ada di daerah persebaran lainnya, yang mana proses awalnya dimulai dengan mempersiapkan lahan dengan cara memberi atau memasang tiang sebagai tempat mengikat tali bentangan bibit tanaman. Kayu sebagai tiang tempat mengikat tali bentangan bibit agar dapat tahan lebih lama di air laut dipilihlah kayu bakau dengan jarak setiap tiang diperhitungkan berdasarkan panjang bentang. Sebab satu bentangan bibit tanaman rumput laut umumnya lebih kurang 50 meter. Olehnya itu untuk menjaga agar tanaman tidak mudah tercebur ke laut, maka tiang bentangan terpasang dengan jarak antara 3-4 meter sampai mencukupi bentangan tali yang rata-rata dengan panjang 50 meter.

Sambil mempersiapkan tiang bentangan bibit tanaman

rumput laut yang umumnya dilakukan di di area yang tidak jauh dari tepi pantai, bibit tanaman juga dipersiapkan dengan cara mengikatnya satu persatu pada tali bentangan, dengan jarak antara satu ikatan dengan ikatan lainnya berkisar 30 cm, dan umumnya item pekerjaan dimaksud dilakoni oleh kaum perempuan. Setelah kedua item kegiatan ini siap, yaitu lahan dan bibit tanaman, nelayan bersangkutan dengan menggunakan perahu, baik perahu yang masih menggunakan dayung sebagai pengayuh maupun menggunakan perahu motor mengangkut bibit tanaman dan membentangkannya sesuai jumlah bentangan yang diusahakan masing-masing pemilik. Ketika bibit tanaman sudah terbentang, proses selanjutnya sisa menunggu kapan waktu panen, yang mana rata-rata usia tanam untuk siap panen berkisar 45 hari. Namun sebelum memasuki usia panen ada kegiatan antara yang dinamakan masa pemeliharaan. Tetapi khusus pada kegiatan pemeliharaan tanaman rumput laut, para pemilik cukup melakukan aktivitas mengontrol tanaman jangan sampai tanaman terbawa arus sehingga tanaman lepas dari tiang bentangan, akibatnya tanaman bisa rusak, bahkan tidak jarang tanaman hilang. Sebab reziko sebagai petani tanaman rumput laut, khususnya yang dikembangkan di daerah pantai seperti yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Sumpang Minangae adalah terkait dengan kondisi arus dan gelombang air laut.

Teknis memanen hasil produksi tanaman rumput laut dilaksanakan dengan menarik satu persatu tali bentangan yang berisi tanaman rumput laut langsung ke atas perahu yang digunakan mengangkut hasil panen, lalu mengangkutnya ke dermaga yang memang menjadi tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan. Ketiga rumput laut hasil panen tiba para pemiliknya langsung mengangkat ke area yang memungkinkan untuk melepaskan hasil produksi dari tali ikatan, yang umumnya dilakukan

di kolong rumah masing-masing pemilik atau ketika rumah pemilik tidak memungkinkan hasil panen diangkut ke rumah keluarga atau minimal tertangga yang memungkinkan. Sebab memang untuk melakukan kegiatan melepas hasil panen dari tali ikatan, selain membutuhkan waktu yang cukup lama, yang terpenting harus menggunakan area yang cukup lapang dan tidak mengganggu orang lalu lalang. Dengan persyaratan seperti menuntut para petani tanaman rumput laut hasil panennya dibawa ke rumah masing-masing setelah dilepas terlebih dahulu dari ikatan, bahkan tidak jarang dilakukan pula kegiatan memilih-milah tangkai demi tangkai hasil produksi dimaksud sebelum diangkut ke rumah masing-masing. Setelah hasil produksi dilepas dan dipilah-pilah tangkai demi tangkai barulah hasil produksi diangkut ke rumah masing-masing pemilik untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penjemuran.

Khusus untuk kegiatan penjemuran hasil produksi tanaman rumput laut umumnya dilakukan di area pesisir pantai atau tidak jarang para pemilik menebarnya ke area jalan dengan beralaskan jaring atau tikar dari plastik. Digunakannya alas saat menjemur rumput laut adalah salah satu alasanya adalah membentuk model memudahkan para pemilik untuk menebar dan memungut kembali rumput laut saat tiba saatnya untuk ditebar dan dipungut kembali. Bahkan ketika rumput laut belum kering sesuai yang diharapkan para pemilik, ketika lokasi yang dijadikan sarana menjemur tidak mengganggu aktivitas orang lain, terutama pada area jalan, bagi pemilik tidak perlu memungut dengan cara menggulung bersama alas yang dijadikan tempat mengeringkan, tetapi masing-masing pemilik cukup menggulung alas bersama rumput laut ditempat itu dan tidak perlu mengangkatnya ke rumah, terutama ketika rumput laut masih perlu dikeringkan. Tetapi kondisi seperti ini sangat berbeda ketika cuaca kurang mendukung

saat mengeringkan rumput laut, pemilik rumput laut melakukan kegiatan pengeringan dengan cara menebar ketika matahari memungkinkan dan memungut lalu mengangkatnya ke tempat aman ketika turun hujan. Sebab memang persoalan pengeringan menjadi salah satu cara mengukur kualitas hasil produksi yang akan dipasarkan.

Ketika rumput laut sudah berada pada kondisi kering sesuai yang diharapkan, sebelum dilakukan pendistribusian, berbagai item kegiatan yang masih perlu dilakukan para pemilik usaha, misalnya para pemilik dengan melibatkan beberapa orang tenaga kerja yang umumnya kaum perempuan, usaha pemilik agar lebih cepat terjual, dengan melibatkan beberapa orang tenaga kerja beramai-ramai dalam satu lokasi melakukan kegiatan pemberian atau melepas kotoran yang masih melengket/menempel pada rumput laut, termasuk tanah atau pasir serta tangkai rumput laut sendiri yang terbilang rusak. Setelah rumput laut itu dalam kondisi bersih, para pemilik melanjutkan kegiatan dengan memasukkan ke dalam karung tempat menyimpan, sekaligus menjadi alat ukuran saat dilakukan penimbangan beratnya isi karung tersebut. Umumnya transaksi penjualan rumput laut yang dilakukan masyarakat petani tanaman rumput laut di Sumpang Minagae dilangsungkan di kediaman atau di rumah masing-masing pemilik, artinya para pembeli yang mendatangi langsung pemilik rumput laut dengan membawa kendaraan sebagai angkutan, termasuk timbangan. Setelah itu proses penjualan, maka berakhirilah sampai di sini beragam prosudur yang dilangsung petani rumput laut.

Model Keterlibatan Pemerintah dan Masyarakat

Sebenarnya, dalam bentuk apapun usaha yang dilakoni masyarakat yang hidup dan tumbuh dalam suatu wilayah pemukim-

an, seperti halnya yang dijumpai pada masyarakat nelayan yang menjadikan area bermukim atau tempat tinggal Kelurahan Sumpang Minangae, pada prinsip tidak mungkin dapat berlangsung tanpa melihat atau melibatkan pihak ketiga di dalamnya. Namun pihak ketiga yang perlu diungkap dalam tulisan ini, apakah yang turut terlibat adalah dari kalangan pemerintah atau pun dari kalangan masyarakat umum. Dan kedua komponen disebutkan justru dapat dikategorikan menjadi salah satu objek pendukung langgeng lancarnya usaha yang tergeluti masyarakat setempat yang orientasinya hidup sebagai nelayan. Artinya, kedua komponen pendukung dimaksud, yaitu pemerintah dan masyarakat sebenarnya sangat berperan penting, misalnya ketika kita mengukur keikutsertaan pemerintah, maka yang menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana memberi masyarakat dorongan moril agar usaha yang mereka geluti tetap menjadi penopang dalam melanggengkan kehidupan masyarakat bersangkutan.

Itulah sebabnya ketika model dukungan pemerintah menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kelurahan Sumpang Minangae, maka yang diharapkan keterlibatan pemerintah adalah memberi bantuan atau suntikan dana untuk pengembangan usaha, termasuk memberi pemahaman sekaligus memberi penyuluhan dalam berbagai bentuk agar usaha yang mereka geluti yang nota benenya sudah dilangsungkan secara turun temurun dari generasi pendahulu hingga sekarang ini dapat lebih menambah motivasi dan semangat masyarakat untuk merubah pola pikirnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan terkait dengan keterlibatan masyarakat memang mesti menjadi sesuatu yang tergolong penting oleh karena masyarakat di luar komunitas nelayan justru bersatu menjadi mitra kerja, apakah posisi masyarakat dimaksud sebagai penyedia tenaga kerja atau masyarakat dimaksud dalam tulisan ini

berada pada posisi sebagai pelaku pasar atau mitra dalam rangka nelayan melempar hasil usaha yang mereka hasilkan, dalam hal ini biota laut, termasuk hasil produksi yang lazim dikenal dengan sebutan rumput laut. Sebab masyarakat produsen, seperti masyarakat nelayan, khususnya yang menjadikan area bermukim Sumpang Minangae terkadang dalam melempar atau menjual hasil usaha tangkapannya tidak dipungkiri menuai kendala. Dalam kalaupun persoalan pemasaran tidak menjadi kendala, maka terkadang harga yang tidak mendukung, apalagi ketika nelayan bersangkutan beraktivitas dibawa komando pemodal, maka tentu yang lebih banyak menikmatinya adalah pemodal atau pemilik usaha, dalam hal ini penyedia peralatan atau alat tangkap.

Khusus terkait dengan keterlibatan pihak pemerintah dalam rangka usaha membangun masyarakat nelayan, di manapun ia berada memang sudah berlangsung cukup lama, seperti halnya informasi yang diungkap oleh masyarakat nelayan, baik yang sudah berkecimpung lama maupun generasi belakang yang umumnya generasi pelanjut dari orang-orang pendahulu mereka, dikatakannya bantuan pemerintah terhadap kami nelayan di Sumpang Minangae memang nelayan secara keseluruhan mengetahuinya. Hanya menurutnya bantuan yang diberikan pemerintah dikatakannya lebih kasar kalau dikatakan salah sasaran, artinya tidak mengenai pada kelompok-kelompok nelayan yang memang sudah sangat membutuhkan. Kalau pun model bantuan yang diberikan pihak pemerintah dimaksud sudah kena sasaran, yang menjadi problem lagi adalah bantuan material yang diberikan tidak sesuai dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat.

Beberapa contoh kasus terkait dengan masalah bantuan pemerintah terhadap nelayan yang bermukim di Sumpang Mi-

nangae yang sebenarnya kasus seperti ini tidak perlu terjadi. Kasus dimaksud sebagaimana diinformasikan masyarakat nelayan melalui wawancara yang diungkap oleh salah seorang nelayan yang sudah bekerja sebagai nelayan cukup lama. Nelayan dimaksud bernama panggilan Labolong mengatakan, bahwa sebenarnya bantuan pemerintah yang ditujukan pada masyarakat nelayan di Sumpang sering terdengar di telinga mereka, hanya saja yang menikmati bantuan dimaksud hanya pada orang-orang tertentu sehingga ia dengan tegas mengatakan dari dahulu hingga kini yang namanya bantuan dari pemerintah dia belum pernah rasakan, termasuk dengan orang-orang yang menjadi rumpun keluarga mereka. Dalam artian yang merasakan bantuan kalau ada yang disalurkan pemerintah ada pada kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya masih banyak yang lebih layak menerimanya dibanding penerima bantuan dimaksud. Jadi sebenarnya problem bantuan semacam ini memang hampir dialami kelompok-kelompok nelayan. Terjadinya kondisi seperti ini membuat nelayan yang merasa tidak berada pada perihai keberuntungan selalu berperasaan pasrah menerima kenyataan yang ada, dengan mengatakan kalau ada diterima kalau tidak juga tidak apa-apa, sebab bekerja sebagai nelayan dikatakannya sulit lagi dihindari, selain sulit lagi bagi dirinya mengubah haluan dengan berusaha pada sektor lain, juga menurut bekerja sebagai nelayan sudah merupakan bagian dalam hidupnya yang sudah sangat sulit ditinggalkan.

Bentuk keluhan lain masyarakat nelayan Sumpang Minangae terkait dengan adanya bentuk perhatian pemerintah terhadapnya adalah terkait dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan alat tangkap, seperti halnya pengadaan sarana transportasi melaut, termasuk jenis alat tangkap yang mereka gunakan, di samping jenis peralatan yang menjadi pendukung nelayan dalam meniti hidupnya sebagai masyarakat yang dika-

takan hanya bisa mencari nafkah dari hasil memanfaatkan dan menggunakan kayanya sumberdaya laut yang mengelilingi mereka. Menurutny peralatan yang mereka terima rata-rata tidak sesuai dengan kebutuhan, misalnya terkandung pemberian mesin sebagai tenaga penggerak saran transportasi yang mereka gunakan ukuran kurang layak sehingga harapannya untuk menjangkau area penangkapan yang dikatakannya semakin hari semakin jauh tentu belum sesuai sesuai harapan, sehingga mereka dalam beraktifitas tetap berkutak kutik pada area atau zona yang ada sebelumnya, padahal biota laut yang selama ini menjadi sasaran tidak lagi dapat dijangkau dengan peralatan seadanya.

Kasus lain yang digambarkan masyarakat nelayan Sumpah Minangae terkait dengan keterlibatan pemerintah dalam hal pemberian bantuan yang dikatakannya tidak mengena sasaran sebagaimana dikemukakan beberapa nelayan yang sebelumnya dikatakan rata-rata bantuan tidak mengena pada sasaran di samping tergolong tidak efektif. Seperti dicontohkan beberapa tahun silam pemerintah memberi bantuan berupa alat pemegri-
ngan ikan. Menurut sebahagian masyarakat nelayan setempat, alat pengeringan ikan yang diberikan sebenarnya tidak sesuai dengan harapannya, sebab alat dimaksud dikatakannya tidak cocok digunakan nelayan laut oleh karena belum beberapa bulan digunakan menjemur ikan, barang-rang yang diperkirakan nelayan setempat bernilai beli cukup mahal itu sudah rawan digunakan oleh karena tidak tahan dengan air laut, dalam alat tersebut cepat karatan. Denagan karatan tersebut, selain cepat hancur, tentu pula terhimbis pada pada ikan yang dikeringkan kurang berkualitas. Dengan kondisi bantuan seperti ini, tidak salah kalau dikatakan fakta yang ada di lapangan, bantuan berupa alat pengeringan dikatakan mubassir oleh karena pada prinsipnya sarana dimaksud tidak dapat digunakan dengan maksimal.

Terjadinya kondisi seperti apa terungkap sebelumnya sehingga sebahagian nelayan berani mengatakan memang masyarakat nelayan itu selalu mendapat perhatian, hanya saja sifatnya tidak merata, dan masih terkesan pilih kasih. Bahkan terkadang bantuan itu salah sasaran, di samping wujud bantuannya tidak efektif oleh karena masyarakat nelayan secara umum tidak dapat memfungsikannya secara maksimal. Dan menurut dugaan sementara sebagai peneliti, dengan kejadian seperti apa yang dialami masyarakat nelayan sebagaimana digambarkan sebelumnya, khususnya yang teramati pada nelayan bermukim di wilayah Sumpang Minangae merasa diri sulit keluar dari garis batas kehidupan yang lebih layak, bahkan berkonotasi hidup di bawah garis kemiskinan. Besar kemungkinannya ketika persoalan semacam ini tetap dan terus dihadapi masyarakat nelayan, maka dapat diprediksi masyarakat nelayan, khususnya yang memang sudah terplot sebagai nelayan kebanyakan atau nelayan pekerjaan hidupnya pasti selalu berada dalam impian yang tidak jelas, walau sebenarnya secara umum mereka merasa dengan penghasilan yang dikatakan pas-pasan atau terkadang tidak cukup, mereka tetap berada pada koridor melihat lingkungan laut itu sebagai suatu ruang produksi yang sulit terhindar, bahkan dikatakan menjadi penentu dalam memuluskan kelangsungan hidup bersama anggota keluarganya.

Informasi lain dari masyarakat nelayan setempat yang mengatakan, bahwa persoalan yang terjadi seperti apa yang terungkap sebelumnya, pada dasarnya mereka tidak jadikan sebagai sesuatu yang menghantui pikirannya, mereka menekuni pekerjaan yang sudah dilangsungkan sejak pendahulunya tetap dilakoninya sebagai harapan satu-satunya dalam melangsungkan hidupnya. Itulah sebabnya mereka secara faktual eksis menjalankan misinya sebagai komunitas nelayan, walaupun bekerja sebagai nela-

yan sebenarnya bukan merupakan model usaha yang tidak penuh dengan risiko, baik risikonya itu dapat dilihat dalam bentuk minimnya hasil yang didapat karena keterbatasan kemampuan memiliki peralatan seperti yang dimiliki orang-orang yang mempunyai tingkat kemampuan lebih dari dirinya untuk mengadakan peralatan yang serba modern, sehingga dapat menjangkau area tangkap maksimal. Begitula pula tingginya tingkat risiko yang ditimbulkan oleh lingkungan alam laut yang memang mengandung sifat kemisteriusan yang cukup tinggi oleh karena dikatakannya setiap saat dapat mengancam kehidupan para nelayan, baik ketika mereka sedang berada dalam aktivitas maupun terhadap wilayah pemukiman mereka yang setiap saat dapat memporak porandakan lingkungan akibat angin kencang yang mendatangkan tingginya gelombang air laut. Kesemua bentuk risiko disebutkan pada prinsipnya menjadi sebuah barometer sehingga umumnya nelayan itu dikatakan hidup dalam bentuk kepasaran menerima apa adanya.

Lain lagi dengan perihal keterlibatan yang digolongkan masyarakat lain, menurut informasi nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae Parepare, mengatakan ketika kita berbicara mengenai masyarakat nelayan, maka kita secara faktual berbicara masalah suatu kesatuan yang banyak komponennya antara satu dengan lainnya. Dikatakannya seperti ini oleh karena seorang nelayan dikatakannya tidak dapat berbuat secara maksimal tanpa keterlibatan orang lain sebagai pihak ketiga. Orang lain sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini bukan berarti sekedar orang perorang, tetapi orang lain dimaksud di sini bisa berwujud sebagai sebuah lembaga, terutama yang erat keterkaitan dengan lembaga yang bergerak pada sektor perekonomian, yang mana diantaranya bisa berwujud lembaga pemasaran, dalam hal ini pemilik modal atau pedagang pengumpul, di samping lembaga pemberi

pinjaman yang umumnya berwujud koperasi. Bahkan yang dikatakan lembaga koperasi umumnya hadir di lingkungan masyarakat produsen memang berdirinya diprakarsai oleh kelompok-kelompok kerja, dalam hal ini kelompok nelayan, sehingga posisi sebagai nelayan mereka berperan sebagai anggota. Bahkan masyarakat lain seperti dimaksudkan bisa berwujud sebagai sebuah kios atau toko yang memang berdagang beragam jenis peralatan yang dapat mendukung terlaksananya sebuah usaha yang bergerak pada sektor kenelayanan, seperti toko penjualan komponen alat tangkap, termasuk mesin penggerak kapal motor sebagai sarana transportasi bagi nelayan.

Keterlibatan orang lain sebagaimana digambarkan sebelumnya dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae, pada prinsipnya tidak hanya hadir atau tampil dalam konteks fisik belaka, tetapi orang dan lembaga ini hadir berada dalam posisi saling membutuhkan, bahkan saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Misalnya masyarakat nelayan sebagai unsur produsen tentu membutuhkan pihak atau orang lain dalam rangka menjajakan atau mendistribusikan hasil tangkapannya. Dalam kondisi seperti inilah hadir yang dikatakan proses jual membeli walau dengan menggunakan banyak model atau sistem. Seperti dalam proses jual beli ada kelompok kerja nelayan yang melakukan dengan cara menjual langsung kepada pemakai atau pengkonsumsi hasil laut, dalam hal ini ikan dan jenis biota laut lainnya, serta ada model penjualan hasil produksi yang dilakukian dengan cara memfokuskan pada pedagang-pedagang pengumpul yang diistilahkan dalam bahasa setempat pappalele, bahkan yang terjadi pada kelompok masyarakat nelayan yang dikatakan tidak memiliki modal kerja, termasuk peralatan kerja, justru keterlibatan orang lain sebagaimana dimaksud sangat dibutuhkan, artinya yang bersangkutan dalam menjalankan aktivi-

tasnya sangat bergantung pada orang lain sebagai pemilik modal kerja. Olehnya itu hasil tangkapannya pun seluruhnya diatur oleh pemilik usaha dimaksud.

Keterkaitannya dengan kehadiran koperasi pada prinsipnya menjadi komponen atau lembaga yang sebenarnya sangat dirindukan masyarakat nelayan, khususnya yang ditemukan di wilayah Sumpang Minangae. Dikatakan seperti ini oleh karena wadah perekonomian ini menjadi sasaran utama hampir setiap nelayan saat membutuhkan pinjaman dana segar, baik itu kebutuhan dalam bentuk yang sifatnya permanen kebutuhan yang bersifat sementara. Artinya, umumnya masyarakat nelayan ketika membutuhkan uang dalam rangka menutupi kebutuhan sebagaimana digambarkan sebelumnya, maka lembaga koperasi ini yang dijadikan sasaran utama. Dipilihnya koperasi sebagai sasaran utama meminjam bagi masyarakat nelayan, selain karena memang memiliki hak meminjam dalam posisinya sebagai anggota, juga dengan meminjam di lembaga koperasi ini cukup dirasakan kemudahannya oleh karena lembaga ini dikatakan telah menjadi sebuah komponen dalam kehidupan masyarakat nelayan, khususnya terhadap nelayan yang telah berperan serta sebagai anggota lembaga perekonomian dimaksud.

Begitu pula halnya keterlibatan orang lain yang terplot sebagai sebuah kios atau toko pengadaan peralatan pendukung masyarakat nelayan, yang secara faktual kehadirannya tidak jauh berbeda dengan lembaga perekonomian, dalam hal ini koperasi sebagaimana digambarkan sebelumnya. Keterlibatan toko sebagai penyedia bahan-bahan vital masyarakat nelayan sebagaimana digambarkan sebelumnya, menurut informasi dari sebahagian masyarakat nelayan adalah sesuatu yang dianggap sangat prinsip oleh karena dia hadir sebagai mitra kerja yang dikatakannya dapat meringankan beban kehidupan masyarakat nelayan. Artinya, toko dimaksud hadir

membantu masyarakat nelayan mengadakan perangkat-perangkat kebutuhan vital melaut masyarakat nelayan. Munculnya mitra kerja antara dua komponen masyarakat ini, yaitu antara nelayan dengan pemilik toko pengadaan peralatan kerja dibarengi dengan munculnya rasa saling membangun kepercayaan, artinya pemilik toko hadir dengan tekad memberi barang kepada nelayan dengan cara meminjamkan dengan sistem angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebab menurut masyarakat nelayan setempat tanpa memberlakukan cara seperti dimaksud mustahil masyarakat nelayan dapat memiliki peralatan kerja, terutama yang bernilai beli cukup tinggi, seperti halnya yang banyak dilakukan masyarakat nelayan dewasa ini adalah pengadaan mesin perahu motor, termasuk mesin genset untuk pembangkit tenaga listrik bagi nelayan yang memang membutuhkan, bahkan tidak jarang sampai pada sistem angsuran dalam rangka pengadaan alat tangkap, seperti halnya jaring dan sebagainya, walau sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat nelayan menjadi sesuatu yang membebani hidup mereka oleh karena harga barang yang dibeli dengan cara angsuran bukan lagi pada tatanan harga yang semestinya, artinya mereka membeli barang dengan harga yang berlipat ganda.

Jadi pada prinsipnya, posisinya sebagai masyarakat nelayan yang secara kasak mata rata-rata masih hidup dibawah standar kehidupan yang layak, tetap masih melihat komponen lembaga dan masyarakat lain sebagai mitra yang masih dibutuhkan. Sebab memang keterlibatan pihak pemerintah di luar dari adanya pemikiran miring atau negatif terkait dengan sumbangsih pemerintah terkait sebagaimana terungkap sebelumnya, termasuk yang dikatakan masyarakat lain masih dikategori komponen yang cukup vital dalam kehidupan mereka, walau sebenarnya juga tetap menjadi beban hidup dalam keluarga. Mungkin dengan dipakainya sistem seperti ini justru menjadi salah satu faktor sehingga

masyarakat nelayan secara umum selalu atau tidak salah kalau dikatakan sebuah komunitas yang sampai saat ini dilihat, bahkan dicap sebagai masyarakat yang hidupnya sulit keluar dari jaringan sebuah bentuk kehidupan yang serba kekurangan atau hidup pada rana garis kemiskinan.

Kesenjangan hubungan fungsional antar pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi oleh karena persoalan kemaritiman masih dapat dikatakan berada pada titik terabaikan, bahkan dengan terabaikannya masyarakat maritim menimbulkan berbagai persoalan yang dikatakan cukup kompleks. Pada hal kalau kita mencermati, ada beberapa instansi pemerintah yang terbentuk cukup memberi perhatian terhadap masyarakat pesisir, seperti halnya dibentuknya Dinas Kelautan yang sasarannya adalah mengarah langsung pada kehidupan nelayan, termasuk Departemen Sosial, dan BKKBN. Sebenarnya keterlibatan berbagai instansi pemerintah dalam rangka usaha memperbaiki pola hidup masyarakat nelayan, kalau kita mencermati apa yang menjadi fakta pada masyarakat nelayan, seperti yang ditemukan di Sumpang Minangae dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Sebab apa yang dicanangkan masing-masing instansi besar kemungkinannya belum menyentuh langsung pada masyarakat yang membutuhkannya. Bahkan konsep pemberian bantuan kalau kita menyimak beberapa kasus yang dialami masyarakat nelayan sesuai apa yang digambarkan dalam tulisan sebelumnya adalah sebuah konsep yang sebenarnya tidak dibangun dari bawah, dalam hal ini penyusunan program instansi yang melibatkan boleh dikatakan tidak diawali dengan sebuah survei yang mendalam. Padahal yang menjadi terpenting dilakukan instansi pemerintah yang melibatkan dalam melirik masyarakat nelayan adalah mensinergikan sasaran penerapan program kerja seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat sebagai sasaran penerapan program kerja.

Sistem Nilai Budaya Dalam Keterkaitannya Penanggulangan Kemiskinan

Nelayan Sumpang Minangae yang dijadikan sasaran kajian dalam tulisan ini, merupakan salah satu komunitas yang terplot sebagai kelompok sosial yang mewakili nelayan Bugis. Dikatakan seperti ini oleh karena ketika kita berbicara masalah orang Bugis, maka wilayah persebarannya cukup banyak dan luas. Tetapi untuk lebih mengefektifkan tulisan yang berwujud hasil penelitian, wilayah Sumpang Minangae Parepare yang dijadikan sasaran dalam tulisan ini. Sebab memang fakta lapangan menunjukkan, bahwa komunitas nelayan yang ditemukan di Wilayah Sumpang Minangae saat dilangsungkannya penelitian masih didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang suku bangsa Bugis, walaupun sebenarnya dengan terjadinya suatu peristiwa kawin mawin yang bersifat eksogami, maka tidak berarti di wilayah Sumpang Minangae seluruh nelayannya berlatar belakang suku bangsa Bugis. Dalam kehidupan orang Bugis tetap menerapkan suatu bentuk ketegasan, sehingga segala bentuk pilihan yang diambil model tindakannya menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat dalam rangka penanaman nilai budaya. Ada beberapa hal pokok terkait dengan nilai budaya yang tergolong masih dianggap ampuh dalam rangka berusaha melepaskan masyarakat nelayan dari keterpurukan dalam hidup yang diistilah kemiskinan.

Gotong Royong

Gotong royong diketahui menjadi salah satu pondasi yang umumnya masih tertanam dalam lingkungan masyarakat yang beraktivitas dalam sektor pertanian, termasuk didalamnya hidup sebagai komunitas nelayan, walau sebenarnya tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk meringankan beban pada masyarakat

yang tergolong kurang mampu (miskin), tetapi prinsip ini tetap bertahan dalam lingkungan masyarakat yang boleh dikatakan hidup dalam sebuah rana yang membutuhkan. Sebab pada prinsipnya di kalangan masyarakat nelayan memang ditemukan ada bentukkan status yang tidak dilakukan secara sengaja, tetapi kondisi seperti ini lahir dari adanya faktor ketidakmampuan seseorang menguasai lingkungan alam yang menjadi tempat mencari nafkah hidup. Apalagi memang dengan kepemilikan power yang berbeda terutama terkait dengan konsentrasi pencarian/ penangkapan tentu hasil yang diharapkan juga berbeda. Bahkan dalam lingkup kehidupan masyarakat nelayan umumnya, seperti yang ditemukan di wilayah Sumpang Minangae orang-orang yang umumnya berada pada posisi sebagai pekerja, dalam hal ini buruh atau tenaga pekerja kebanyakan yang disebut sawi adalah kelompok orang dikategorikan miskin.

Penerapan sistem gotong royong yang ada pada masyarakat sederhana seperti halnya yang ditemukan pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Sumpang Minangae dapat dikatakan masih menjadi salah satu pilar yang dapat menjadikan masyarakat berada pada rana saling menutupi kekurangan. Artinya, antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya saling membantu dalam banyak hal. Hanya saja penerapan sistem gotong royong yang menjadi identitas atau ciri khas masyarakat pedesaan di era modern ini tidak lagi sepenuhnya diberlakukan sebagaimana di era sebelumnya yang betul-betul melihat masalah ini sebagai suatu sistem yang perlu dibangun dan dipertahankan guna mensiasati terjadinya kesenjangan yang terlalu jauh antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sebab ketika persoalan terkait dengan apa yang menjadi sasaran dari yang dikatakan dengan istilah gotong royong tidak lagi terbangun dalam sebuah masyarakat seperti yang yang ter-

pantau pada masyarakat nelayan yang hidup dan bermukim di wilayah Sumpang Minangae yang mana ditemukan adanya perbedaan status sosial, dalam hal ini tingkat kesejahteraan, maka dengan sendirinya masyarakat yang berada pada tatanan kelas bawah atau dikatakan tidak memiliki kekuatan dalam menutupi kebutuhan hidupnya tentu selalu berada pada posisi yang sangat susah melepaskan diri dari impitan kemiskinan.

Masih melekatnya sistem gotong royong dalam artian saling membantu antara satu dengan lainnya sedikit banyaknya persoalan kemiskinan sedikit demi sedikit dapat teratasi. Sebab ketika tingkat kekuasaan atau power ada pada orang-orang tertentu, dalam hal ini hanya berada pada orang-orang pemilik kekuatan untuk menguasai sektor produksi, maka yang bersangkutan boleh dikatakan wajib melindungi mereka yang berada pada posisi tidak memiliki power atau kekuatan. Artinya, pada posisi orang-orang yang mampu mengadakan peralatan kerja yang memadai tentu menjadi suatu bentuk kewajiban mempekerjakan orang-orang yang dikatakan tidak mempunyai kemampuan, bahkan jika perlu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bersangkutan berada posisi sebagai mitra kerja. Sebab kalau tidak dilangsungkan seperti ini maka jurang pemisah semakin jauh antara pemilik modal dengan orang-orang yang hanya berstatus pekerja biasa yang berada pada posisi mayoritas.

Teknologi

Teknologi pada prinsipnya menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada pada posisi sebagai pengguna sekaligus pemanfaatan lingkungan laut. Teknologi pada prinsipnya mesti terpenuhi jika ada usaha masyarakat melepaskan diri dari jurang kehidupan yang dianggap kurang mampu, dalam hal ini terlepas dari kehidupan yang namanya kemiskinan.

Sebab tanpa dibarengi penggunaan peralatan kerja yang berteknologi maju tentu usaha pencaharian sekaligus penangkapan mustahil harapan yang akan dicapai sangat sulit terpenuhi. Apalagi area yang dijadikan sasaran pencarian dalam posisinya sebagai nelayan tangkap tidak terpenghenti semakin hari semakin bergeser ke arah yang sulit terjangkau tanpa menggunakan peralatan yang sanggup mendukungnya, baik teknologi dalam kaitannya dengan peralatan tangkap maupun teknologi yang terkait dengan sarana transportasi melaut. Walau sebenarnya terjadinya kondisi seperti ini juga tidak terlepas dari ulah manusia sendiri yang dalam beraktivitas boleh dikatakan tidak pernah mau memperhitungkan masalah pelestarian lingkungan, bahkan ada sebahagian yang tidak segan-segan dalam beraktivitas sebagai nelayan justru tidak memperhatikan kelangsungan biota laut yang menjadi sasaran kelak bagi anak cucunya, dan menurut pengamatan kami hal ini yang terjadi pada masyarakat nelayan setempat yang jauh hari sebelumnya dapat menikmati hasil tangkapannya tidak perlu bersusah payah menjangkau area yang lebih jauh dan membutuhkan peralatan sebagai pendukung berteknologi maju.

Jadi dapat disimpulkan disini bahwa salah satu cara nelayan, khususnya yang ditemukan di Sumpang Minangae Melepaskan diri dari hidup dalam keterpurukan adalah memfasilitasi diri dengan pemanfaatan peralatan pendukung yang boleh dikatakan berteknologi maju atau modern. Sebab tanpa perubahan ke arah dimaksud masyarakat terutama yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman, maka yang bersangkutan tidak mustahil tetap berada dalam rana kehidupan stagnan. Sebab tidak dapat dipungkiri pemanfaatan teknologi maju lambat laun masyarakat dapat menjangkau area tangkap sesuai yang diinginkan sehingga dengan sendirinya pendapatan nelayan juga bisa meningkat. Artinya, pemanfaatan sarana dan prasarana yang yang

berteknologi maju adalah menjadi salah satu bentuk atau cara menanggulangi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang lebih layak.

Bantuan

Persoalan bantuan dari pihak atau lembaga terkait masih menjadi salah satu cara yang dianggap tepat dalam rangka meng-
usahan masyarakat nelayan, khususnya yang tidak berada pada posisi memiliki kemampuan untuk berbuat semaksimal mungkin. Walau sebenar bantuan yang dimaksud selalu ada di kalangan masyarakat, hanya saja yang terjadi menurut pengakuan masyarakat tidak kena sasaran, dalam artian ketika bantuan itu diluncurkan, baik melalui permohonan masyarakat maupun melalui sumbangsiah langsung instansi atau lembaga terkait itu bahkan selalu tidak berada pada keberpihakan masyarakat yang membutuhkannya. Bahkan menurut masyarakat ketika bantuan diluncurkan ada dua persoalan inti dianggap tidak mengena sasaran. Misalnya instansi terkait dalam meluncurkan bantuan tidak dibangun dengan terpatok pada apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dan lebih parah lagi bantuan yang tersalurkan, di samping tidak tepat sasaran, juga bantuan tidak fungsional. Terjadi kondisi seperti ini oleh karena para pemberi bantuan tidak melakukan survei awal yang intinya melihat apa yang terjadi pada masyarakat. Itulah sebabnya bantuan yang umumn ya diterima masyarakat nelayan kalau pun itu tersalurkan umumnya yang menjadi penikmat ada pada orang-orang yang mempunyai pendekatan lebih baik, termasuk tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu model penerapan bantuan yang sempat dikemukakan masyarakat, bantuan dari instansi pemerintah buiasa jatuh pada orang atau kelompok orang yang tidak berada pada tarap membutuhkan. Kondisi seperti inilah sehingga terjadi adanya yang dikatakan sifat monopoli. Pada hal ketika prinsip seperti ini

tidak terjadi, maka tidak mustahil dalam lingkungan masyarakat nelayan umumnya hidup dalam tarap memadai, sebab harapan hidup masyarakat yang dibutuhkan terkait dengan peluncuran bantuan bisa berjalan seimbang dan merata. Begitu pula halnya yang terkait dengan tidak fungsionalnya sistem bantuan yang diluncurkan instansi terkait membuat masyarakat nelayan setempat tidak berharap banyak mengalami perubahan. Sebab apa yang diberikan kepadanya tidak dapat difungsikan secara maksimal. Seperti dicontohkan ketika mereka menerima bantuan berupa sarana transportasi, umumnya bantuan itu tidak sesuai dengan kapasitas mesin perahu yang dibutuhkan untuk melaut, artinya dengan perubahan kondisi lingkungan alam yang mana area tangkap nelayan semakin jauh dan mesti didukung mesin perahu yang memadai itu tidak terpenuhi. Termasuk dengan bantuan sarana penjemuran hasil tangkapan umumnya bantuan tidak fungsional, artinya apa yang diberikan tidak dapat digunakan secara maksimal, termasuk di dalam sarana itu tidak dapat bertahan lama. Persoalan semacam ini muncul di kalangan masyarakat tidak terlepas dari adanya kesalahan sistem didalam memberi bantuan. Dan ketika perihal semacam ini tetap berulang dan bantuan yang diberikan hanya sekedar memuluskan sebuah kewajiban, maka masyarakat yang memang berada pada taraf hidup kurang mampu tetap sulit keluar dari sarang kehidupan yang dikatakan kemiskinan yang pada prinsipnya memang sulit terasi dengan hanya melihat dan menyelesaikan pada satu faktor. Sebab persoalan kemiskinan adalah suatu kondisi hidup yang sifatnya dikatakan sesuatu yang bersifat kompleks. Itulah sebabnya dalam usaha mengatasinya bukan menjadi suatu bentuk pekerjaan yang gampang, tetapi dalam mengatasi kemiskinan dibutuhkan senjata-senjata pamungkas untuk menyelesaikannya.

BAGIAN KEEMPAT

SIMPULAN DAN SARAN

Posisinya sebagai sebuah karya ilmiah, maka pada bab penutup ini ada dua komponen utama yang dijadikan fokus bahasan, yaitu satu komponen terkait dengan simpulan yang mana intinya adalah mengungkap apa yang menjadi inti dari tulisan ini, dalam hal ini apa yang menjadi isi dari tiga pertanyaan penelitian. Satu komponen lainnya adalah terkait dengan pengungkapan beberapa saran, terutama saran yang dapat dijadikan acuan dalam rangka melihat persoalan apa yang perlu dijadikan bahan pertimbangan instansi atau lembaga terkait dalam rangka berusaha melepaskan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian sesuai persoalan hidup dan kehidupan yang tengah dihadapi dewasa ini.

Simpulan

Mengacu dari tiga buah pertanyaan penelitian yang dijadikan dasar bahasan dalam tulisan ini, maka dapat diatarik simpulan-simpulan seperti berikut.

Pertama, masyarakat yang bermukim di wilayah Sumpang Minangae Parepare khususnya yang berada pada posisinya sebagai pengguna sekaligus pemanfaat lingkungan alam laut (nelayan) menerapkan berbagai model dan bentuk strategi dalam rangka melakoni aktivitasnya, menerapkan beberapa bentuk dan strategi terutama yang erat keterkaitannya dengan penggunaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk aktivitas lainnya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas penangkapan. Bentuk dan model strategi dimaksud berupa penggunaan peralatan tangkap yang disebut jala di mana merupakan alat tangkap walaupun berada pada posisi peralatan yang bersifat tradisional oleh karena menjadi peninggalan para leluhur tetapi justru masih berada pada posisi yang tetap menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Alat tangkap jala ini menjadi bagian yang terpenting dalam penggunaannya di tengah masyarakat nelayan Sumpang Minangae, begitupula beberapa alat tangkap lainnya. Seperti juga jaring yang diketahui di tengah masyarakat nelayan di wilayah Sumpang Minangae merupakan alat tangkap yang masih diharapkan banyak sebagai alat tangkap yang dapat diandalkan sebahagian besar masyarakat dalam rangka mencari sekaligus menangkap berbagai jenis biota laut, khusus ikan yang menjadi sasaran utama. Dikatakan seperti oleh karena pukat atau jaring yang digunakan nelayan yang dewasa ini bermukim di wilayah Sumpang Minangae adalah jaring klasifikasi biasa, artinya bukan jaring yang dalam beberapa kesempatan dikatakan dapat merusak oleh karena menjaring biota laut yang semestinya belum waktu untuk dijadikan sasaran tangkap.

Alat tangkap yang disebut pukat yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan nelayan yang bermukim di Sumpang Minangae tidak perlu menggunakan sarana transportasi yang berkekuatan besar dalam mengoperasikannya. Bahkan kenyataan yang

ditemukan di lapangan menunjukkan, bahwa dengan menggunakan transportasi tradisional, seperti halnya perahu biasa atau dikenal dengan nama sampan alat tangkap yang disebut pukot masih bisa digunakan. Selain jala dan pukot, masyarakat nelayan Sumapang Minangae dalam berusaha juga menggunakan teknologi alat tangkap yang disebut pancing atau kail. Alat tangkap dimaksud juga merupakan peralatan untuk mencari atau menangkap biota laut yang tergolong tradisional. Kalaupun ditemukan ada perubahan dari alat tangkap yang disebut kail kenyataannya hanya berkisar pada perubahan model peracikan, artinya jenis pancing yang dewasa ini digunakan menangkap ikan khususnya adalah jenis pancing yang diracik dengan beragam konfigurasi, yaitu ada yang dirancang dengan menyusun ke bawah beberapa buah mata pancing dalam satu unit, ada yang dirancang hanya dengan menggunakan satu mata pancing dalam satu. Artinya alat tangkap pancing yang digunakan nelayan setempat dewasa ini selalu dibentuk dengan aspirasi melihat kondisi ikan yang selalu menjadi sasaran, termasuk penyesuaian lingkungan dimana nelayan bersangkutan menggunakannya.

Terkait dengan area penggunaannya boleh dikatakan penggunaan klasifikasi racikan alat tangkapan pancing dikatakan tidak mengikat bagi nelayan, baik terkait dengan jenis pancing yang digunakan maupun terkait dengan sarana transportasi yang mesti digunakan. Tetapi semua persoalan yang diungkapkan selalu dikondisinya dengan musim atau area penangkapan. Artinya ketika musin ikan tertentu berada pada area yang terbilang jauh, maka tentu nelayan dituntut menggunakan sarana transportasi yang dikatakan memadai. Tetapi sebaliknya ketika area keberadaan ikan-ikan yang menjadi sasaran berada di sekitar daerah pesisir, maka nelayan dalam beraktivitas cukup menggunakan sarana transportasi dan mesti digerakkan dengan bermesin, seperti menggunakan dayung atau layar. Di samping alat tangkap disebutkan sebelum-

nya, bunre sebagaimana ditemukan di wilayah pemukiman masyarakat nelayan Sumpang Minangae merupakan salah satu alat tangkap yang pada prinsipnya dikatakan terbilang baru. Walau dikatakan terbilang baru, kalau dicermati secara seksama jenis alat tangkap dimaksud dikatakan bukan tergolong alat tangkap yang menggunakan teknologi maju sebab alat tangkap ini diracik sangat sederhana, dengan komponen utamanya terdiri dari perahu berukuran kecil yang dilengkapi mesin, jaring yang dirancang sangat sederhana, termasuk alat penerang yang dirancang sedemikian rupa sebagai alat memancing mendekatnya ikan yang menjadi sasaran.

Kedua, pada prinsipnya bentuk dan model keterlibatan pemerintah dan unsur masyarakat lainnya dalam usaha merubah pola hidup masyarakat walau sebenar belum berlangsung secara maksimal, tetapi tujuan ke arah mengubah pola hidup masyarakat nelayan yang dewasa ini bermukim di Sumpang Minangae ke arah yang lebih baik dari yang tampak dewasa ini tetap terlaksana. Seperti halnya memfasilitasi dengan suguhan peyuluhan berkaitan dengan kebutuhan, termasuk pemberian bantuan peralatan yang dapat mendukung usaha mereka. Namun belum terjadinya pencapaian sesuai harapan masyarakat banyak-banyak disebabkan oleh masih adanya unsur keberpihakan di antara mereka, sehingga yang umumnya terjadi adalah bantuan-bantuan yang ada selain tidak kena sasaran, juga ada yang tidak fungsional. Jadi umumnya mereka yang tidak berada pada posisi menerima bantuan dengan sendirinya berharap banyak dari institusi lain, dalam hal ini masyarakat luar yang punya kemampuan ke arah ini. Seperti halnya terhadap orang yang mempunyai modal kerja cukup umumnya memberi bantuan kepada masyarakat nelayan yang membutuhkannya, walau menurut nelayan yang sering memanfaatkan kesempatan mendapat bantuan seperti ini dikatakannya seakan sulit keluar dari pola hidup keterpurukan oleh karena penghasilan mereka banyak ditentukan oleh orang-orang

pemberi bantuan. Dan pola seperti ini yang berlangsung terus menerus di lingkungan masyarakat nelayan kebanyakan sehingga kebanyakan pergerakan menuju perbaikan ekonomi keluarga tetap dirasakan sulit tercapai. Apalagi ketika nelayan bersangkutan tidak menggunakan pihak ini sebagai penggerak usaha, maka menjadi suatu hal yang mustahil usaha mereka bisa berjalan. Sebab kondisi yang ditemukan di lapangan, banyak nelayan yang tidak melaut karena tidak memiliki modal kerja. Bahkan ada nelayan yang mengatakan ada perahu tetapi mesinnya tidak ada. Jadi kisru-kisru seperti inilah yang sebenarnya perlu disikapi untuk menemukan konci keterpurukan hidup nelayan kebanyakan.

Ketiga, usaha masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah Sumpang Minangae melepaskan diri dari pola hidup keterpurukan, walau bukan model dimaksud menjadi penentu utama tetapi sedikit banyaknya dapat terasi adalah tetap bertahan pada sebuah tatanan yang memang menjadi identitas masyarakat tertinggal adalah sistem gotong royong. Sebab sistem gotong royong dimaksud di sini masyarakat selalu berada dalam hidup kebersamaan, artinya masyarakat yang berada pada rana memiliki kemampuan selalu berada pada posisi menolong orang-orang yang tidak berdaya. Seperti digambarkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berusaha diharapkan selalu menjadikan mitra kerja bagi orang-orang yang tidak berada pada posisi ini. Sebab pada pemilik modal inilah mereka banyak menggantungkan hidupnya.

Begitupula halnya dengan teknonogi pada prinsipnya menjadi suatu penentu keberhasilan. Sebab pemanfaatan unsur teknologi, khususnya teknologi yang tepat guna berarti masyarakat dalam berusaha bisa maksimal. Sebab dengan usaha maksimal yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tentu pencapaian ke arah perbaikan pola hidup ke arah yang lebih baik menjadi mudah teratasi. Karena fakta yang ada pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah

Sumpang Minangae, minimnya pemanfaatan teknologi maju dalam keterkaitannya dengan sarana dan prasarana dalam beraktivitas membuat masyarakat tidak berdaya melepas diri dari sebuah ruang atau rana kehidupan yang dikatakan miskin atau keterpurukan ekonomi. Terjadinya kondisi seperti ini oleh karena memang situasi yang dihadapi umumnya nelayan dewasa ini, termasuk yang ditemukan di Sumpang Minangae dalam rangka berusaha melepaskan diri dari pola hidup yang tidak berkecupan harus didukung dengan peralatan pendukung dalam berusaha yang memadai. Sebab jika tidak berada pada posisi kepemilikan apa yang dikatakan teknologi maju, bagi yang bersangkutan selalu berada pada kondisi ketergantungan dari orang-orang yang dapat menguasai teknologi.

Persoalan bantuan juga masih menjadi suatu acuan atau yang diharapkan bagi masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan kebanyakan yang hidupnya rata-rata dibawah standar kelayakan. Sebab dengan menerima bantuan, baik yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun bantuan terkait dengan pendukung kelangsungan usaha pada prinsipnya masih menjadi sebuah atau salah satu solusi terbaik agar masyarakat nelayan yang berada pada posisi kurang mampu keluar dari pola hidup yang dikatakan miskin. Walau sebenarnya dengan pemberian bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin dewasa ini belum dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan secara tuntas, tetapi dengan adanya program bantuan yang disalurkan khusus bagi masyarakat kurang mampu, termasuk di kalangan masyarakat nelayan kebanyakan sedikit banyak dapat menjadi solusi mengurangi beban hidup masyarakat.

Saran-Saran

Item yang terangkum dalam bab penutup dari tulisan ini, selain kesimpulan yang terungkap sebelumnya, juga memuat be-

berapa saran yang ditujukan kepada pemerintah terkait. Dan saran-saran dimaksud agar dijadikan patokan untuk melihat masyarakat nelayan, khususnya yang ditemukan pada wilayah Sumpang Minangae yang kondisi hidupnya tidak berada pada kelayakan, pada dalam beberapa pernyataan yang mengatakan wilayah laut Indonesia merupakan karunia Ilahi yang menyimpan sumber kekayaan yang dapat dijadikan masyarakat untuk memperbaiki pola hidupnya yang terbelang layak. Adapun beberapa saran dimaksud terungkap seperti berikut.

1. Agar pemerintah dan instansi terkait tetap kontens melihat masyarakat nelayan kebanyakan sebagai aset harapan yang dapat menjadi penggerak peningkatan ke arah perbaikan perekonomian masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
2. Agar pemerintah dan instansi terkait tetap pro-aktif melihat masyarakat nelayan kebanyakan adalah bahagian masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih serius oleh karena yang bersangkutan menjadi tulang punggung di sektor perikanan laut.
3. Agar pemerintah dan instansi terkait tidak salah memilih dalam melihat masyarakat nelayan kebanyakan dalam menyalurkan bantuan kepadanya.
4. Agar pemerintah dan instansi terkait tetap melihat masyarakat nelayan kebanyakan sebagai masyarakat yang perlu mendapat perlindungan di samping mengidamkan kehidupan yang layak dan sejahtera.
5. Agar pemerintah dan instansi terkait tetap memberi prioritas kepada masyarakat nelayan kebanyakan dalam rangka membawa mereka keluar dari jeratan kemiskinan yang dalam banyak penelitian memang nelayan, khususnya nelayan kebanyakan diidentikkan dengan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Hamid, 1987. *Studi Sosio Antropologi Ekonomi Tentang: Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian. Ujung Pandang: Bappeda Tk I-Unhas.
- Amaluddin, Moh, 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Bodgan, Obert dan Steven J. Taylor, 1975. *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Daeng, J. Hans, 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gordon, H. Scott, 1954. *The Economic Teory of Common-Property Resource: The Fishery*.
- Geertz, Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essay*. New York: Basic Book Inc.
- Haba, Jhon, 2001. *Kemiskinan Pembangunan dan masyarakat Marginal*. Muhammad Hisyam (ed) Indonesia menapak

- Abad 21 dalam Kajian Sosial Budaya. Jakarta: Peradaban.
- Kavlan, David dan Albert A. Menner, 1999. *Teori Budaya. Terjemahan: The Theory of Culture*. Yogyakarta: Pustaka Press.
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jember: Pustaka Jogja Mandiri.
- Lampe, Muni, 1989. *Strategi-Strategi Adaptif yang Digunakan Nelayan Madura Dalam Kehidupan Ekonomi Perikanan Lautnya*. Tesis. Jakarta: Depdikbud, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Mattulada, 1984. *Kebudayaan dan Kualitas manusia adalah Kekuatan Utama Pengentasan Masyarakat dari Kemiskinan*. Orasi Ilmiah. Makassar: Dies Natalies VIII dan Wisuda Sarjana Negara Universitas 45
- Mubiyarto, dkk, 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: CV. Rajawali
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-15. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Parepare. 2011. *Profil Sumpang Minangae*.
- Singarimbun, Masri, Irawati dan Sofian Effendi, 1981. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sumardi, Mulyanto dan Hans-Dieter Evers, 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suparlan, Parsudi, 1992. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- S, Mulyadi, 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsul, Bahri, 2012. *Strategi Adaptif Nelayan Pulau Makassar di Bau-Bau Sulawesi Tenggara*. Hasil Penelitian. Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.
- Taslim, Ahmad, 2006. *Sekuritas Sosial Bagi Masyarakat Nelayan Miskin (Suatu Kajian Etnografi di Kelurahan Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Kota Parepare)*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

RIWAYAT HIDUP PENULIS I



Dr. SYAMSUL BAHRI, M.Si., lahir di Rappang 18 September 1960, saat ini merupakan pegawai negeri sipil di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. Saat ini dengan Jabatan Fungsional Ahli Peneliti Madya, banyak melakukan penelitian serta aktif sebagai peserta dalam seminar-seminar kebudayaan. Hingga saat ini telah menghasilkan lebih kurang 8 buah buku yang banyak berbicara dalam konteks Kebudayaan. Beberapa penghargaan satya lencana dalam bidang pengabdian telah diperolehnya. Menyelesaikan program Doktoral di Universitas Hasanuddin dalam bidang kajian Antropologi, penulis sering menjadi pemateri dalam kegiatan-kegiatan akademis yang membahas masalah kebudayaan terkhusus dalam kajian maritim.

RIWAYAT HIDUP PENULIS II



FATMAWATI P., lahir di soppeng pada 31 Desember 1967. Memperoleh gelar sarjana ekonomi tahun 1991. Jabatan fungsional saat ini adalah peneliti pertama pada Balai pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian yang telah diterbitkan antara

lain; *Menre Bola Baru: Sebuah Upacara Tradisional Orang Bugis Joppeng* (Jurnal 2014), *Nilai-nilai dalam Upacara Assunna pada Masyarakat Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan* (Jurnal 2015), *Persepsi Masyarakat Soppeng terhadap Makam Penyiar Islam di Kabupaten Soppeng* (Jurnal 2016), *Sekuritas Sosial Petani Padi Sawah di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat* (Jurnal 2017).

Indonesia merupakan sebuah negara yang tumbuh, terbangun dan berkembang dengan memiliki predikat kesuburan wilayah, baik wilayah daratan (tanah) yang kaya akan beragam tanaman yang dapat dijadikan kebutuhan langsung manusia maupun bukan merupakan kebutuhan langsung, terlebih sumber hayati laut bagi manusia. Wilayah lautnya pun justru menjadi pembatas antar satu pulau dengan pulau lainnya yang diketahui posisinya terbentang dari Sabang hingga Marauke. Kepemilikan wilayah laut yang dikatakan memiliki nilai plus dari wilayah daratan oleh karena kandungan biota lautnya yang dapat tampil menjadi tulang punggung atau penopang perekonomian negara secara menyeluruh, termasuk sebagai sasaran setiap orang atau kelompok masyarakat dalam rangka menyiasati tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Artinya, dengan kekayaan kandungan sumber daya laut, justru dikatakan cukup representatif sebagai lahan atau ruang olahan setiap penduduknya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup setiap warga masyarakatnya, khususnya terhadap masyarakat sebagai pendukung masing-masing sektor, dalam hal ini masyarakat nelayan yang berjuang menghidupi keluarganya dengan berangkat pada penerapan pola pencaharian atau strategi yang berbeda namun dengan satu tujuan adalah mencari nafkah hidup.

Penerbit



UPT. UNHAS PRESS

Gedung UPT Unhas Press

Telp. 0411 – 8997706

HP/WA 08535355569

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10

Email: unhaspress@gmail.com

ISBN 978-979-530-237-7

